

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202324998, 31 Maret 2023

## Pencipta

Nama : **Dr. Ir. Gembong Baskoro, M.Sc., IPU.**  
Alamat : Cluster Vila Pamulang Resort Blok CF 8 No. 15, Kecamatan Setu,  
Kelurahan Bhakti Jaya, Tangerang Selatan, BANTEN, 15315  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Ir. Gembong Baskoro, M.Sc., IPU.**  
Alamat : Cluster Vila Pamulang Resort Blok CF 8 No. 15, Kecamatan Setu,  
Kelurahan Bhakti Jaya, Tangerang Selatan, BANTEN, 15315  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis**  
Judul Ciptaan : **MODERNISASI PERGURUAN TINGGI GUNA PEMANTAPAN  
JATI DIRI BANGSA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN  
NASIONAL**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 1 Desember 2011, di Jakarta  
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh  
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1  
Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000457921

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

## Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---



**MODERNISASI PERGURUAN TINGGI GUNA  
PEMANTAPAN JATI DIRI BANGSA DALAM  
RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh :

**Dr. Ir. GEMBONG BASKORO, M.Sc.**

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) XLVI  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2011**



**MODERNISASI PERGURUAN TINGGI GUNA  
PEMANTAPAN JATI DIRI BANGSA DALAM  
RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL**

**Oleh :**

**Dr. Ir. GEMBONG BASKORO, M.Sc.**

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) XLVI/2011  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2011**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya dan PetunjukNya, penulis dapat menyelesaikan Kertas Karya Perseorangan (Taskap) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun judul Taskap ini adalah:

### **MODERNISASI PERGURUAN TINGGI GUNA PEMANTAPAN JATI DIRI BANGSA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL**

Judul Taskap tersebut telah melalui pertimbangan dan proses pengajuan judul hingga penetapan judul sesuai dengan surat keputusan no. Skep/517/VI/2011. Judul yang dibahas penulis telah dipilih dan disesuaikan dengan latar belakang pekerjaan penulis serta kekinian persoalan. Dasar pemilihan judul terutama karena penulis merasa peduli terhadap rendahnya daya saing perguruan tinggi pada khususnya dan pendidikan Indonesia pada umumnya. Akibat rendahnya pendidikan di tanah air saat ini, menyebabkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadi rendah. Selanjutnya berdampak sistemik pada penurunan daya saing berbagai bidang dan akhirnya bermuara pada rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara sekawasan dan dunia. Judul ini selain memiliki relevansi dan kekinian pada pembangunan nasional, hal ini juga berdampak pada ketahanan nasional Indonesia.

Taskap ini ditulis di tengah beragam kesibukan dan tugas yang harus diselesaikan pada waktu yang bersamaan, namun puji syukur karena Taskap ini tetap dapat diselesaikan tepat waktu atas bimbingan dan tutorial yang sangat berkesan dari Bapak **Drs. H. Chandra Manan Mangan, M.Sc.** sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih karena dalam kesibukannya, beliau masih dapat meluangkan waktu. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A.** sebagai

Gubernur Lemhannas RI, yang telah memberikan kesempatan sekali seumur hidup kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan PPRA XLVI/2011 di Lemhannas RI.

Taskap ini tentu saja tidak lepas dari berbagai kekurangan. Untuk itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai pandangan, saran, masukan maupun kritik demi penyempurnaan dari Taskap ini. Akhir kata, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada ketiga putri penulis dan istri tercinta, atas waktu dan kerelaan hingga penulis dapat menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal yang sama, juga ingin penulis sampaikan kepada rekan-rekan PPRA XLVI/2011 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian Taskap dan bantuan lain, baik teknis maupun non-teknis, selama penulis melaksanakan berbagai kegiatan dan tugas dalam mengikuti pendidikan di Lemhannas RI. Tentu saja kebersamaan yang telah terjalin merupakan kenangan indah yang tak terlupakan.

Jakarta, 1 Desember 2011

Penulis

**Dr. Ir. Gembong Baskoro, M.Sc.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Ir. Gembong Baskoro, M.Sc.**  
Pangkat : **Lektor**  
Jabatan : **Rektor**  
Instansi : **Universitas Widya Kartika, Surabaya**  
Alamat : **Jl. Sutorejo Prima Utara II-1, Surabaya 60113**

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke XLVI Tahun 2011 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Kaya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
  - b. Apabila ternyata sebagian tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 1 Desember 2011

Penulis

**Dr. Ir. Gembong Baskoro, M.Sc.**



TANHANA DHARMMA MANGRVA

## DAFTAR ISI

(Dengan Judul : "MODERNISASI PERGURUAN TINGGI GUNA PEMANTAPAN JATI DIRI BANGSA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL")

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1. Umum.....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	3
3. Ruang lingkup dan Sistematika .....	3
4. Metode dan Pendekatan.....	5
5. Pengertian .....	5
<b>BAB II. LANDASAN PEMIKIRAN</b>	
6. Umum.....	9
7. Paradigma Nasional .....	9
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	13
9. Landasan Teori.....	15
10. Tinjauan Pustaka .....	18
<b>BAB III. KONDISI MODERNISASI PERGURUAN TINGGI TERHADAP JATI DIRI BANGSA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL SAAT INI</b>	
11. Umum.....	21
12. Kondisi Modernisasi Perguruan Tinggi saat ini .....	21
13. Implikasi Modernisasi Perguruan Tinggi terhadap Jati Diri Bangsa dan Implikasi Jati Diri Bangsa terhadap Pembangunan Nasional.....	29
14. Permasalahan yang ditemukan.....	32



<b>BAB IV. PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS</b>	
15. Umum.....	35
16. Pengaruh Perkembangan Global .....	35
17. Pengaruh Perkembangan Regional.....	38
18. Pengaruh Perkembangan Nasional.....	40
19. Peluang dan Kendala .....	44
<b>BAB V. KONDISI MODERNISASI PERGURUAN TINGGI YANG DAPAT MEMANTAPKAN JATI DIRI BANGSA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	
20. Umum.....	46
21. Kondisi Modernisasi Perguruan Tinggi yang Diharapkan ...	46
22. Kontribusi Modernisasi Perguruan Tinggi Terhadap Pemantapan Jati Diri Bangsa dan Kontribusi Pemantapan Jati Diri Bangsa Terhadap Pembangunan Nasional.....	53
23. Indikator Keberhasilan .....	57
<b>BAB VI. KONSEPSI MODERNISASI PERGURUAN TINGGI YANG MAMPU MEMANTAPKAN JATI DIRI BANGSA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	
24. Umum.....	59
25. Kebijakan.....	61
26. Strategi.....	61
27. Upaya .....	69
<b>BAB VII. PENUTUP</b>	
28. Kesimpulan .....	78
29. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran-1. ALUR PIKIR
- Lampiran-2. POLA PIKIR
- Lampiran-3. RPJPN 2005-2025
- Lampiran-4. INDIKATOR DAYA SAING INDONESIA
- Lampiran-5. INDONESIA DALAM POSISI GLOBAL
- Lampiran-6. TEORI ROSTOW
- Lampiran-7. PERINGKAT PERGURUAN TINGGI DI ASIA
- Lampiran-8. TABEL INDIKATOR DAYA SAING INDONESIA
- Lampiran-9. PETA INDEKS PERSEPSI KORUPSI DUNIA
- Lampiran-10. DEMOGRAFI INDONESIA
- Lampiran-11. 6 KORIDOR PENGEMBANGAN INDONESIA
- Lampiran-12. SITUASI SDM INDONESIA
- Lampiran-13. STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI DI INDONESIA
- Lampiran-14. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PERGURUAN TINGGI
- Lampiran-15. INDEKS PENGEMBANGAN MANUSIA SECARA GLOBAL
- Lampiran-16. SISTIM PENDIDIKAN TINGGI DI BELANDA



TANHANA DHARMMA MANGRVA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Umum**

Tujuan dari dibentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: (1) untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sejak itulah bangsa Indonesia memulai perjalanan sejarahnya untuk mencapai tujuan dari dibentuknya NKRI.

Sejak Indonesia merdeka, banyak upaya Pemerintah dalam bentuk pembangunan nasional yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan nasional di berbagai bidang kehidupan dan telah dinikmati hingga saat ini. Pembangunan nasional tersebut, dapat disederhanakan pada lima bidang utama (panca gatra) yang merupakan gatra dinamis, yaitu: (1) Ideologi, (2) Politik, (3) Ekonomi, (4) Sosial dan Budaya, dan (5) Pertahanan dan Keamanan. Bersamaan dengan pembangunan yang meningkat di segala bidang, juga terjadi harapan dan tuntutan yang semakin meningkat terhadap kesejahteraan oleh masyarakat.

Namun demikian hasil-hasil pembangunan yang dinikmati saat ini, pada dasarnya masih bersumber pada eksplorasi dan eksploitasi Sumber Kekayaan Alam (SKA), khususnya pertambangan minyak/gas bumi. Upaya pembangunan nasional yang bersandarkan pada SKA sangat rentan keberlanjutannya mengingat SKA merupakan potensi yang tak terbarukan (*non-renewable*). Pendekatan pembangunan yang mengedepankan SKA sebagai sumber utama merupakan ciri dari pembangunan tradisional yang berbasis agraris. Pendekatan pembangunan nasional secara tradisional ini

tidak menjadi persoalan pada masa lalu. Namun, seiring dengan perubahan lingkungan strategis eksternal, baik global dan regional yang bercirikan teknologi tinggi, keterbukaan informasi, dan efektifitas dan efisiensi kerja yang tinggi dapat merupakan tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (TAHG) bagi pembangunan nasional diwaktu yang akan datang. Oleh sebab itu, pada masa orde baru, Indonesia telah melakukan perubahan arah pembangunan nasional yang berorientasi pada industri. Orientasi pembangunan seperti ini, merupakan ciri dari modernisasi fase-1 (Chuanqi, 2004). Pada masa orde baru industri tumbuh dengan cukup baik. Salah satu penyebabnya, belum banyak persaingan dari negara-negara lain, selain adanya proteksi dari Pemerintah. Namun demikian, saat ini industrialisasi di Indonesia mengalami tekanan persaingan yang berat seiring meningkatnya daya saing global maupun ASEAN, dimana negara-negara ASEAN juga telah memasuki modernisasi. Tekanan persaingan tersebut, saat ini menjadi luar biasa dengan tumbuhnya China yang akan menjadi sebuah negara *super power* yang baru di Asia, bahkan Dunia. Oleh karena itu, tidak heran saat ini Indonesia mengalami ancaman, bahkan sebagian diperkirakan telah mengalami deindustrialisasi. Banyak industri di dalam negeri tidak sanggup bersaing, baik dari segi kuantitas maupun kualitas terhadap produk-produk dari China. Perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat ini berdampak pada semakin besarnya *gap* ketertinggalan Indonesia dengan negara lain khususnya pada kualitas pendidikan tinggi, dan peradaban bangsa yang terbentuk karenanya.

Untuk itulah, Taskap ini berupaya membuat suatu konsepsi, bahwa untuk memperkecil *gap* ketertinggalan peradaban dapat dilakukan dengan penguatan jati diri bangsa melalui upaya modernisasi perguruan tinggi. Upaya yang dilakukan ini, dalam rangka pencapaian tujuan nasional, khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang tentunya akan berdampak pada kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*) yang menjadi dasar dari ketahanan nasional suatu negara. Upaya yang

akan diusulkan dinyatakan secara terstruktur dimulai dari perumusan kebijakan, strategi, dan upaya yang akan dilakukan.

## 2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud:** Penyusunan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan rumusan konsepsi tentang modernisasi perguruan tinggi guna pemantapan jati diri bangsa dalam rangka pembangunan nasional.
- b. **Tujuan:** Sebagai sumbang saran dan sumbang pikir bagi lembaga dan instansi terkait kebijakan untuk mewujudkan modernisasi perguruan tinggi guna pemantapan jati diri bangsa dalam rangka pembangunan nasional.

## 3. Ruang lingkup dan Sistematika

- a. **Ruang lingkup.** Pembahasan tentang modernisasi perguruan tinggi guna pemantapan jati diri bangsa dalam rangka pembangunan nasional akan dititik beratkan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan, dan Budaya. Adapun aspek lain yang berkaitan dengan kepentingan modernisasi perguruan tinggi, akan ditempatkan sebagai sub-aspek atau upaya yang akan ditempuh.
- b. **Sistematika.** Penulisan kertas karya kelompok ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan serta pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul kertas karya acuan.

**BAB II : LANDASAN PEMIKIRAN**

Menguraikan tentang paradigma nasional yaitu Pancasila sebagai landasan Idiil, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai landasan Visional, Ketahanan Nasional sebagai landasan Konsepsional, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang terkait, serta landasan teori dan tinjauan pustaka.

**BAB III : KONDISI MODERNISASI PERGURUAN TINGGI TERHADAP JATI DIRI BANGSA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL SAAT INI**

Berisikan penjelasan mengenai kondisi modernisasi perguruan tinggi terhadap jati diri bangsa dan pembangunan nasional saat ini; implikasinya terhadap jati diri bangsa dan pembangunan nasional serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini.

**BAB IV : PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

Menguraikan tentang pengaruh yang ditimbulkan dengan berkembangnya lingkungan global (internasional), lingkungan regional dan lingkungan nasional, yang meliputi aspek Asta Gatra disertai peluang dan kendala yang melingkupi modernisasi perguruan tinggi guna pemantapan jati diri bangsa dalam rangka pembangunan nasional.

**BAB V : KONDISI MODERNISASI PERGURUAN TINGGI YANG DAPAT MEMANTAPKAN JATI DIRI BANGSA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Dalam bab ini akan dielaborasi mengenai korelasi antara modernisasi perguruan tinggi dengan jati diri bangsa; pengaruh jati

diri bangsa terhadap pembangunan nasional; kondisi modernisasi yang diharapkan serta indikator keberhasilan.

## **BAB VI : KONSEPSI MODERNISASI PERGURUAN TINGGI YANG MAMPU MEMANTAPKAN JATI DIRI BANGSA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Menguraikan tentang kebijakan yang akan dikeluarkan, strategi yang dapat dijalankan dan upaya-upaya dalam menetapkan solusi permasalahan terkait modernisasi perguruan tinggi guna pemantapan jati diri bangsa dalam rangka pembangunan nasional.

## **BAB VII : PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil kajian dari penulisan Kertas Karya Perorangan, disertai pemberian saran-saran sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi pimpinan dan para pengambil kebijakan untuk memantapkan modernisasi perguruan tinggi guna pemantapan jati diri bangsa dalam rangka pembangunan nasional.

### **4. Metode dan Pendekatan**

Metodologi yang dipakai dalam taskap ini, adalah: 1) Deskriptif Analysis, 2) Studi Kasus, dan 3) Expert Opinion. Penggunaan setiap metodologi, disesuaikan dengan tema yang dibahas. Oleh karena itu, dalam mengupas suatu pokok pikiran, dapat dipergunakan pendekatan explanatory, confirmatory maupun exploratory dengan pisau analisis ketahanan nasional yang melihat suatu persoalan secara komprehensif dan integral dari keseluruhan sudut pandang Astagatra.

### **5. Pengertian**

**a. Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar



peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas).

**b. Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas).

**c. Pendidikan nonformal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas).

**d. Pendidikan informal** adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas).

**e. Pendidikan tinggi** adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah (PP No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi). Pendidikan tinggi juga didefinisikan sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan).

**f. Perguruan tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi (PP No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi).

**g. Sivitas akademika** adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada PT (PP No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi).

**h. Modernisasi** adalah suatu transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya (J.W. Schoorl<sup>1</sup>). Modernisasi juga dapat didefinisikan sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan jaman dan konstelasi dunia sekarang (Koentjaraningrat, 1993).

**i. Universitas** adalah perguruan tinggi (PT) yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi (PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan).

**j. Pemantapan** yaitu suatu upaya untuk memperkokoh/memperkuat dari keadaan sebelumnya atau proses, cara, perbuatan menjadikan stabil ([www.artikata.com](http://www.artikata.com)).

**k. Jatidiri Bangsa** terdiri dari dua kata, yaitu Jatidiri atau Identitas dan Bangsa atau Nasional. Jatidiri Bangsa dapat juga berarti Identitas Nasional. Oleh karena itu, jatidiri bangsa/identitas nasional kita adalah Pancasila sebagai dasar falsafah negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan Sang merah putih sebagai bendera negara (Identitas Nasional, [www.masbied.com](http://www.masbied.com))

---

<sup>1</sup> Sociologie der modernisering : een inleiding in de sociologie der niet-westerse volken, Deventer : Van Loghum Slaterus, 1974.

**l. Budaya Perguruan Tinggi** adalah budaya yang merefleksikan perilaku sivitas akademika yang menjunjung tinggi kebebasan mimbar dan kebebasan akademik.

**m. Pembangunan Nasional** adalah upaya seluruh bangsa Indonesia dalam mengejar cita-cita nasional dan tujuan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembangunan Nasional pada dasarnya adalah pembangunan oleh, dari dan untuk rakyat, pelaksanaannya meliputi semua aspek kehidupan bangsa secara merata di seluruh tanah air (Modul SISMENNAS PPRA XLVI/2011). Pembangunan Nasional juga didefinisikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. (UU No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025)



TANHANA DHARMMA MANGRVA

## **BAB II**

### **LANDASAN PEMIKIRAN**

#### **6. Umum**

Bab ini membahas tentang landasan pemikiran yang dipergunakan dalam penulisan yang meliputi paradigma nasional, peraturan perundang-undangan, landasan teori yang dipergunakan dan tinjauan pustaka terkait judul taskap. Maksud dari landasan pemikiran ini adalah untuk memberikan garis logika yang kokoh (*Line of reasoning*) dan pandangan yang komprehensif dan integral dari sisi teori maupun dari sudut pandang Ketahanan Nasional (Tannas) terhadap variabel-variabel dalam judul Taskap. Diharapkan dengan landasan pemikiran yang kokoh, maka dapat dikembangkan konsepsi yang utuh, komprehensif dan integral.

#### **7. Paradigma Nasional**

##### **a. Pancasila Sebagai Landasan Idiil**

Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang telah ada jauh sebelum Negara Republik Indonesia (NRI) berdiri. Oleh karena itu Pancasila memiliki makna yang luas dan mendalam dalam kehidupan bangsa Indonesia dalam kedudukan dan fungsinya<sup>2</sup> sebagai: (1) pandangan hidup, (2) dasar negara, dan (3) ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan cita-cita bangsa yang dapat membimbing ke arah tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, Pancasila juga merupakan pedoman dan pegangan bangsa dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna, bahwa Pancasila merupakan suatu dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan harus diturunkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila atau dapat diartikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber

---

<sup>2</sup> Kaelan 2010, Pendidikan Pancasila, ed. Ke-9, Penerbit Paradigma, Yogyakarta.

hukum Indonesia. Pancasila sebagai ideologi, memiliki makna sebagai cita-cita yang harus diperjuangkan. Pancasila, sebagai ideologi, tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka (Kaelan, 2010). Oleh karena itu, Pancasila dapat menjadi penangkal dari pengaruh ideologi lain, seperti liberalisme, materialisme, pragmatisme, individualisme, transaksionalisme dan ideologi lain dalam arus globalisasi dunia.

Dalam kaitannya dengan modernisasi Perguruan Tinggi (PT) guna pemantapan jati diri bangsa, maka Pancasila dapat dipergunakan sebagai acuan utama. Hal ini karena modernisasi di PT bukanlah modernisasi yang bebas nilai (*value free*) yang hanya mengedepankan faktor-faktor keras (*hard factors*) saja, termasuk mengesampingkan nilai-nilai lokal dan nasional, karena tidak sejalan dengan sila-sila Pancasila. Lebih jauh, modernisasi juga bukan merupakan upaya *westernisasi* atau modernisasi yang mencontoh gaya barat mulai dari bentuk, perilaku, cara hidup, cara berpakaian (*copycat*) dan mengabaikan keberadaan nilai lokal dan nasional. Pandangan ini bertentangan dengan semua sila dalam Pancasila. Yang diharapkan adalah modernisasi yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai-nilai pada semua sila secara utuh dalam satu kesatuan. Secara umum, modernisasi di PT ditujukan untuk membentuk generasi muda masa depan (*human capital*) yang memiliki jati diri bangsa Indonesia, juga memiliki kemampuan intelektualitas setara dengan bangsa-bangsa maju.

#### **b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sebagai Landasan Konstitusional**

UUD NRI 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menjadi landasan konstitusional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini, UUD NRI 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali dalam waktu sekitar 3 tahun sejak 1999 hingga 2002. Amandemen

tersebut, telah merubah proses berbangsa dan bernegara dengan cukup signifikan, dan berdampak positif maupun negatif.

Salah satu dampak positif amandemen adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, bidang pendidikan memperoleh perhatian serius, khususnya dalam pendanaannya (lihat Bab XIII, pasal 31) yaitu:

Ayat 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran dan pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Ayat 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Pada ayat 5) ini sangat terkait dengan upaya modernisasi PT. Selain itu, pada pasal 32 sangat terkait dengan pematapan jati diri bangsa, meliputi:

Ayat 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ayat 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

### **c. Wawasan Nusantara Sebagai Landasan Visional**

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia yang memiliki potensi SKA, baik di darat maupun di laut. Umumnya, SKA tersebut bersifat tak terbarukan (*non-renewable*), sehingga merupakan SKA yang habis pakai. Selain itu, kondisi demografi Indonesia yang merupakan negara terbesar keempat di dunia yang memiliki jumlah penduduk (Tahun 2010) sekitar 237,6 juta jiwa<sup>3</sup>. Indonesia juga terdiri dari beragam suku yang memiliki ratusan budaya dan bahasa lokal.

---

<sup>3</sup> Sugiri L., 2011, Pengelolaan Kependudukan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional, Kuliah PPRA 46/2011, Lemhannas RI.

Keberagaman (multikultur) Indonesia merupakan suatu perekat bangsa, namun keserasian dalam keberagaman sangat diperlukan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleran antar elemen bangsa dengan semangat persatuan dan kesatuan. Wawasan nusantara (Wasantara) sebagai landasan visional merupakan suatu cara memandang negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan sebagai suatu kesatuan utuh dan menyeluruh dan tidak melihat laut sebagai pemisah antar wilayah, melainkan laut sebagai bagian wilayah berdaulat yang sama dengan daratan. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keamanan yang diperjuangkan haruslah merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kaitannya dengan modernisasi PT, maka setiap PT di Indonesia selayaknya memiliki kesetaraan kualitas tanpa mengabaikan, namun tetap mempertahankan keunikan lokalnya. Hal ini didasari realita, bahwa faktor geografi selayaknya tidak menjadi kendala lagi karena telah adanya teknologi informasi yang mampu mengatasi kendala tersebut.

Dari uraian-uraian diatas tampak bahwa upaya untuk melakukan modernisasi PT di seluruh Nusantara memiliki dasar landasan visional.

#### **d. Ketahanan Nasional Sebagai Landasan Konseptual**

Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia, menunjukkan kondisi dinamis bangsa Indonesia pada aspek kehidupan nasional (Astagatra) yang meliputi: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Pancagatra), dalam pengelolaan potensi alamiah (Trigatra), yakni: geografi, demografi dan SKA untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu mencapai kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*) yang berkeadilan. Namun demikian, kesejahteraan dan keamanan tersebut, memerlukan pengaturan agar seimbang, serasi, dan selaras dengan seluruh aspek astagatra secara utuh, menyeluruh dan terpadu



berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Wasantara. Inilah konsepsi Tannas yang berintikan pada peningkatan keuletan dan ketangguhan bangsa.

Dalam kaitannya dengan modernisasi PT guna pemantapan jati diri bangsa, maka modernisasi harus dimaknai dalam hubungannya dengan Tannas. Karena itu, konsepsi ini diarahkan untuk menghasilkan luaran (*output*), baik langsung maupun tidak langsung, berupa pemantapan jati diri bangsa yang akan berdampak pada pembangunan nasional dan ketangguhan Tannas pada seluruh aspek pancagatra.

Dari uraian tentang Tannas tampak bahwa upaya untuk melakukan modernisasi PT mempunyai landasan konsepsional.

## **8. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan penting yang mendasari upaya Modernisasi Perguruan Tinggi Guna Pemantapan Jati Diri Bangsa Dalam Rangka Pembangunan Nasional.

### **a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)**

UU Sisdiknas merupakan undang-undang yang mengatur sistim pendidikan nasional Indonesia. Definisi pendidikan menurut UU Sisdiknas dinyatakan pada pasal 1 butir (1) sub bab 5.a. Definisi tersebut memberikan pengertian, bahwa peserta didik harus dapat mengembangkan potensi dirinya secara utuh tanpa menanggalkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

UU sisdiknas, juga mengatur tentang prinsip otonomi dalam PT seperti tertera pada pasal 24 ayat (2), pasal 50 ayat (6), dan pasal 51 ayat (2). Prinsip otonomi/desentralisasi PT inilah yang merupakan salah satu ciri dari modernisasi PT yang menjadi variabel pertama dalam judul Taskap ini.

**b. Peraturan Pemerintah (PP) no. 60 th 1999 ttg Pendidikan Tinggi**

PP ini mengatur secara komprehensif tentang pendidikan tinggi, baik pendidikan akademik maupun pendidikan profesional, yang diselenggarakan oleh PT. PP ini, juga mengatur tentang sistim manajemen PT (*university government/governance*), tugas dan tanggung jawab organisasi PT, pelaksanaan/monitoring/evaluasi pendidikan, kerjasama, dan lain-lain. Dalam hal tugas dan tanggung jawab manajemen PT, maka pimpinan PT (Rektor) merupakan penanggung jawab utama dalam PT. Secara umum, ada dua tanggung jawab utama yang harus diemban pimpinan PT yaitu (1) Bidang Akademik dan (2) Bidang Non-Akademik (Administrasi dan Keuangan). Dalam bidang akademik, pimpinan PT bertanggung jawab kepada Menteri (Pasal 29 ayat 2a), sedangkan di bidang administrasi dan keuangan, pimpinan PT yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab kepada Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah lain, sedangkan pimpinan PT non pemerintah bertanggung jawab kepada badan yang menyelenggarakan PT yang bersangkutan (Pasal 29 ayat 2b).

**c. PP no 66 th 2010 ttg pengganti PP no. 17 th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan**

PP ini mengatur secara umum tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah agar pendidikan dapat berjalan sesuai tujuan pendidikan nasional. Di dalam PP ini, diatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah pusat maupun daerah, satuan pendidikan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

#### **d. Peraturan Presiden No. 81 th 2010 Tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025***

Peraturan Presiden (Perpres) tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* merupakan suatu keseriusan pemerintah untuk mencapai praktek terbaik (*best practice*) sistim birokrasi, yaitu membentuk pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya ini dilakukan melalui konsep dan pendekatan yang terstruktur dengan berlandaskan asas profesionalitas dan integritas yang tinggi dengan visi terwujudnya pemerintahan kelas dunia (*world class government*). Konsep ini, diharapkan dapat mendorong perubahan *mind set* dan *culture set* pada birokrasi, sehingga tercipta budaya yang profesional, produktif dan akuntabel.

Oleh karena itu, Perpres tentang reformasi birokrasi ini sangat selaras, serasi dan mendukung serta mendorong semangat modernisasi PT demi terwujudnya PT yang berkualitas dan berdaya saing tinggi tanpa meninggalkan jati diri bangsa Indonesia.

### **9. Landasan Teori**

Pemikiran terkait modernisasi PT dilandaskan pada teori umum tentang pengembangan (*development*) yang meliputi Teori Modernisasi, Teori Dependensi, dan Teori Sistim Dunia:

#### **Teori Modernisasi (*Modernization Theory*):**

Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan peradaban (*civilization*). Sejarah modernisasi dapat dilihat pada masa revolusi Industri di Eropa barat, dimana modernisasi dimaknai sebagai upaya mekanisasi pekerjaan melalui pemanfaatan *science*. Masa setelah perang dunia II, modernisasi dimaknai sebagai pembangunan ekonomi dan perubahan sosial. Saat ini modernisasi, dalam sudut pandang barat, merupakan paradigma globalisasi<sup>4</sup> yang dipengaruhi oleh intensifikasi teknologi

---

<sup>4</sup> Dirlik A, \_\_, Reconfiguring Modernity: From Modernization to Globalization.

informasi yang mencakup keseluruhan aspek modernitas: ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun ideologi. Samuel Huntington (1971)<sup>5</sup> menekankan, bahwa modernisasi adalah proses yang kompleks, global, membutuhkan waktu yang panjang, melibatkan beberapa fase, tidak dapat dikembalikan, dan progresif dalam mentransformasikan masyarakat tradisional menjadi modern. Huntington (1971) menyatakan, bahwa penggerak modernisasi adalah demokrasi dan perkembangan ekonomi. Modernisasi adalah perkembangan peradaban (*civilization*) yang menekankan transisi dari masyarakat tradisional berbasis agraris menjadi masyarakat modern berbasis industri<sup>6</sup> dan akan menuju masyarakat berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based society*). Masyarakat modern menurut James Coleman (1960)

*a comparatively high degree of urbanization, widespread literacy, comparatively high per capita income, extensive geographical and social mobility, a relatively high degree of commercialization and industrialization of the economy, an extensive and penetrative network of mass communication media, and in general, by widespread participation and involvement by members of the society in modern social and economic processes*<sup>7</sup>.

Tahapan modernisasi selaras dengan tahapan linear pertumbuhan ekonomi menurut teori Rostow (1960) meliputi tahapan<sup>8</sup> (Lampiran-6):

1. Masyarakat Tradisional: Tahapan yang ditandai oleh perekonomian agraris dan perdagangan model barter. Masyarakat cenderung statis.
2. Persiapan tinggal landas (*take-off*): Dengan karakteristik yang meliputi spesialisasi, produksi barang dan perdagangan. Sarana transportasi yang dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Pada tahap ini investasi dan tabungan mulai tumbuh dengan baik.

---

<sup>5</sup> Samuel P. Huntington, 1971, *Modernization Development and Politics*, in *From Modernization to Globalization*, eds. T. Roberts and A. Hite (London: Blackwell Publishing, Ltd., 1971), 146-147.

<sup>6</sup> Nils Gilman, *Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2003),

<sup>7</sup> Gabriel A. Almond and James S. Coleman, eds., *The Politics of the Developing Areas* (Princeton: Princeton University Press, 1960), 532.

<sup>8</sup> W.W. Rostow. 1960. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge.

3. Tinggal Landas: Pada tahap ini industrialisasi meningkat dan perekonomian bergeser dari pertanian menuju manufaktur.
4. Menuju kedewasaan (*drive to maturity*): Pada tahap ini perekonomian mulai terdiversifikasi menuju bidang-bidang yang baru, teknologi diadopsi secara meluas.
5. Periode konsumsi masal (*period of mass consumption*): Pada tahap ini perekonomian menggerakkan produksi masal dan bidang jasa menjadi semakin dominan. Surplus ekonomi tidak lagi digunakan untuk investasi, tetapi digunakan untuk kesejahteraan sosial.

Dalam kenyataannya dengan modernisasi terjadi banyak kesenjangan/disparitas karena berbagai faktor diantaranya geografis, ekonomi, pendidikan, budaya dan sebagainya.

### **Teori Dependensi (*Dependency Theory*):**

Teori ini menyatakan, bahwa modernisasi telah gagal dalam menyikapi hubungan yang benar antara bagian dunia yang maju dan bagian dunia lain yang miskin. Teori ini juga menyatakan, bahwa modernisasi telah mendistorsikan kebenaran tentang motif dari negara-negara maju (khususnya) terhadap negara-negara bekas jajahan dan koloninya. Modernisasi justru menyebabkan negara-negara di dunia ketiga mengalami kemiskinan dan kemunduran. Kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya (*the development of under-development*).

Andre Gunder Frank (1967)<sup>9</sup>, pencetus teori Dependensi, menyatakan, bahwa negara-negara kaya dan makmur membutuhkan negara-negara pinggiran, yaitu negara-negara sedang berkembang dan negara-negara miskin untuk mempertahankan kemakmurannya. Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan yang terjadi pada negara-negara pinggiran bukan karena negara tersebut tidak terintegrasi dengan sistim dunia, tetapi karena mereka dikondisikan terbelakang dan tetap miskin. Karena itu, keterbelakangan justru merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh

---

<sup>9</sup> Frank AG (1967). Crisis in the Third World. New York. Holmes and Meier.

negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Hal ini terjadi karena mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara maju; sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional dan ekonomi global.

### **Teori Sistem Dunia (*World System Theory*):**

Teori ini dipopulerkan oleh Immanuel Wallerstein (1974)<sup>10</sup> dimana kata sistem dunia (*world system*) yang dimaksudkan dalam tulisannya adalah ekonomi dunia (*world economy*). Definisi sistem dunia menurut Wallerstein adalah:

*"multicultural territorial division of labor in which the production and exchange of basic goods and raw materials is necessary for the everyday life of its inhabitants".*

Teori ini berbasis kapitalisme dimana institusi bisnis berupaya mengejar akumulasi kapital dan kekuasaan dengan pendekatan geopolitik dunia. Teori ini mengusulkan sistem "buruh internasional" dan membuat hirarki kekuasaan dunia menjadi (1) Negara-negara inti (*core countries*) yang sangat "*powerful*" dan kaya, seperti negara-negara barat (*western*) yang akan mengeksploitasi negara miskin melalui teknologi, (2) Negara-negara semi-pinggiran (*semi-periphery countries*), yaitu negara berkembang seperti Brasil, Meksiko, Afrika Selatan, dan mungkin Indonesia, dan (3) Negara-negara pinggiran (*periphery countries*) yang miskin dan hanya dipakai sebagai sumber penghasil bahan baku, seperti: Burundi, Zambia, Namibia, dan negara miskin lainnya<sup>11</sup>. Secara subjektif dapat dilihat, bahwa teori ini sedang berjalan dalam sistem ekonomi dunia saat ini.

## **10. Tinjauan Pustaka**

Rujukan yang dapat dipakai dalam memahami modernisasi PT di Indonesia belum terintegrasi. Namun demikian, embrio modernisasi PT di

<sup>10</sup> Wallerstein, Immanuel. 1974. *The modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press.

<sup>11</sup> <http://tendaimazingaizo-tee.blogspot.com/2010/09/modernization-theory-dependencytheory.html>

Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), dengan adanya konsep "reformasi pendidikan tinggi di Indonesia" yang dioperasionalkan dalam *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) 2003-2010 dan digunakan sebagai dokumen pengganti Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005 (KPPTJP 1996-2005). HELTS 2003-2010 berisi garis besar kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Selanjutnya HELTS 2003-2010 menjadi acuan pengembangan PT di Indonesia hingga tahun 2010. Tujuan HELTS 2003-2010 adalah meningkatkan daya saing bangsa (*competitiveness*) yang mengutamakan mutu melalui pendidikan tinggi dengan kebijakan dasar: (1) Daya saing bangsa dengan isu strategis, meliputi: integrasi, globalisasi, pendidikan dan penelitian, keragaman misi, dan akses pada ilmu pengetahuan; (2) Otonomi dan desentralisasi dengan isu strategis, meliputi: pergeseran peran PT, dan tanggung jawab sosial; dan (3) Kesehatan Organisasi dengan isu strategis, meliputi: pembangunan kapasitas institusi, tata pamong, finansial, SDM, dan *quality assurance*.

Setelah tahun 2010 kebijakan pendidikan tinggi diarahkan pada "transformasi pendidikan tinggi" yang merujuk pada arah dan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 berlandaskan pada visi 2014, yaitu "Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif". Untuk mewujudkannya, ditetapkan misi yang dikenal dengan Misi-5K: meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan kepastian/keterjaminan mendapatkan layanan pendidikan.

Kebijakan Kemendiknas 2010-2014 adalah mengacu pada tahapan pengembangan pendidikan nasional dengan visi 2025, yaitu "**membentuk Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif**" yang dibagi dalam empat periode: Periode 1 (2005-2009) dengan tema Peningkatan Kapasitas & Modernisasi, Periode 2 (2010-2014) dengan tema Penguatan Pelayanan,

Periode 3 (2015 -2019) dengan tema Daya Saing Regional, dan Periode 4 (2020-2024) dengan tema Daya Saing Internasional. Kebijakan kemendiknas 2010-2014 ini mengacu pada RPJPN 2005-2025 disusun berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lampiran-3).

RPJPN 2005–2025 diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yaitu cita cita yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Visi pembangunan nasional 2005-2025 adalah:

**“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”**

Misi pembangunan nasional 2005-2025 terdiri dari 8, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila,
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum,
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu,
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan,
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari,
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional,
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Keseluruhan misi, khususnya misi no. 1, 2, berkaitan erat dengan modernisasi PT guna pemantapan jati diri bangsa.

Dari tinjauan pustaka ini, belum terlihat, bahwa modernisasi telah dijadikan suatu platform khusus dari strategi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Namun embrio maupun upaya-upaya dari modernisasi PT telah banyak dijalankan dan diterapkan sebelumnya.





TANHANA DHARMMA MANGRVA

### **BAB III**

## **KONDISI MODERNISASI PERGURUAN TINGGI TERHADAP JATI DIRI BANGSA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL SAAT INI**

#### **11. Umum**

Perguruan Tinggi (PT) merupakan harapan masyarakat dan bangsa, tidak hanya untuk mempersiapkan masa depan generasi muda, namun juga memiliki peran strategis dalam menyiapkan dan menyediakan sumber daya kepemimpinan nasional<sup>12</sup> yang dapat membawa bangsa Indonesia mewujudkan cita-citanya. Untuk itu, PT dituntut mampu meningkatkan kualitas daya saing, baik akademik maupun non-akademik. Selain itu, PT juga diharapkan dapat menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme (*soft knowledge*) melalui pendidikan karakter.

#### **12. Kondisi Modernisasi Perguruan Tinggi saat ini**

Indonesia sejak masa orde baru hingga saat ini, telah memasuki fase industrialisasi, yang ditandai dengan kemampuan Indonesia mengembangkan industri pesawat terbang dan industri strategis maupun non-strategis lain. Pada masa orde baru, keunggulan komparatif (*comparative advantage*), yaitu biaya sumber daya manusia yang murah, telah menjadi daya tarik investasi industri di Indonesia (*industrial economy*). Namun demikian, sejak reformasi, telah terjadi stagnasi pertumbuhan industri, bahkan terjadi deindustrialisasi di beberapa bidang dengan indikator berpindahnya operasi beberapa industri multinasional keluar dari Indonesia dengan alasan biaya sumber daya manusia di negara lain jauh lebih kompetitif dibanding Indonesia (*offshoring*). Hal ini semakin berat karena adanya perdagangan bebas, baik *Asian Free Trade Agreement* (AFTA) maupun *World Trade Organization* (WTO) yang dapat mengancam daya saing tenaga kerja Indonesia<sup>13</sup>. Salah satu dampak deindustrialisasi ini

---

<sup>12</sup> \_\_, 2003, Peran Strategis Perguruan Tinggi, Media Indonesia, hlm. 26

<sup>13</sup> Ari K., 2003, Deindustrialisasi, Pergeseran Industri dan Daya Saing, Media Indonesia, hlm. 1

adalah *brain drain*, yaitu keluarnya SDM unggul dari Indonesia untuk bekerja di negara lain. Dampak lain dari deindustrialisasi ini adalah menurunnya jumlah mahasiswa bidang teknik di PT karena menurunnya lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Selain itu, perkembangan ekonomi global saat ini menunjukkan adanya pergeseran menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based economy*) yang mengedepankan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), seperti: industri teknologi informasi, industri kreatif (*creative industry*), industri jasa (*service industry*), perdagangan (*trade*), dan lainnya. Sebagai contoh, industri di negara ASEAN, seperti: Philipina, Thailand, dan Malaysia telah bergeser ke produk-produk yang memiliki tingkat teknologi lebih kompleks. Bahkan, Singapura dan Taiwan telah masuk pada industri berteknologi tinggi<sup>14</sup>.

Oleh karena itu, agar dapat bersaing pada perekonomian regional dan internasional dan menarik minat industri berteknologi maju (kembali) berinvestasi di Indonesia, maka harus tersedia SDM yang memiliki daya saing yang tinggi (*world class*) dengan jumlah yang memadai. Hal ini dapat dipenuhi, apabila PT juga memiliki daya saing tingkat dunia (*world class university*)<sup>15</sup> agar dapat menciptakan lulusan berdaya saing tinggi<sup>16,17</sup>. Karena itu, hal ini dapat dilakukan melalui modernisasi PT sebagai kesiapan Indonesia memasuki fase ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

Selama kurang dari 10 tahun, kenaikan jumlah PT di Indonesia meningkat drastis, namun demikian tidak diimbangi peningkatan kualitas. Pada tahun 2003/2004 tercatat jumlah PT adalah 2.317<sup>18</sup> dan pada tahun 2010/2011 diperkirakan telah mencapai 3.100<sup>19</sup>. Di sisi lain, jumlah PT yang masuk dalam kelompok PT berdaya saing di Asia maupun Internasional, tidak berubah signifikan. Peningkatan jumlah PT ini justru

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> \_\_, 2005, PT Harus Jadi Kelas Dunia, Republika, hlm. 20

<sup>16</sup> \_\_, 2003, Lulusan PT Harus Berwawasan Dunia, Harian Terbit, hlm. 8

<sup>17</sup> \_\_, 2005, Lulusan PT harus punya daya saing tingkat dunia, Harian Terbit, hlm. 4

<sup>18</sup> \_\_, \_\_, Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010, DIKTI, hlm. 24

<sup>19</sup> \_\_, 2010, Jumlah PTS naik pesat, Kompas.

menimbulkan skeptisme dari sisi kualitas<sup>20,21</sup>. Upaya peningkatan telah dilakukan beberapa PT melalui upaya terobosan dalam meningkatkan daya saing, antara lain: kerja sama dengan PT asing<sup>22</sup>, membuka kelas Internasional<sup>23</sup>, maupun pendidikan bergelar ganda (*double degree*)<sup>24</sup>. Upaya yang dilakukan ini masih normatif, sehingga belum berdampak signifikan pada daya saing PT maupun pada masyarakat. Upaya ini, tentu akan bermuara pada ketahanan nasional. Oleh karena itu, untuk memahami kondisi modernisasi PT dapat dilihat dari perspektif ketahanan nasional, yaitu Pancagatra.

#### **a. Ideologi**

Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Sebagai satu-satunya ideologi, maka PT juga menganut ideologi Pancasila, walaupun tetap memiliki perbedaan kekhasan satu dengan lainnya. Namun, aktualisasi nilai Pancasila ini belum diwujudkan secara nyata oleh sivitas akademika. Masih banyak tindakan sivitas akademika yang belum mencerminkan ideologi Pancasila baik, dari sisi lembaga maupun individu. Bahkan, sepertinya PT telah mengalami kemunduran karakter dan etika yang sesuai dengan jati diri bangsa<sup>25,26</sup>. PT ternyata lebih banyak mengedepankan aspek kognitif, berupa pengetahuan, namun belum maksimal dalam meningkatkan karakter dan etika sebagai aspek afektif. Bernadette (2003) menegaskan tentang dua tantangan besar PT, yaitu berkaitan dengan: (1) globalisasi dan teknologi informasi, serta (2) situasi dan kondisi bangsa dan negara. Tantangan kedua sangat relevan dengan karakter, etika, dan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saat ini pemerintah menggalakkan

---

<sup>20</sup> \_\_, 2004, Mengukur Kualitas Perguruan Tinggi, Suara Pembaruan, hlm. 18

<sup>21</sup> \_\_, 2008, Mendorong Mutu Perguruan Tinggi Indonesia, Suara Pembaruan, hlm. 18

<sup>22</sup> \_\_, 2004, Menggandeng Pergurua Tinggi di Luar Negeri, Suara Pembaruan, hlm. 13

<sup>23</sup> Ali K., 2006, Internasionalisasi Perguruan Tinggi, Suara Pembaruan, hlm. 9

<sup>24</sup> \_\_, 2006, Gelar Ganda diajar 18 Profesor dan 18 Doktor, Indo Pos, hlm. 17

<sup>25</sup> Stevani E., 2006, Perguruan Abaikan Karakter Kemanusiaan, Sinar Harapan.

<sup>26</sup> \_\_, 2006, Mendiknas: PT Abaikan Pembangunan Karakter, Suara Pembaharuan, hlm. 5

pendidikan karakter di PT melalui workshop<sup>27</sup>, dan hibah pendidikan karakter<sup>28</sup>. Pemerintah, melalui DIKTI, juga telah mencanangkan dalam deklarasi pimpinan PT untuk mengawal dengan sungguh-sungguh perwujudan empat pilar kebangsaan yaitu: (1) Pancasila, (2) UUD NRI 1945, (3) NKRI, dan (4) Bhinneka Tunggal Ika<sup>29</sup>. Hal ini menunjukkan pemerintah telah melihat pentingnya ideologi dalam PT.

Di sisi lain, manajemen PT dikritisi karena dianggap liberal, sehingga menyebabkan biaya pendidikan menjadi mahal<sup>30</sup>.

### **b. Politik**

Azas demokratisasi dan transparansi serta akuntabilitas dalam sistim pemerintahan (*government*) dan tata kelola (*governance*) dapat dipakai sebagai ukuran gatra politik di PT. Dalam praktek di PT, hal ini nampak pada pemilihan pimpinan dan pejabat PT. Umumnya, PT telah menerapkan sistim rekrutmen pimpinan dengan dasar demokrasi yang baik. Walaupun, pada beberapa PTS, proses pergantian pimpinan masih diwarnai kericuhan. Seperti perselisihan antara Rektor dengan pihak yayasan yang umumnya dipicu karena persoalan keuangan dan kewenangan. Dampak dari sistim tata kelola PT yang tidak kondusif ini, dapat berimbas pada peserta didik dan keseluruhan proses belajar mengajar (PBM).

### **c. Ekonomi**

Saat ini, PT banyak dikritisi karena mahalnya biaya pendidikan dan disinyalir sebagai akibat kecenderungan komersialisasi pendidikan<sup>31</sup>. Orientasi PT, khususnya Perguruan Tinggi Swasta

---

<sup>27</sup> DIKTI, 2011, Workshop "Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter di Lingkungan Perguruan Tinggi".

<sup>28</sup> DIKTI, 2011, Hibah Penyusunan Buku Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi.

<sup>29</sup> DIKTI, 2011, Deklarasi PTN dan Kopertis Untuk Mengawal Perwujudan Empat Pilar Kebangsaan.

<sup>30</sup> \_\_\_\_, 2004, BHMN Bikin Perguruan Tinggi Berorientasi Keuntungan, Suara Pembaruan, hlm. 11

<sup>31</sup> Eriyanti, 2006, Perguruan Tinggi Semakin Komersial, Pikiran Rakyat, hlm. 1

(PTS), banyak yang komersial<sup>32</sup> (*profit oriented*) dan dilakukan dengan beragam upaya demi meningkatkan jumlah mahasiswa (*student body*). Tidak jarang PTS berani melakukan tindakan melawan hukum, seperti transaksi akademis maupun kelas jauh. Sering inovasi yang dilakukan PTS semata-mata bertujuan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa (aspek komparatif). Tindakan PTS seperti ini, telah menghambat peningkatan kualitas dan daya saing (aspek kompetitif), juga kepercayaan masyarakat pada PT.

Potret buram komersialisasi pendidikan merupakan hubungan dua arah antara masyarakat dan PT. Budaya dalam masyarakat masih melihat gelar akademik sebagai status sosial dan peluang finansial, sedangkan PTS, karena alasan finansial, memanfaatkan peluang tersebut. Hal ini terjadi karena pengelola PTS memiliki cara pandang (*mindset*) yang sempit, yaitu "akuntansi", sehingga pendidikan diartikan sebagai investasi bisnis yang harus mendatangkan profit, padahal PT adalah suatu badan "Non-profit". Komersialisasi ini juga merupakan dampak dari sistem yang menggunakan ijazah sarjana sebagai syarat utama dalam rekrutmen dan promosi.

#### **d. Sosial & Budaya (sosbud)**

PT seharusnya adalah tempat dimana budaya terbaik di dalam masyarakat berada, di PT budaya-budaya terbaik ditumbuhkan dikembangkan<sup>33</sup> dan dilestarikan untuk generasi berikut. Oleh karena itu, PT adalah benteng dari budaya masyarakat serta budaya bangsa dan negara. Hal ini, juga telah dinyatakan secara eksplisit dalam UU Sisdiknas (UU No. 20 tahun 2003 pasal 3).

PT di Indonesia diharapkan mampu mengembangkan peserta didik dalam dimensi yang menyeluruh, yaitu: kognitif/daya cipta, afektif/daya rasa, psikomotorik/daya karya, dan konatif/daya karsa.

---

<sup>32</sup> \_\_\_\_, 2005, Pendidikan Tinggi Lebih Mengejar Keuntungan daripada Mutu, Media Indo., hlm. 24

<sup>33</sup> \_\_\_\_, Refungsionalisasi Perguruan Tinggi, Media Indonesia, hlm. A1

Keempat dimensi ini terkait dengan konsep pembelajaran yang dikenal sebagai taksonomi Bloom, yaitu: (1) *Cognitive (knowledge)*, (2) *Affective (attitude)*, dan (3) *Psychomotor (skills)* (Bloom, 1956). Takson Bloom ini juga selaras dengan konsep UNESCO (1996), yaitu: (1) *Cognitive*/daya cipta adalah *learning to know*, (2) *Affective*/daya rasa adalah *learning to be*, (3) *Psychomotor*/daya karya adalah *learning to do*, dan (4) Konatif adalah *Learning to live together, Learning to work with other*. Prayitno (2009) menyatakan hal yang sama yang dikenal sebagai dimensi kemanusiaan atau Panca Daya, yaitu: (1) daya takwa, (2) daya cipta, (3) daya rasa, (4) daya karsa, dan (5) daya karya. Inti dari konsep pendidikan adalah: (1) *Hard knowledge*, dan (2) *Soft knowledge*. *Hard knowledge* dapat dilihat dari berkembangnya aspek kognitif, yaitu berpikir rasional, logis, dan kritis. *Soft knowledge* terlihat dari berkembangnya aspek afektif, yaitu emosional, pemahaman nilai, karakter, sikap yang akan berdampak pada aspek budaya.

Kelemahan pada *aspek soft knowledge* dapat berdampak serius pada proses pembentukan budaya. Karakter, juga telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia memiliki daya jiwa, yaitu: cipta, karya, dan karsa. Pengembangan manusia seutuhnya adalah pengembangan semua daya secara seimbang. Ki Hajar Dewantara mengatakan, "Pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya". Pentingnya karakter, juga telah disampaikan oleh *founding father* yang dikenal sebagai *Nation State* dan *Nation and Character Building*, meliputi: (1) Membangun negara, (2) Membangun bangsa, dan (3) Membangun karakter. Para pendiri bangsa, juga telah berketetapan hati bahwa, negara, bangsa dan karakter dibangun berdasarkan ideologi Pancasila. Selain itu, banyak tokoh dunia juga menekankan pentingnya pendidikan berkarakter di antaranya:

- **Mahatma Gandhi** mengingatkan tentang tujuh dosa manusia (*The Seven deadly sins*) salah satunya adalah "*knowledge without character*". Ia mengatakan, bahwa ketiadaan karakter dalam pengetahuan sama buruknya dengan ketiadaan pengetahuan itu sendiri.

- **Martin Luther King Jr.** pada tahun 1948 mengingatkan "*we must remember that intelligence is not enough. Intelligence plus character — that is the goal of true education*". Martin Luther King juga telah menekankan, bahwa pendidikan harus berjalan selaras dengan pengembangan karakter.

- **Theodore Roosevelt** menyatakan "*To educate a man in mind and not in morals is to educate a menace to society*". Roosevelt menyatakan, bahwa mendidik seseorang hanya pada pengetahuan saja, tetapi tidak pada moralitas sama saja dengan mendidik sebuah bahaya/ancaman kedalam masyarakat.

- **Li Lanqing (2005)** dalam "*Education for 1.3 Billion*" menyatakan, bahwa tujuan utama reformasi pendidikan di China adalah untuk menjadikan setiap warga China menjadi orang yang berkarakter kuat dan menumbuh kembangkan warga masyarakat yang lebih konstruktif. Tema reformasi pendidikan China dimulai pada awal tahun 1990-an adalah "Pendidikan Karakter". Hal inilah yang membuat China dapat tumbuh sangat pesat pada saat ini.

Namun demikian, untuk membentuk karakter tidaklah mudah karena karakter tidak dapat dibentuk dengan proses pengajaran biasa. Kenneth & Norman (1988) mengatakan "*if you are always confronted with easy life, you don't build character*" yang memiliki makna, bahwa karakter tidak hanya dibentuk melalui pendidikan, tetapi juga dari pengalaman hidup. Lickona (1991) menyatakan tentang apa sebenarnya karakter sebagai berikut:

*"Good character consists of knowing the good, desiring the good, and doing the good—habits of the mind, habits of the heart, and habits of action"*.



Sehingga mendidik karakter adalah mendidik untuk tahu tentang hal "baik", mau melakukannya, dan melaksanakannya, setelah itu menjadikannya sebagai kebiasaan. Untuk itu, diperlukan kemampuan untuk membedakan hal baik dan hal buruk. Jika hal ini dicapai dapat dikatakan, bahwa seseorang telah memiliki karakter.

Saat ini Pemerintah berupaya mengembangkan pendidikan karakter. Sebagai contoh, rapat kerja pimpinan PT (RAKERPIM-PT) kopertis VII tahun 2011 dengan tema "Perguruan Tinggi menjadi kekuatan moral untuk membentuk karakter dan budaya bangsa" merekomendasikan tentang pentingnya pendidikan karakter. Dalam diskusi kelompok, Rakerpim pimpinan PTS memetakan kondisi budaya bangsa dan PTS saat ini. Budaya dimaknai sebagai segala daya cipta, rasa, dan karsa yang diwujudkan dalam bentuk *core value, behavior*, dan artefak. Hasil diskusi menunjukkan, situasi budaya dan karakter peserta didik telah memprihatinkan karena sikap pragmatisme, liberalisme, konsumerisme, intoleransi, individualistis, provokatif, tidak patuh/disiplin, mental menerabas, kurang komitmen, tidak mengenal budaya lokal, dan lainnya<sup>34</sup>. Sumber penyebabnya, antara lain: tidak ada keteladanan pemimpin, pengaruh globalisasi, orientasi pendidikan pada aspek kognitif, rendahnya kompetensi SDM dosen, dan faktor lain. Kondisi ini sesungguhnya dapat dipakai sebagai cermin PT di Indonesia.

#### **e. Hankam**

Dari perspektif Pertahanan, maka peran PT adalah menjadi bagian dari komponen penunjang sistim pertahanan semesta (Sishanta). Ancaman pertahanan telah berubah dari ancaman perang konvensional menjadi perang non-konvensional (*modern*) yang merupakan perang generasi keempat (*Fourth Generation*

---

<sup>34</sup> \_\_, 2011, Surat Edaran Tentang Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa PT kopertis VII, Kopertis 7

*Warfare, 4GW*)<sup>35</sup> yang ditandai dengan bentuk ancaman yang tidak melibatkan unsur negara, namun dengan menggunakan sumber daya seperti insurgensi, network, informasi, media, dsb.

Dalam perspektif keamanan, spektrum ancaman telah bergeser dari simetris menjadi asimetris (*assymetry*), dan non-linear yang merupakan bentuk ancaman non-tradisional yang memainkan peran dalam segala arah/spektrum dan sumber daya, baik langsung maupun tidak langsung dan memiliki bentuk yang fractal. Bentuk-bentuk dari kejahatan asimetri, khususnya *trans-nasional crime*, antara lain: terorisme internasional, pengaruh ideologi, jaringan narkoba internasional, *trafficking, illegal mining, illegal fishing*, dsb. Oleh sebab itu, peran PT sangat penting dalam membekali ideologi, karakter, dan jati diri Pancasila.

Fakta menunjukkan, bahwa salah satu pelaku kasus terorisme adalah alumni sebuah perguruan tinggi ternama di Jawa Barat. Juga, telah banyak terjadi peserta didik dari beberapa PT menjadi bagian dari organisasi terlarang yang menyuburkan ideologi non-Pancasila. Hal ini karena PT lemah dalam menguatkan ideologi Pancasila, nasionalisme dan patriotisme pada peserta didik.

### **13. Implikasi Modernisasi Perguruan Tinggi terhadap Jati Diri Bangsa dan Implikasi Jati Diri Bangsa terhadap Pembangunan Nasional**

Modernisasi merupakan upaya untuk dapat meningkatkan daya saing (*competitiveness*) PT, baik komparatif maupun kompetitif. Daya saing PT merupakan bagian dari daya saing pendidikan secara nasional yang dapat dilihat dari indeks pembangunan pendidikan Indonesia (*Education Development Index, EDI*), dimana pada tahun 2010 Indonesia berada pada urutan 65 dari 128 negara. Data ini menunjukkan pembangunan pendidikan Indonesia masih lemah. Oleh karena itu, modernisasi PT diharapkan dapat

---

<sup>35</sup> William S. L. et al, 1989, *The Changing Face of War: Into the Fourth Generation*, published in the Marine Corps Gazette.

meningkatkan daya saing SDM Indonesia (*Human Capital*), yang saat ini memiliki indeks pengembangan manusia/IPM (*Human Development Index/HDI*) pada tahun 2010 berada pada urutan 108 dari 169 negara.

Upaya modernisasi PT ini sangat selaras dengan RPJPN 2005-2025<sup>36</sup>, terkait pada misi 1 dan 2, yaitu: "**Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila**", dan "**Mewujudkan bangsa yang berdaya saing**"

Namun demikian, implikasi modernisasi PT terhadap jati diri bangsa dan pembangunan nasional memiliki dua dampak, baik yang terukur (*tangible impact*) maupun tidak terukur (*intangibile impact*), yaitu dampak positif, seperti yang diharapkan dan dampak negatif, di luar harapan.

#### **a. Implikasi Modernisasi Perguruan Tinggi terhadap Jati Diri Bangsa**

Implikasi modernisasi PT saat ini secara fisik dalam bentuk sarana dan prasarana (sarpras) akademik dan non-akademik. Saat ini, banyak PT di kota besar telah memiliki sarpras yang modern. Adapun sarpras PT di daerah, khususnya PTS, masih belum memadai. Lebih jauh, modernisasi laboratorium dan sarana penunjang akademik masih belum maksimal. Namun, peningkatan sarpras yang semakin baik, tidak langsung berdampak kenaikan kualitas, daya saing, dan juga jati diri peserta didik secara signifikan. Saat ini, di PT terjadi dekadensi budaya dan karakter peserta didik. Hal ini terlihat dengan maraknya budaya kekerasan dan anarkisme, seperti perkelahian antar mahasiswa<sup>37,38,39</sup>. Dari uraian tersebut diatas, upaya modernisasi PT nampaknya belum berdampak positif, khususnya pada jati diri, budaya, dan karakter. Saat ini, banyak

---

<sup>36</sup> Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

<sup>37</sup> \_\_, 2008, Perkelahian Antar Mahasiswa U\*\*\*lu Kendari Terulang, ANTARA News

<sup>38</sup> \_\_, 2010, Demo Anarkis, Cerminan Tingkat Intelektual Mahasiswa, Korando

<sup>39</sup> \_\_, 2010, Pandangan Anarkisme Persulit Alumnus M\*k\*\*s\*r Peroleh Kerja, ANTARA News

peserta didik berpikiran pragmatis, liberal, mental menerabas, dan berpikir instan yang terlihat dengan maraknya jual beli thesis<sup>40</sup>. Bahkan, perilaku yang sama terjadi pada tenaga pendidik, bahkan guru besar. Banyak kasus pelanggaran hukum, seperti pelanggaran hak cipta (plagiat) yang dilakukan oleh tenaga pendidik<sup>41, 42</sup> dan guru besar<sup>43</sup>. Lebih parah lagi, modernisasi juga telah mulai mengikis jati diri para penyelenggara PT dengan menaikan biaya pendidikan (komersialisasi) dengan beragam alasan yang telah membuat masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi sulit dan tidak mampu mendapatkan haknya untuk belajar di PT<sup>44,45,46,47,48</sup>.

### **b. Implikasi Jati Diri Bangsa terhadap Pembangunan Nasional**

Pembangunan nasional saat ini mengacu pada RPJPN 2005-2025 (lihat sub bab 7.e.). Hasil dari pembangunan nasional dapat dilihat pada indikator global tentang pembangunan, yaitu antara lain<sup>49</sup>: (1) Daya saing global (*Global Competitiveness Index*, GCI) pada tahun (thn) 2010-2011 yaitu 44 dari 139 negara<sup>50</sup>, (2) Indeks inovasi global (*Global Innovation Index*, GII) pada thn 2011 yaitu 27.78 merupakan urutan 99 dari 125 negara<sup>51</sup>, (3) Kualitas pendidikan dasar pada thn 2010-2011 sebesar 55 dari 139 negara, dan (4) Indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*, CPI) thn 2010, yaitu 2.8 merupakan urutan 110 dari 178 negara<sup>52</sup>.

<sup>40</sup> \_\_, 2006, Maraknya Jual-Beli Tesis di Perguruan Tinggi, Koran Tempo, hlm. 1

<sup>41</sup> \_\_, 2010, Mahasiswa Universitas P\*\*\*hy\*\*g\*\* Sesalkan Dosen Plagiat, Tempo Interaktif

<sup>42</sup> \_\_, 2010, Profesor Tersandung Plagiat, Un\*\*\* minta maaf, Viva News

<sup>43</sup> \_\_, 2011, Gelar Guru Besar Universitas \*i\*\* Dicapot, terbukti Plagiat !, Rima News

<sup>44</sup> Endah M., 2004, Biaya Kuliah Mahal, Koran Tempo, hlm. 2

<sup>45</sup> \_\_, 2004, Biaya Pendidikan Semakin Mahal, Fasilitas Tetap Minim, Sinar Harapan, hlm. 7

<sup>46</sup> \_\_, 2008, Biaya Kuliah Mahal: Pendidikan Tinggi makin tidak Terjangkau, Media Indo., hlm. 12

<sup>47</sup> \_\_, 2008, Sedihnya Biaya Kuliah Makin Mahal, Kompas, hlm. 37

<sup>48</sup> \_\_, 2008, Biaya Mahal Untuk Subsidi Silang, Kompas, hlm. 1

<sup>49</sup> \_\_, 2011, Indonesia Dalam Posisi Global, Litbang Kompas.

<sup>50</sup> Klaus, \_\_, 2010, The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum

<sup>51</sup> \_\_, 2009, Global Innovation Index 2009-10, INSEAD

<sup>52</sup> Transparency International

Oleh karena itu, pemantapan jati diri bangsa melalui modernisasi PT dapat berdampak pada pembangunan nasional sesuai sasaran yang hendak dicapai pada misi 1 RPJPN 2005-2025.

#### **14. Permasalahan yang ditemukan**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa pokok permasalahan terkait modernisasi perguruan tinggi guna pemantapan jati diri bangsa dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:

##### **a. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).**

Kualitas SDM merupakan kunci sukses tidak hanya bagi PT, namun juga bagi bangsa Indonesia. Namun demikian, kualitas SDM PT masih lemah yang terukur dari Indeks Pengembangan Manusia, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Daya Saing, dan Indeks Inovasi. Secara umum kualitas SDM, khususnya tenaga pendidik, berdampak pada kualitas peserta didik. Namun, untuk dapat membentuk SDM yang berkualitas dibutuhkan dukungan keuangan dan memerlukan waktu yang panjang. Selain itu, yang terpenting adalah *political will* dari pimpinan PT dan Pemerintah. Saat ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan peningkatan SDM di PT dengan memberikan beasiswa secara luas untuk menempuh pendidikan hingga jenjang doktoral, baik di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN). *Political will* ini, nampaknya belum optimal dalam penyerapannya karena kualitas tenaga pendidik yang rendah, sehingga kesempatan melanjutkan pendidikan bagi tenaga pendidik lebih banyak diserap hanya oleh PT di Pulau Jawa atau PT dengan kualitas yang telah baik.

##### **b. Rendahnya Daya Saing Perguruan Tinggi.**

Daya saing PT Indonesia terlihat masih rendah, hal ini terukur pada indeks pembangunan manusia, indeks pengembangan pendidikan, ataupun ranking perguruan tinggi sesuai standard internasional, seperti: *Quacquarelli Symonds (QS)*, *Times Higher*

*Education (THE), Shanghai Jiao Tong University Institute of Higher Education.* Dalam ranking QS tahun 2011, PT Indonesia yang menempati rangking 500 terbaik di dunia, yaitu: UI (217), UGM (321), ITB (401-450), UNAIR (451-500), dan lain lain. Hal yang sama juga dapat dilihat pada ranking THE tahun 2011. Sedangkan, pada rangking *Shanghai Jiao Tong* tak satupun PT di Indonesia masuk dalam kategori 500 PT terbaik di dunia. Dari sudut pandang daya saing tingkat ASIA, UI merupakan satu-satunya PT yang memiliki rangking tertinggi di Indonesia, namun hanya menempati urutan ke 50 di ASIA (Lampiran-7). Rendahnya daya saing ini diakibatkan oleh dua faktor, yaitu: (1) Faktor akademik, dan (2) Faktor non-akademik. Di antara kedua faktor tersebut, faktor akademik merupakan ukuran utama daya saing PT. Faktor akademik didasarkan pada Tri-Dharma, yaitu: (1) Pendidikan/pengajaran, (2) Penelitian, dan (3) Pengabdian masyarakat. Lebih jauh, disparitas daya saing PT juga besar, khususnya pada PT yang terletak di luar pulau Jawa dan daerah terluar.

### **c. Lemahnya Budaya di Perguruan Tinggi.**

Merujuk pada Undang-undang Sisdiknas pasal 24 ayat (1):

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

Pasal 24 ayat (1) ini dijabarkan secara lebih rinci dalam PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi khususnya BAB VI Pasal 17-20 mengenai Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan. Hal ini dimaknai, bahwa budaya utama PT adalah budaya akademik yang seharusnya dipraktekkan dalam keseharian kehidupan kampus oleh sivitas akademika. Namun demikian, budaya akademik tidak dapat dilepaskan dari budaya masyarakat dan budaya pribadi. Kenyataannya banyak terjadi hal-hal yang tidak mencerminkan budaya akademik oleh sivitas akademika

seperti anarkisme<sup>53</sup>, perkelahian<sup>54</sup>, jual beli thesis<sup>55</sup>, plagiat<sup>56</sup>, dan lain-lain. Budaya akademik juga harus didasarkan pada cara pikir logis (*logical thinking*), rasional (*rational thinking*), sehingga dapat tercipta kekritisian berpikir (*critical thinking*) dan kemampuan berpikir kreatif (*creative thinking*). Selain itu, lemahnya daya saing PT juga diakibatkan oleh lemahnya budaya meneliti (*research culture*) dan menulis yang seharusnya menjadi jiwa akademisi. Hal-hal di atas, merefleksikan lemahnya budaya PT di Indonesia.

#### **d. Belum efektifnya strategi pemerintah untuk Perguruan Tinggi.**

Pemerintah, dalam hal ini Depdiknas dan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), telah memiliki strategi pengembangan PT, seperti: KPPTJP 1996-2005, HELTS 2003-2010 dan Renstra Kemendiknas 2010-2014 (lihat sub bab 10). Namun, melihat kelemahan yang terjadi di PT, maka dimungkinkan, bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif. Sebagai contoh, tenaga pendidik yang berpendidikan S3 belum menunjukkan daya saing yang diharapkan, seperti penelitian yang dikembangkan belum dapat memberikan kontribusi langsung pada persoalan riil dalam masyarakat. Lebih jauh, stimulus yang diberikan Pemerintah berupa sertifikasi dosen, dan tunjangan guru besar belum dapat memberikan kontribusi signifikan pada daya saing PT dibanding PT di LN. Hal lain yang juga mempengaruhi antara lain: sebaran tenaga pendidik di PT terlihat tidak merata dan hubungan kemitraan antara PT, Pemerintah dan Industri yang sangat lemah (*triple helix concept*).

---

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Ibid



TANHANA DHARMMA MANGRVA



## **BAB IV**

### **PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

#### **15. Umum**

Bab ini membahas pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang meliputi global, regional, maupun nasional dalam kaitannya dengan modernisasi PT, baik pada masa lampau, kini, maupun prediksi masa depan. Perkembangan lingkungan strategis global adalah melihat atau mencermati bagaimana negara maju, negara sedang berkembang, dan negara miskin memodernisasikan PTnya. Perkembangan lingkungan strategis regional dilihat pada perkembangan di ASIA dan ASEAN. Bab ini ditutup dengan kemungkinan terkait peluang dan kendala yang mempengaruhi pencapaian sasaran sesuai judul taskap.

#### **16. Pengaruh Perkembangan Global**

Perkembangan global meliputi negara maju, berkembang, dan miskin. Perkembangan ini dilihat dari kondisi masa lalu (jika memungkinkan), masa kini, dan prediksi perubahan pada masa yang akan datang.

##### **a. Modernisasi PT di Negara-Negara Maju**

PT di negara maju pada masa lalu sangat berbeda dengan saat ini karena kompleksitas peradaban pada masa lalu juga berbeda. Dapat dikatakan PT pada masa lalu lebih banyak menggali keilmuan dari sisi filsafatnya. Penelitian lebih banyak dilakukan pada ilmu-ilmu dasar, sehingga daya saing PT dapat dilihat pada keunggulan di bidang-bidang ilmu dasar. Keadaan ini berbeda saat terjadi industrialisasi, dimana PT mulai melakukan penelitian dan pengembangan aplikatif secara lebih progresif.

Saat ini, dengan kompleksitas Ipoleksosbudhankam yang tinggi, khususnya di negara-negara maju, justru membuat PT

menjadi sangat progresif. Sebagai contoh, di beberapa negara atau kontinen yang memiliki PT yang berkualitas dunia (*World Class Quality*), antara lain: USA, UK, Scandinavia, Eropa, Jepang, Singapore, Australia, dan beberapa negara lain yang sedang tumbuh, seperti China dan Korea umumnya memiliki tingkat teknologi yang tinggi (*high-end*). Ciri-ciri umum PT di negara-negara tersebut antara lain: telah berdiri sejak lama (banyak PT telah berdiri sejak abad ke 18), sangat aktif dalam mengembangkan penelitian yang relevan dengan persoalan dunia, melakukan penelitian pada dimensi-dimensi pembangunan. Lebih dari itu, pemerintah pada negara-negara tersebut, secara sangat serius memperhatikan pengembangan bidang Pendidikan. Sebagai contoh di Amerika, presiden OBAMA secara reguler hadir pada wisuda dan memberikan ceramah/pidato di berbagai PT di Amerika. Hal yang sama, juga terjadi di negara-negara dengan PT terbaik di Dunia. Lebih dari itu hubungan antara PT, Pemerintah, dan Industri (*Triple helix strategy*) umumnya sangat baik dan terlihat adanya kepercayaan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena PT menjaga kualitas akademiknya secara serius, sehingga PT mendapat kepercayaan yang tinggi oleh pemangku kepentingan.

Prediksi PT pada masa depan di negara-negara maju diperkirakan akan menuju *frontier* baru dari peradaban (*civilization*) manusia. Karena itu, PT akan memacu aspek-aspek akademik maupun non-akademik sebagai agen perubahan peradaban (*civilization agent of change*). Diprediksi PT di negara maju akan mendorong terwujudnya: (1) *Knowledge based economy*, (2) *Knowledge Society*, (3) *Globalization*, (4) *Borderless Country/ World citizen*, (5) *Democratization*, (6) *Human right*, (7) dan lain-lain karena adanya inovasi (*innovation*) yang sangat cepat pada bidang *Information Communication Technoogy* (ICT), Transportasi, Service dan *creative industry*. Di masa depan, PT membutuhkan perubahan

paradigma dan konsep pengajaran, cara belajar, metode, teknologi pendukung pembelajaran maupun sistim manajemen yang sesuai dengan perubahan jaman. Juga dimungkinkan, belajar di PT tidak lagi perlu waktu yang lama, bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Sebagai contoh, sistim pendidikan tinggi di negara Belanda saat ini telah mengadopsi sistim Bachelor-Master (Bama) dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa akademik (Lihat Lampiran 16)

#### **b. Modernisasi PT di Negara-Negara Berkembang**

Negara-negara berkembang, seperti: ASEAN, Brasil, India, Pakistan, dll memiliki persoalan yang hampir sama, yaitu: rendahnya kualitas SDM, kemiskinan/kesejahteraan, infrastruktur belum memadai, pertumbuhan jumlah penduduk belum terkontrol, kesehatan masyarakat belum terjamin, dan berbagai persoalan lain.

Umumnya, negara-negara berkembang baru merdeka atau mendapat kemerdekaan setelah perang dunia II. Pada masa sebelum kemerdekaan, PT di negara berkembang dibuat untuk kepentingan kolonialisme. Setelah masa kemerdekaan, PT mengalami berbagai persoalan, yaitu: sarana dan prasarana, akses bagi masyarakat, keterbatasan sumber daya pendidik, terbatasnya buku referensi dan jumlah peserta didik yang terbatas. Oleh karena itu, proses belajar mengajar (PBM) tidak efektif dan jumlah *drop out* menjadi sangat tinggi. Akibatnya, PT hanya fokus pada daya saing komparatif, yaitu: peserta didik, tenaga pendidik, referensi, sarana pendukung pendidikan dan kontinuitas PBM.

Saat ini, PT di negara-negara berkembang telah mengalami perubahan dan mulai meletakkan keunggulannya pada daya saing kompetitif. Namun, beberapa tahun lalu, terjadi perkembangan negatif, seperti: maraknya jual beli gelar, ijazah palsu, dan bentuk penipuan akademik lain yang dilakukan karena alasan komersial. Saat ini, terlihat adanya upaya menuju liberalisasi pendidikan,

khususnya PT. Jika hal ini terjadi, maka PT asing dapat beroperasi seperti sebuah entitas bisnis. Sebagai contoh, beberapa PT Inggris dan Australia telah beroperasi di Malaysia. Namun, Indonesia belum mengizinkan liberalisasi Pendidikan.

Dimasa yang akan datang, sebagai implikasi persaingan global, diprediksi PT akan memiliki struktur yang ramping, modern dan mengandalkan pada daya saing kompetitif. Selain itu, PT akan menjadi internasional, multi-kultur, multi-lingua, multi-nasional, PBM yang *modern* dan *long distance*. Diprediksi PT akan mengikuti standarisasi regional maupun internasional, seiring liberalisasi PT yang akan (dipaksakan) diterima di kawasan regional.

### **c. Modernisasi PT di Negara-Negara Miskin**

Dimasa lalu hingga saat ini, kondisi PT di negara-negara miskin masih pada persoalan pemenuhan infrastruktur, dan tenaga pendidik. PT masih diarahkan pada ilmu-ilmu agraris dan teknologi tepat guna demi pemenuhan kebutuhan dasar hidup.

Namun, di masa yang akan datang dapat diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah PT dan peserta didik, selain itu bidang studi akan mulai terdiversifikasi, walaupun agrikultur, teknologi tepat guna, masih mendominasi. Hal ini sesuai dengan keadaan negara-negara miskin yang mengandalkan daya saing pada SKA.

## **17. Pengaruh Perkembangan Regional**

Perkembangan regional meliputi ASIA, ASEAN, dan negara tetangga.

### **a. Modernisasi PT di ASIA**

Kondisi masa lalu PT di ASIA mirip dengan penjelasan sub bab 16.b. Pada masa kini, beberapa PT di Asia telah masuk PT unggulan dunia (*world class*) seperti di Hongkong, Jepang, Taiwan, Singapore, Australia, Korea, China, bahkan India (Lampiran-7). Umumnya, PT di Asia yang berdaya saing tinggi memiliki dukungan kuat pemerintah. Namun, ada juga PT yang masuk kelompok

menengah dan tertinggal dikawasan Asia. Disparitas ini menyebabkan kompetisi PT di Asia cukup tinggi.

Dimasa depan, banyak PT di Asia akan masuk dalam tataran PT ternama dunia. Selain itu, PT ternama di Asia akan melakukan kompatibilitas kualitas dengan PT lain (khususnya di negara maju). Diprediksi akan terjadi paradigma baru dalam bidang pendidikan akibat tingginya daya saing, yaitu pengecilan ukuran yang dibarengi dengan lompatan kualitas penelitian dan pengajaran seiring dengan modernisasi teknologi.

#### **b. Modernisasi PT di ASEAN**

Negara-negara Asean saat ini memiliki disparitas daya saing PT yang cukup besar. Seperti Singapore, yang memiliki daya saing PT tertinggi diantara negara ASEAN, sangat jauh berbeda dengan PT di Timor Leste. Diprediksi PT di ASEAN juga akan meningkat seiring perkembangan ekonomi, dan peparuh globalisasi. Hal ini terlihat dari upaya modernisasi PT di Thailand dan Malaysia yang membuka diri terhadap masuknya *scholar* dari Luar Negeri (LN) untuk memperkuat daya saingnya. Bahkan Malaysia, juga Thailand telah membuka kesempatan bagi mahasiswa asing untuk belajar dan tenaga pendidik dari LN untuk bekerja.

#### **c. Modernisasi PT di Negara Tetangga Non-Asean**

Hal yang sama juga terjadi di negara tetangga Indonesia non-Asean seperti Papua New Guinea. Upaya PT di Papua New Guinea meningkatkan kualitasnya, terlihat dari berbagai skema bantuan pendidikan yang diberikan lembaga donor Internasional. Juga terlihat dari tenaga pendidik mereka yang aktif di fora Internasional berupa penelitian dan publikasi ilmiah pada bidangnya.

Dampak perkembangan ini dapat berdampak positif maupun negatif. Namun, dari aspek kewaspadaan nasional, maka hal ini berpotensi pada ketahanan nasional karena dapat menyebabkan terjadinya *Brain Drain*.

## **18. Pengaruh Perkembangan Nasional**

Perkembangan modernisasi PT dalam konteks perkembangan nasional dapat dilihat dari perspektif Astagatra.

### **a. Geografi**

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17,504. Luas seluruh wilayah Indonesia sekitar 7,9 juta Km<sup>2</sup> dengan wilayah laut seluas 5,8 juta Km<sup>2</sup>. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu: Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan beberapa (gugusan) pulau antara lain Bali, NTB, NTT, dan Maluku. Kondisi topografi Indonesia hampir sama, yaitu: terdiri daratan, gunung, hutan, dan sungai. Indonesia dikelilingi oleh negara tetangga, antara lain: Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, New Guinea, dll. Dengan kondisi geografis ini, Indonesia memiliki keuntungan sekaligus kelemahan. Kelemahan faktor geografis yaitu terjadi disparitas daya saing PT di Jawa dan luar Jawa. Di Jawa, PT memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan PT di luar Jawa. Hal ini terjadi karena PT di Jawa memiliki cukup tenaga pendidik, juga karena infrastruktur yang lebih baik, selain itu banyaknya sentra-sentra ekonomi baik sektor pemerintah maupun swasta ikut berperan dalam kemajuan PT di Jawa. Namun saat ini, kendala geografis selayaknya tidak lagi menjadi hambatan dalam peningkatan daya saing karena telah tersedianya teknologi.

### **b. Demografi**

Populasi penduduk Indonesia tahun 2009 diperkirakan 230 juta<sup>57</sup> jiwa, pada tahun 2010 adalah 237,6 juta jiwa, dan tahun 2011 adalah 238,07 juta jiwa, diperkirakan pada tahun 2031 menjadi sekitar 281 juta jiwa<sup>58</sup>. Prakiraan ini bisa menjadi lebih besar mengingat saat ini program KB tidak berjalan sebaik jaman

---

<sup>57</sup> Klaus S., 2010, The Global Competitiveness Report 2010-2011, © 2010 World Economic Forum

<sup>58</sup> courtesy Kate Snow @ www.bitsofscience.org

orde baru. Penyebaran penduduk Indonesia tahun 2010 juga timpang yaitu sekitar 58% tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,6% dari luas total wilayah Indonesia, 21% di Sumatra, 6% di Kalimantan, 7% di Sulawesi dan 8% adalah sisanya. Dalam aspek etnisitas, Indonesia memiliki heterogenitas etnis yang besar.

### **c. Sumber Kekayaan Alam**

Indonesia (dahulu) adalah negara yang kaya akan hasil tambang takterbarukan (*non-renewable*) seperti mineral, minyak, dan gas bumi. Khusus untuk minyak, Indonesia pernah menjadi negara eksportir minyak melalui OPEC, namun saat ini tidak lagi masuk sebagai negara OPEC. Demikian pula dengan mineral seperti timah, nikel, batu bara dan lainnya. Perlahan tapi pasti, cadangan SKA Indonesia lambat laun akan berkurang. Namun, berkurangnya SKA Indonesia belum dibarengi kemampuan untuk melakukan diversifikasi ekonomi diluar minyak dan mineral. Kondisi ini terjadi karena masih rendahnya kualitas SDM Indonesia. Untuk diketahui, IPM Indonesia berada pada urutan 108<sup>59</sup> dari 169 negara, dengan pendidikan mayoritas (60%) masih berada pada pendidikan dasar. Karena itu, hal ini harus mendapat perhatian serius seiring berkurangnya SKA. PT harus mulai memfokuskan diri pada bidang yang mendorong tumbuhnya *knowledge based economy*.

### **d. Ideologi**

Pancasila telah menjadi ideologi bangsa dan negara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa upaya memperkenalkan ideologi lain masih tetap berlangsung. Globalisasi yang dipercepat dengan hadirnya teknologi informasi menjadi pintu masuk bagi pengaruh ideologi lain, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini penting untuk diperhatikan karena saat ini PT lebih banyak fokus pada bidang-bidang yang bersifat kapital dan tidak cukup memberikan

---

<sup>59</sup> UNDP, 2010, Human Development Index, Release 2010

penguatan pada ideologi. Akibatnya, PT yang seharusnya melestarikan dan menguatkan ideologi Pancasila justru menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya ideologi lain.

**e. Politik**

Sistim politik Indonesia adalah presidensial, dengan kedudukan lembaga negara seperti DPR, MPR, dan lainnya memiliki strata yang sama. Saat ini, pemilihan pimpinan nasional baik pusat maupun daerah, seperti: Presiden, Gubernur, Bupati, maupun Walikota menggunakan sistim pemilihan langsung dengan harapan pemimpin yang dipilih adalah pilihan rakyat sehingga dapat bekerja maksimal untuk rakyat. Namun, pemilihan kepemimpinan seperti ini cenderung boros dan tidak efektif. Sebenarnya harapan dari pemilihan langsung adalah agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan keamanan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, banyak pimpinan terlibat kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Keadaan politik seperti ini dapat berdampak pada kebijakan, khususnya dalam hal pengembangan PT di daerah.

**f. Ekonomi**

Perekonomian makro Indonesia menunjukkan angka yang baik dengan pertumbuhan ekonomi 5.8-6% (target tahun 2014 adalah 7%). Demikian pula pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Namun, secara riil terasa adanya kesenjangan pendapatan, dan pemerataan kesejahteraan. Masyarakat belum merasakan sepenuhnya dampak ekonomi makro. Dikuatirkan indikator capaian ekonomi makro hanya digerakan oleh aktor-aktor yang jumlahnya terbatas, sehingga secara riil belum berdampak pada kesejahteraan rakyat. Dengan keadaan ekonomi makro yang baik ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan. Sehingga diharapkan terjadi percepatan, peningkatan, dan pemerataan daya saing PT.



**g. Sosial budaya**

Dalam bidang sosial budaya terjadi pergeseran nilai yang besar di daerah urban, seperti kota-kota besar. Umumnya di kota besar akses terhadap teknologi informasi lebih mudah dan cepat, sehingga pengaruh budaya lain juga dengan mudah mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Terlihat bahwa kehidupan yang liberal, transaksional, individual banyak mempengaruhi kehidupan urban. Pergeseran nilai di pulau Jawa, akibat perkembangan lingkungan strategis (globalisasi) terlihat lebih cepat. Sehingga, masyarakatnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan di luar Jawa. Keadaan ini juga berdampak pada budaya PT. Banyak PT di perkotaan rawan terjerumus kedalam bentuk "*academic laundry*" yaitu peserta didik dengan kualitas yang kurang baik dan berasal dari PT yang kurang baik melanjutkan ke jenjang lebih tinggi pada PT ternama untuk mendapat pengakuan setara kualitas PT ternama.

**h. Hankam**

Dalam bidang pertahanan maka saat ini yang paling menonjol adalah pada ancaman perang generasi keempat (4GW) yang tidak menggunakan alat dan peralatan tempur tradisional. Ancaman 4GW adalah bentuk ancaman yang menggunakan konsep perang asimetri yang tidak lagi dilakukan oleh negara tetapi oleh kelompok organisasi dalam bentuk insurgensi seperti terorisme.

Hal yang sama juga terjadi pada bidang keamanan dengan maraknya *transnational crime* seperti *illegal logging, mining, fishing*, bahkan *human trafficking*. Pola-pola seperti ini membutuhkan paradigma penanganan yang berbeda dengan sebelumnya. Sedangkan dari dalam negeri tampak bahwa anarkisme oleh peserta didik tampaknya cukup meresahkan karena PT yang seharusnya menjadi tempat dengan budaya terbaik dalam masyarakat justru merupakan sumber anarkisme.

## 19. Peluang dan Kendala

Dari deskripsi perkembangan lingkungan strategis yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik beberapa hal terkait peluang dan kendala.

### a. Peluang

1. Adanya tenaga pendidik berkualitas dalam jumlah yang cukup di perguruan tinggi di Jawa [Strategi 1, Upaya 1].
2. Adanya pendanaan yang cukup untuk pendidikan sesuai UUD NRI 1945 amandemen IV yaitu 20% dari APBN, merupakan suatu tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik [Strategi 1, Upaya 2].
3. Kerja sama antara negara-negara ASEAN merupakan peluang bagi PT untuk belajar praktek terbaik (*best practices*) dari PT asing [Strategi 1, Upaya 6].
4. Adanya teknologi transportasi yang semakin murah yang akan memudahkan mobilitas dan sirkulasi akademisi [Strategi 1, Upaya 7, 9].
5. Populasi penduduk, dan jumlah peserta didik yang tinggi merupakan suatu peluang bagi PT untuk meningkatkan *human capital* Indonesia [Strategi 1, Upaya 8-9].
6. Adanya teknologi informasi yang merupakan sarana yang dapat mempercepat daya saing sebuah PT [Strategi 2, Upaya 7].
7. Adanya kesadaran PT untuk mengembangkan pendidikan berkarakter atas upaya sendiri [Strategi 3, Upaya 4-5].

### b. Kendala

Kendala yang dihadapi terkait modernisasi PT mengingat keadaan lingkungan strategis antara lain:

1. Adanya pergeseran nilai akademik, sehingga terlihat adanya komersialisasi pendidikan yang cenderung berdampak pada terbaikannya tugas pokok PT yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bermutu [Strategi 1, Upaya 3; Strategi 4, Upaya 1].

2. Lemahnya hubungan antara PT, dan Industri, menyebabkan penelitian PT tidak berdampak seperti yang diharapkan oleh dunia kerja/industri [Strategi 1, Upaya 4; Strategi 4, Upaya 1].
3. Lemahnya budaya penelitian karena *reward* yang ada tidak memadai dan hasil penelitian tidak terpakai. Hal ini menyebabkan tenaga pendidik hanya fokus pada pengajaran dan tidak memperbaharui ilmunya secara reguler [Strategi 1, Upaya 3-4].
4. Lemahnya kualitas kepemimpinan, khususnya pada PTS. Sehingga berdampak pada kualitas PT [Strategi 1, Upaya 5; Strategi 2, Upaya 6; Strategi 3, Upaya 6].
5. Persaingan PT yang tinggi membuat PT larut pada persaingan pasar (marketing) demi peningkatan kuantitas peserta didik [Strategi 1, Upaya 6; Strategi 4, Upaya 5].
6. Rendahnya kualitas PT yang dapat dilihat dari jumlah PT yang tidak terakreditasi (lihat lampiran 13) [Strategi 2, Upaya 1-2].
7. Rendahnya kualitas dan kemampuan PT di luar jawa untuk dapat mengembangkan dirinya atas kemampuan sendiri [Strategi 2, Upaya 3; Strategi 4, Upaya 4].
8. Rendahnya kualitas akademik (jenjang pendidikan S3) tenaga pendidik di PT sehingga menyebabkan daya saing menjadi rendah (lihat lampiran 14) [Strategi 2, Upaya 4-5]
9. Rendahnya dampak peningkatan jenjang pendidikan dan kualifikasi tenaga pendidik terhadap daya saing PT di Indonesia (rangking PT di Indonesia rendah) [Strategi 2, Upaya 8]
10. Banyaknya komersialisasi akademik PT dan bentuk *academic laundry* yang terselubung dalam program pasca sarjana [Strategi 2, Upaya 9]
11. Adanya dampak globalisasi yang menyebabkan peserta didik cenderung liberal, individualis, komersial, transaksional, dan pragmatis sehingga berdampak pada karakter peserta didik [Strategi 3, Upaya 1-3; Strategi 4, Upaya 5]



TANHANA DHARMMA MANGRVA

## **BAB V**

### **KONDISI MODERNISASI PERGURUAN TINGGI YANG DAPAT MEMANTAPKAN JATI DIRI BANGSA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

#### **20. Umum**

Seperti telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya tentang kondisi modernisasi Perguruan Tinggi (PT) saat ini, serta permasalahan yang ditemukan, terlihat bahwa adanya kelemahan mendasar pada proses pelaksanaan maupun output PT di Indonesia. Persaingan PT dan perubahan sistem ekonomi global juga telah ikut andil dalam membuat PT di Indonesia mendapat tekanan berlipat ganda. Berdasarkan keadaan yang ada dan semua faktor yang mempengaruhinya, untuk itu diperlukan suatu pemahaman tentang bagaimana sebenarnya kondisi modernisasi perguruan tinggi yang diharapkan dalam perspektif ketahanan nasional.

Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas tentang kondisi modernisasi PT yang diharapkan dapat memantapkan jati diri bangsa dan pembangunan nasional. Bab ini juga membahas kontribusi modernisasi PT terhadap pemantapan jati diri bangsa dan kontribusi pemantapan jati diri bangsa terhadap pembangunan nasional. Bab ini diakhiri dengan indikator keberhasilan sebagai ukuran akan kemajuan dan keberhasilan kebijakan dan strategi yang ditetapkan serta upaya yang dilaksanakan.

#### **21. Kondisi Modernisasi Perguruan Tinggi Yang Diharapkan**

Modernisasi PT adalah suatu upaya yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan harus berakar pada nilai-nilai bangsa Indonesia sehingga dapat memantapkan jati diri bangsa. Oleh karena itu modernisasi PT tidak boleh dimaknai sebagai suatu upaya PT untuk mengadopsi konsep, sistem, budaya, maupun infrastruktur seperti layaknya PT di negara-negara barat (*Copycat*). Namun, modernisasi PT yang diharapkan harus dijabarkan dalam perspektif ketahanan nasional yaitu Astagatra.

**a. Modernisasi PT untuk penguatan gatra Geografi**

Seperti telah dijabarkan pada sub bab 18.a, dari sudut pandang geografi, Indonesia merupakan suatu negara kepulauan. Karena itu jarak dan transportasi menjadi kendala utama dalam upaya pemerataan pendidikan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya konsentrasi PT yang berlebihan di Jawa, sedangkan di luar Jawa PT yang ada sangat minim. Karena penyebaran PT yang tidak merata, maka kualitas sumber daya manusia di luar Jawa juga tidak berkembang dengan baik, dan hal ini berdampak pada kemampuan pemberdayaan potensi ekonomi daerah. Modernisasi PT yang diharapkan dalam aspek geografi adalah mengatasi kendala geografi melalui teknologi informasi, sehingga daya saing PT dapat meningkat di semua daerah di Indonesia. Selain itu, dengan modernisasi diharapkan PT dapat memfokuskan keunggulan daya saingnya secara maksimal pada bidang-bidang yang menjadi kekhasan di daerahnya. Sehingga kondisi yang diharapkan dari modernisasi PT dalam aspek geografi lebih dimaknai sebagai upaya untuk memperkuat keunikan (*uniqueness*) yang selaras dan serasi dengan keunikan daerah, dan kemampuan mengatasi kendala jarak dengan mengadopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

**b. Modernisasi PT untuk penguatan gatra Demografi**

Kondisi modernisasi PT yang diharapkan dalam kaitannya dengan penguatan gatra demografi didasarkan pada kenyataan bahwa populasi penduduk Indonesia yang tinggi dengan penyebaran penduduk yang tidak merata, serta tingginya keberagaman. Keadaan demografi seperti ini sangat memungkinkan terjadinya konflik, dan konsentrasi pembangunan pada daerah tertentu saja, hal ini secara tidak langsung dapat berdampak pada disintegrasi karena adanya ketimpangan pembangunan. Oleh karena itu, modernisasi PT yang diharapkan dalam kaitannya

dengan aspek demografi adalah bahwa keberadaan PT harus berdampak pada upaya dekonsentrasi penduduk, yaitu penyebaran penduduk keseluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimungkinkan jika pemerintah dapat mengupayakan agar di daerah juga memiliki PT yang modern dan berkualitas sehingga masyarakat akan dengan sendirinya menyebar selaras dengan penyebaran dan keberadaan PT tersebut. Selain itu modernisasi harus dapat menumbuhkan lingkungan yang pluralis dan membudayakan sifat toleransi. Hal ini dimungkinkan jika PT mampu memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada setiap penduduk Indonesia untuk memiliki karir di PT tanpa melihat latar belakangnya. Saat ini dan dimasa yang akan datang, PT harus lebih demokratis, egaliter, menjunjung tinggi kesamaan hak, dan mengedepankan kapasitas dan kapabilitas dalam hal pemilihan kepemimpinan dan demokrasi di PT. PT yang modern harus menjadi tempat berbaur (*melting pot*) dari beragam latar belakang. PT harus multikultur, berwawasan internasional, dan bahkan multinasional (*thinking globally, act globally*) tanpa meninggalkan jati diri dan kearifan lokalnya.

### **c. Modernisasi PT untuk penguatan gatra SKA**

Kondisi SKA yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini lebih banyak yang bersifat tak terbarukan (*Non Renewable*). Karena itu eksploitasi SKA secara terus menerus apalagi berlebihan akan berdampak pada terjadinya krisis SKA (*scarce resources*) dimasa depan. Karena itu, Indonesia harus mempersiapkan sandaran ekonomi diluar SKA salah satunya dengan memanfaatkan keunggulan seperti keunggulan demografi. Untuk dapat merealisasikannya diperlukan kualitas SDM yang handal. Untuk itu, kondisi modernisasi PT yang diharapkan dalam kaitannya dengan gatra SKA adalah kemampuan PT mengembangkan bidang-bidang keunggulan nasional diluar SKA, baik yang bersifat *engineering* maupun *non-engineering*. Idealnya, diharapkan modernisasi PT

mampu menyiapkan SDM Indonesia yang dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi ekonomi baru berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (*knowledge based economy*). Setidaknya dengan modernisasi PT dapat menciptakan SDM yang mampu melakukan eksplorasi dan eksploitasi SKA pada daerahnya masing-masing dengan kemampuan sendiri dan dengan keterlibatan/ kepemilikan pihak asing seminim mungkin.

#### **d. Modernisasi PT untuk penguatan gatra Ideologi**

Seperti telah dijabarkan sebelumnya bahwa Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, namun perjalanan sejarah telah mencatat bahwa setelah masa reformasi seperti halnya Indonesia menjadi gamang terhadap Pancasila. Pancasila sebagai ideologi selain sudah jarang disosialisasikan, pemahamannya juga terlihat telah mulai memudar. Masyarakat saat ini terlihat lebih liberal, konsumtif, pragmatis, komersial, bahkan transaksional yang terjadi dalam beragam aspek kehidupan. Kenyataan ini seperti mendapat pembenaran karena adanya globalisasi dan perkembangan teknologi ICT yang pesat. Pandangan ini terasa janggal karena negara lain, seperti: Jepang, China, Korea, maupun negara Eropa juga terdampak globalisasi dan perkembangan ICT tetapi mereka tetap mempertahankan ideologinya. Karena itu, kemerosotan Ideologi Pancasila ini dapat saja terdampak karena globalisasi dan perkembangan ICT namun hal ini lebih banyak, menurut pandangan penulis, karena ketidak mampuan kita sendiri untuk menjaga, mempertahankan, dan menyuburkan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut baik dalam aspek akademis maupun praksis. Kalangan PT yang seharusnya menjadi panutan justru melakukan tindakan yang tidak mencerminkan Pancasila, seperti: kasus plagiarisme, anarkisme, dan komersialisme yang ditenggarai banyak terjadi di PT. Karena itu, kondisi modernisasi PT yang diharapkan dalam kaitannya dengan Ideologi adalah bahwa



modernisasi seharusnya dilihat dalam sisi positif terhadap Ideologi. Modernisasi tidak berarti meninggalkan jati diri dan Ideologi, modernisasi harus diarahkan untuk peningkatan daya saing PT dalam berbagai hal, namun modernisasi tetap dapat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai luhur bangsa, yaitu: ideologi dan jati diri. Modernisasi PT bukanlah hal baru didunia ini, banyak negara telah menjalankannya tanpa perlu meninggalkan jati diri mereka. Hal yang sama tentu juga diharapkan dari modernisasi PT di Indonesia.

**e. Modernisasi PT untuk penguatan gatra Politik**

Dalam kaitannya dengan gatra politik maka kondisi modernisasi PT diharapkan mampu memberikan perubahan konsep pemerintahan di PT, diharapkan dapat merubah dari konsep tata pemerintahan (*government*) menjadi tata kelola (*governance*). Modernisasi di PT diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG), meliputi: transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, fair, dan kredibilitas. Sebenarnya, prinsip-prinsip ini telah dinyatakan secara eksplisit dalam UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) Pasal 4 ayat (2) yang meliputi: a. Otonomi, b. Akuntabilitas, c. Transparansi, d. Penjaminan mutu, e. Layanan Prima, f. Akses yang Berkeadilan, g. Keberagaman, h. Keberlanjutan, i. Partisipasi. Namun demikian, Undang-Undang BHP ini telah dicabut oleh MK sesuai putusan nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun demikian, terlepas kontroversi terhadap UU BHP secara keseluruhan, selayaknya pasal 4 tersebut dapat dijadikan acuan dalam modernisasi PT sebagai upaya membangun *Good University Governance* (GUG). Selain GUG, modernisasi PT juga harus dapat membangun dan mengatur sistim pemerintahan di PT secara demokratis. Khususnya, pada PT

berbasis masyarakat yang sering mengalami pententangan antara yayasan dan PT dalam berbagai hal menyangkut kewenangan.

**f. Modernisasi PT untuk penguatan gatra Ekonomi**

Gatra ekonomi merupakan suatu gatra penting dalam upaya mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan. Seperti disebutkan dalam gatra SKA bahwa sumber perekonomian negara masih menyandarkan pada SKA. Disampaikan juga bahwa di masa depan krisis SKA dapat saja terjadi seiring berkurangnya SKA karena dieksploitasi secara terus menerus. Oleh karena itu, kondisi modernisasi PT untuk penguatan gatra Ekonomi adalah untuk membantu menyiapkan daya saing ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*), jasa, pariwisata agar ketergantungan ekonomi dari SKA dapat secara gradual dikurangi. Untuk itulah modernisasi PT harus mampu mengembangkan kemampuan program studi non-tradisional dan mampu memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk melakukan inovasi, kreativitas keilmuan sampai memiliki nilai pasar (*marketable*). Bahkan, jika perlu, PT dapat membuat konsep *spin-off* dan stimulus untuk *start-up* industri berbasis teknologi tinggi. Jika dimaknai demikian, maka Tri Dharma PT dapat saja direvisi tidak lagi dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat saja, namun dharma pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan penciptaan industri. Penambahan penciptaan industri, selain pengabdian masyarakat dimaknai sebagai upaya PT untuk menciptakan industri berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based*). Konsep ini berbeda dengan *Entrepreneurship* yang menciptakan peserta didik agar memiliki kemampuan ber-“dagang”. *Entrepreneurship*, dalam pandangan penulis, hanya memiliki dampak jangka pendek, sehingga tidak memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk generasi Indonesia kedepan. Pengabdian masyarakat dalam

konteks ini tidak dihilangkan, namun diefektifkan dalam bentuk internalisasi lewat program *University Social Responsibility* (USR).

**g. Modernisasi PT untuk penguatan gatra Sosial Budaya**

Dalam kaitannya dengan gatra sosial budaya, maka kondisi modernisasi PT yang diharapkan adalah mampu menjaga dan melestarikan budaya-budaya nasional. Hal ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kurikuler maupun non-kurikuler. Lebih dari itu, modernisasi PT diharapkan juga mampu menstimulasi peserta didik agar dapat melakukan penyesuaian dan atau penyelarasan dalam aspek positif budaya lokal/nasional dengan kondisi lingkungan strategis. Hal ini dianggap penting mengingat bahwa lingkungan strategis selalu berubah sesuai jamannya. Modernisasi PT juga diharapkan mampu meningkatkan dan menginternalisasi budaya akademik dalam diri peserta didik dengan berlandaskan pada *logical, critical, dan creative thinking*. Sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan *screening* secara objektif terhadap persoalan yang dihadapinya saat ini dan tanggung jawabnya kelak kemudian hari. Dengan budaya akademik yang melekat, diharapkan tercipta proses eksternalisasi yang dapat mendorong terbentuknya peradaban (*civilization*) yang maju.

**h. Modernisasi PT untuk penguatan gatra Hankam**

Kondisi modernisasi PT yang diharapkan terkait gatra Hankam adalah pada sumbangsih PT, sesuai bidang keahliannya masing-masing, untuk ikut andil dalam upaya Hankamrata. Hankam merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat termasuk PT. Saat ini, kompleksitas persoalan Hankam semakin tinggi selaras dengan perkembangan Iptek dan TIK. Bentuk-bentuk ancaman saat inipun telah bergeser dan ancaman simetris menjadi asimetris, lebih jauh sistem peperangan juga telah bergeser menjadi perang modern yang mengandalkan kekuatan Iptek. Karena itu modernisasi PT

diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam upaya meningkatkan efek getar (*deterrent*) maupun kualitas dari *minimum esential force* (MEF) yang dimiliki.

Dalam bidang keamanan, diharapkan bahwa modernisasi PT dapat merupakan bagian dari solusi bukan dari persoalan. Dengan modernisasi PT diharapkan kalangan akademik tidak menjadi sumber masalah. Sebaliknya, diharapkan mereka justru menjadi contoh bahwa PT adalah tempat paling aman dan paling tertib.

## **22. Kontribusi Modernisasi Perguruan Tinggi Terhadap Pemantapan Jati Diri Bangsa dan Kontribusi Pemantapan Jati Diri Bangsa Terhadap Pembangunan Nasional**

Berikut ini adalah kontribusi modernisasi PT terhadap pemantapan jati diri bangsa dan kontribusi pemantapan jati diri bangsa terhadap pembangunan nasional.

### **a. Kontribusi Modernisasi PT Terhadap Pemantapan Jati Diri Bangsa**

Kondisi modernisasi PT yang diharapkan telah dijabarkan secara komprehensif untuk semua gatra. Dari penjabaran tersebut terlihat bahwa kontribusi modernisasi PT terhadap pemantapan jati diri bangsa dapat dijelaskan melalui tiap-tiap gatra sebagai berikut:

#### **1) Geografi**

Modernisasi PT dapat memberikan kontribusi pada upaya untuk memperkecil perbedaan kualitas, karena hambatan jarak, antara PT di Jawa dan luar Jawa. Modernisasi PT tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi TIK. Dengan meningkatnya kualitas PT di daerah, maka dapat memberi dampak positif pada pemantapan jati diri bangsa di daerah dan nasional.

## **2) Demografi**

Modernisasi PT dapat menggali keunikan lokal (*local uniqueness*) (baik berupa budaya, SKA, teknologi, dsb) sebagai suatu disiplin ilmu dan faktor daya saing di daerah. Dengan adanya keunikan dan fokus penelitian pada keunggulan daerah, maka kualitas PT di daerah akan meningkat sehingga dapat menghambat laju urbanisasi ke Jawa. Hal ini terjadi karena PT yang berkualitas telah ada di daerah, sehingga orang tidak perlu ke Jawa untuk melanjutkan studi. Fokus keunikan dan pengembangan PT harus didasarkan pada kearifan lokal, sehingga dapat berdampak pada peningkatan jati diri bangsa di daerah.

## **3) SKA**

Modernisasi PT dapat meningkatkan kualitas disiplin ilmu yang dikembangkan yang diarahkan untuk penggalan sistem ekonomi berbasis pengetahuan dan mengembangkan penelitian yang dapat menjaga keseimbangan eksploitasi SKA. Selain itu SKA harus dapat dieksploitasi dengan kemampuan bangsa sendiri. Jika ini tercapai akan berdampak pada nasionalisme dan tentu saja merupakan penguatan jati diri bangsa.

## **4) Ideologi**

Modernisasi PT bukan merupakan konsep untuk mengimpor ideologi barat, tetapi modernisasi ditujukan untuk meningkatkan daya saing tanpa meninggalkan ideologi Pancasila. Lebih jauh, dengan modernisasi maka upaya pelestarian dan penerapan ideologi Pancasila justru akan semakin efektif. Karena itu, modernisasi seharusnya dimaknai sebagai pengkayaan nilai, bukan penggantian nilai. Jika hal ini

dapat terlaksana, maka akan berdampak pada penguatan jati diri bangsa.

### **5) Politik**

Modernisasi PT merupakan upaya untuk mengadopsi sistem *Good University Governance* (GUG) yang merupakan suatu bentuk tata kelola yang selaras dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia karena mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, dll. Karena itu modernisasi PT dalam kaitannya dengan aspek Politik dapat memantapkan jati diri bangsa.

### **6) Ekonomi**

Modernisasi PT dalam kaitannya dengan aspek Ekonomi adalah menumbuhkan bidang-bidang studi baru yang dapat merubah paradigma ekonomi menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Lebih dari itu modernisasi PT juga harus dapat menjaga keberlangsungan sistem ekonomi kerakyatan dan menjaga keseimbangan konsep ekonomi liberal dapat tumbuh bersama ekonomi kerakyatan tanpa adanya tendensi dan keinginan dari sistem liberalisme untuk mematikan perekonomian rakyat. Hal ini tentu saja akan dapat memantapkan jati diri bangsa.

### **7) Sosial Budaya**

Modernisasi PT dalam aspek sosial budaya merupakan bentuk modernisasi non-akademik yang berupaya melestarikan budaya lokal dan berupaya melakukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis. Sehingga didapat suatu bentuk budaya asli Indonesia yang mampu beradaptasi dengan modernitas dan perubahan jaman. Hal ini tentu saja akan memantapkan jati diri bangsa.

### **8) Hankam**

Modernisasi PT dalam aspek Hankam adalah upaya turut bersama dari PT untuk melakukan penelitian bidang-bidang Hankam. Khususnya dengan meningkatnya dan berevolusinya ancaman yang telah bergeser menjadi ancaman asimetris, dan kejahatan non-tradisional berupa bentuk *transnasional crime*. Diharapkan juga PT dapat memberikan andil dalam penegakan supremasi hukum. Dengan demikian tentu akan berdampak pada pemantapan jati diri bangsa.

Upaya-upaya diatas dan pengembangannya diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung pada pemantapan terhadap jati diri bangsa.

#### **b. Kontribusi Pemantapan Jati Diri Bangsa Terhadap Pembangunan Nasional.**

Kontribusi pemantapan jati diri bangsa terhadap pembangunan nasional merupakan dampak (*outcome*) dari upaya yang telah dilakukan melalui modernisasi PT. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jika jati diri bangsa menjadi mantap maka akan tercapai kesetaran disetiap daerah, SDM yang handal, SKA yang terjaga, ideologi yang kuat, politik yang bermartabat, jujur, transparan, akuntabel, profesional, taat hukum, ekonomi yang stabil, budaya lokal yang terjaga, ikut ambil bagian secara aktif dalam bidang hankam, dan bermartabat dalam hubungan internasional. Dengan demikian, maka pembangunan nasional yang direncanakan akan berjalan dan berhasil mencapai sasarannya dengan baik. Keberhasilan pembangunan ini terutama sekali sangat bergantung kepada kualitas SDM yang dapat ditingkatkan dengan melakukan modernisasi PT. *Impact* dari berhasilnya pembangunan nasional adalah pada ketahanan nasional yang semakin tangguh.

### **23. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan jika ditinjau berdasarkan indikasi waktu kejadian dapat dibedakan menjadi dua yaitu (1) *leading indicator*, dan (2) *lagging indicator*. *Leading indicator* lebih diarahkan untuk mengukur proses, sehingga dapat dipakai sebagai *warning system*. Sedangkan indikator *lagging* adalah indikator hasil, sehingga manakala indikator ini diketahui, maka hal tersebut merupakan hasil yang sudah tidak dapat diperbaiki. Indikator *lagging* dapat dipakai sebagai indikator untuk menentukan efektifitas program. Indikator ini berguna untuk penentuan program perbaikan setelah sebuah upaya telah dilakukan. Selain itu indikator dapat berupa kuantitatif (terukur) dan kualitatif berupa *trend* dan indikasi. Pemilihan jenis indikator sangat tergantung pada tujuannya.

Dalam merumuskan keberhasilan modernisasi PT guna pemantapan jati diri bangsa dalam rangka pembangunan nasional dapat dilihat dari: (1) pokok persoalan, (2) strategi yang diterapkan, maupun (3) dari upaya yang dilakukan. Berdasarkan pokok permasalahan yang ada (lihat sub bab 14) maka indikator keberhasilannya antara lain:

**Permasalahan 1** : Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

**Indikator 1** : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Yang dapat dilihat dari:

1. Meningkatnya jumlah guru besar (leading)
2. Meningkatnya jumlah beasiswa doktor (leading)
3. Meningkatnya jumlah mahasiswa pasca sarjana (leading)
4. Meningkatnya jumlah calon mahasiswa strata 1 (leading)
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (Langging)
6. Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (Lagging)
7. Meningkatnya Indeks Inovasi Global (Lagging)
8. Meningkatnya rasio Doktor per 1000 orang penduduk (Lagging)

**Permasalahan 2** : Rendahnya Daya Saing PT.

**Indikator 2** : Meningkatnya Daya Saing PT.

Yang dapat dilihat dari:



1. Akreditasi Perguruan Tinggi (leading)
2. Pengakuan dari standar internasional (leading)
3. Diperolehnya sertifikasi ISO (leading)
4. Sistem rekrutmen kepemimpinan PT (leading)
5. Sistem rekrutmen tenaga pendidik (leading)
6. Proporsi penelitian tenaga pendidik (leading)
7. Rangking perguruan tinggi Indonesia di dunia (lagging)
8. Rangking perguruan tinggi Indonesia di Asia dan Asean (lagging)
9. Jumlah publikasi ilmiah pertahun (lagging)
10. Pemenang kompetisi (non) akademik peserta didik (lagging)

**Permasalahan 3** : Lemahnya Budaya di PT.

**Indikator 3** : Meningkatnya Budaya Akademik di PT.

Yang dapat dilihat dari:

1. Aktifitas (non) akademik peserta didik (leading)
2. Pertukaran tenaga pendidik (leading)
3. Pertukaran peserta didik (leading)
4. Jumlah penelitian bersama (leading)
5. Demonstrasi mahasiswa anarkis (lagging)

**Permasalahan 4** : Belum Efektifnya Strategi Pemerintah untuk PT.

**Indikator 4** : Meningkatnya Efektifitas Strategi Pemerintah untuk PT.

Yang dapat dilihat dari:

1. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (leading)
2. Terakreditasinya program studi di PT (Leading)
3. Diakuinya guru besar di PT dalam kancah Internasional (Leading)
4. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik (leading)
5. Meningkatnya kerja sama multilateral PT (leading)
6. Penyebaran tenaga pendidik/mobilitas akademik (leading)
7. Berkurangnya urbanisasi mahasiswa ke PT di Jawa (leading)
8. Meningkatnya Ranking PT di Indonesia (lagging)
9. Meningkatnya Daya Saing Nasional (Langging)



TANHANA DHARMMA MANGRVA

## **BAB VI**

### **KONSEPSI MODERNISASI PERGURUAN TINGGI YANG MAMPU MEMANTAPKAN JATI DIRI BANGSA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

#### **24. Umum**

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya, karena itu pembangunan nasional haruslah merupakan pembangunan yang bercirikan: tepat sasaran dalam menyelesaikan persoalan yang ada, mempersiapkan keberlanjutan pembangunan, meletakkan dasar dan mempersiapkan generasi bangsa Indonesia yang akan datang, membangun kapasitas manusia Indonesia (*capacity building*) untuk dapat mengatasi persoalan pada generasinya dan yang terutama adalah merupakan bagian dari upaya untuk membangun peradaban bangsa Indonesia (*civilization*). Oleh karena itu, pembangunan nasional haruslah selaras dan serasi dengan jiwa, nilai, budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu, pembangunan Indonesia harus dapat menyelaraskan dan menyerasikan dengan perubahan lingkungan strategis regional dan global, sehingga Indonesia dapat menjadi bangsa yang memiliki sumbangsih nyata pada pengkayaan peradaban manusia di dunia. Dimensi pembangunan nasional adalah sangat luas, namun untuk membatasi kompleksitasnya dapat disederhanakan dalam dimensi astagatra atau dikenal sebagai sudut pandang ketahanan nasional. Dengan latar belakang inilah, pokok bahasan modernisasi PT akan ditelaah lebih jauh. Menyelaraskan dengan pembangunan nasional Indonesia saat ini yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 (Lihat Sub bab 7.E) yang di dasarkan pada empat pilar (*triple track strategy+1*), yaitu: (1) *Pro Poor* (pengentasan kemiskinan), (2) *Pro Job* (pemerataan), (3) *Pro Growth* (pertumbuhan), ditambah (4) *Pro Environment* (pelestarian lingkungan). Berdasarkan RPJPN 2005-2025, maka peran modernisasi PT secara umum

dapat berdampak pada keseluruhan misi dalam RPJPN 2005-2025, khususnya pada misi 1 dan 2 yaitu:

- Misi 1:** Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
- Misi 2:** Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Konsepsi modernisasi PT dalam bab ini dijabarkan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan upaya-upaya untuk mencapainya. Landasan perumusan konsepsi ini ditujukan demi terwujudnya tujuan nasional yaitu kesejahteraan dan keamanan (*prosperity and security; welzijn en veiligheid*). Dengan terwujudnya kesejahteraan dan keamanan diharapkan dapat tercapai kemakmuran (*welfare; welvaart*) bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut diupayakan melalui peran salah satu pilar strategis pembangunan, yaitu: Pendidikan. Hal ini dilakukan dengan cara modernisasi PT tanpa meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Justru sebaliknya modernisasi PT dengan memantapkan jati diri bangsa Indonesia. Alasan memilih pendidikan, khususnya PT, sebagai objek adalah karena pendidikan merupakan landasan utama (*cornerstone*) bagi terbentuknya peradaban, kemajuan, dan kesejahteraan bangsa. Tinjauan perumusan kebijakan, strategi, dan upaya dalam Taskap ini selalu menggunakan konsepsi ketahanan nasional yaitu melihat dan menganalisis persoalan dari sudut pandang Astagatra secara menyeluruh namun tetap sebagai satu kesatuan.

Konsepsi yang akan dikembangkan dijabarkan berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada sub bab 14. Dari permasalahan yang teridentifikasi, dikerucutkan menjadi empat permasalahan mendasar yang menurut penulis penting, yaitu<sup>60</sup>: (1) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Rendahnya daya saing PT, (3) Lemahnya budaya di PT, dan (4) Belum efektifnya strategi pemerintah untuk PT.

---

<sup>60</sup> Penjelasan lengkap terhadap permasalahan yang ditemukan dapat dilihat pada sub bab 14.

## 25. Kebijakan

Dari tinjauan masalah yang diidentifikasi berdasarkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat akibat keberadaan PT dapat dilihat bahwa PT belum cukup efektif menjadi lembaga seperti yang diharapkan masyarakat. PT terlihat masih membatasi dirinya, bahkan cenderung membentengi dirinya dengan tugas pokoknya, yaitu: Tri Dharma PT. Karena itu tidak jarang PT menuai reaksi dari masyarakat karena masih kurang memiliki keberpihakan pada masyarakat.

Sedangkan dari tinjauan lingkungan strategis baik global, maupun regional maka dapat dilihat bahwa PT di Indonesia masih jauh tertinggal. PT di Indonesia, jika dibandingkan dengan PT di negara maju, masih memiliki *gap* yang besar baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Lebih jauh, jika dibandingkan budaya sivitas akademika PT di Indonesia dengan PT di negara maju, maka PT di Indonesia terlihat masih tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius serta konsisten dan konsekwen untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Untuk itulah perlu diambil suatu kebijakan untuk dipedomani dan dijabarkan menjadi strategi dan upaya. Kebijakan yang ditetapkan adalah:

***Terwujudnya modernisasi perguruan tinggi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing perguruan tinggi, peningkatan budaya di perguruan tinggi, peningkatan efektifitas strategi pemerintah terhadap perguruan tinggi; guna pemantapan jati diri bangsa dalam rangka pembangunan nasional.***

## 26. Strategi

Kebijakan yang telah dirumuskan dalam sub bab 25 diatas memerlukan penjabaran lebih jauh (*deployment*) yang meliputi pokok-pokok strategi, tujuan, sasaran, subyek, obyek, dan metode serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya.

### a. Pokok-Pokok Strategi

Pokok-pokok strategi dari kebijakan yang diambil adalah:

**1) Strategi 1: *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.***

Strategi ini diambil dengan dasar pemikiran bahwa beberapa indikator terkait kualitas SDM masih rendah. Indikator tersebut diantaranya *Human Development Index* (HDI), *Education Development Index* (EDI), *Global Innovation Index* (GII), Angka Partisipasi Kasar (APK), Tingkat pendidikan dosen, Prosentasi nilai akreditasi program studi, dan jenjang pendidikan tenaga kerja di Indonesia (Lampiran 12-14). Data-data tersebut menunjukkan bahwa faktor kualitas SDM memang masih perlu ditingkatkan, khususnya untuk membangun *human capital* di Indonesia. Pentingnya pembangunan *human capital* adalah sebagai investasi bangsa terhadap masa depan, dimana dimasa yang akan datang kompleksitas, intensitas, dan kualitas persaingan antar bangsa disemua sektor akan semakin tinggi. Diprediksi hanya bangsa yang memiliki *human capital* dan *social capital* yang tinggi yang akan memiliki daya saing (*competitiveness*). Sedangkan bangsa-bangsa yang tidak mampu mengembangkan *human capital* dan *social capital* akan kalah dalam persaingan global yang cenderung liberal. Selain itu, dengan *human capital* yang baik akan tercipta *social capital* yang baik pula yang tentunya akan berdampak pada penguatan dan pelestarian jati diri dan karakter bangsa. Untuk itu, konsep modernisasi PT di perlukan yang memiliki makna perubahan pada nilai (*value change*) yaitu jati diri dan perubahan pada praktek institusi yaitu manajemen PT (*institutional change*).

**2) Strategi 2: *Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi.***

Strategi ini diambil dengan dasar pemikiran bahwa beberapa indikator terkait daya saing PT masih rendah.

Indikator tersebut antara lain adalah ranking PT Indonesia di ASEAN, ASIA, maupun Dunia yang masih rendah (lihat lampiran); standar Internasional PT di Eropa seperti *European Quality Improvement System (EQUIS)*<sup>61</sup>, di USA seperti *Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)*<sup>62</sup> untuk program studi teknik, maupun *The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)*<sup>63</sup> untuk program studi ekonomi dan manajemen; di ASEAN seperti *The ASEAN University Network (AUN)*<sup>64</sup>; tingkat pendidikan dosen yang masih rendah; selain itu program studi yang ada di PT di Indonesia juga belum seluruhnya terakreditasi bahkan banyak yang tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)<sup>65</sup> (Lampiran-13). Indikator ini menunjukkan bahwa secara umum daya saing PT di Indonesia masih rendah. Walaupun demikian telah ada beberapa PT negeri yang berupaya mengembangkan dan mencanangkan dirinya menjadi PT kelas dunia (*World Class University, WCU*) namun masih belum dapat setara dengan PT terbaik secara global. Karena itulah strategi ini diambil untuk dapat mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan.

### **3) Strategi 3: *Meningkatkan Budaya di Perguruan Tinggi.***

Strategi ini diambil dengan dasar pemikiran bahwa beberapa indikasi terkait budaya di PT yang masih rendah. Indikasi ini telah dijabarkan sebelumnya yang menunjukkan banyaknya pelanggaran di PT yang terkait etika dan budaya. Lebih jauh terlihat bahwa luaran PT, yang saat ini telah

---

<sup>61</sup> [www.efmd.org/equis](http://www.efmd.org/equis)

<sup>62</sup> [www.abet.org](http://www.abet.org)

<sup>63</sup> [www.aacsb.edu](http://www.aacsb.edu)

<sup>64</sup> [www.aun-sec.org](http://www.aun-sec.org)

<sup>65</sup> [www.ban-pt.kemdiknas.go.id](http://www.ban-pt.kemdiknas.go.id)

menjadi pimpinan pada bidangnya masing-masing, cukup banyak yang tersangkut pada kasus-kasus tindak pelanggaran seperti korupsi, bahkan banyak yang harus ditahan karena kasus-kasus pelanggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa PT telah salah, kalau tidak ingin disebut gagal, dalam mendidik khususnya penanaman jati diri, karakter, dan budaya yang selaras dengan nilai-nilai dan falsafah Pancasila. Seperti telah dijabarkan sebelumnya, peserta didik di PT saat ini juga telah (mulai) terpengaruh dengan budaya liberal, materialis, suka menerabas, tidak disiplin, dan lain-lain yang mengindikasikan rendahnya budaya, karakter, dan jati diri. Tentu hal ini tidak dapat disalahkan pada peserta didik saja, namun juga menjadi tanggung jawab PT sebagai tempat dimana mereka di didik. Hal yang paling meresahkan adalah justru tenaga pendidik di PT, hingga guru besar, banyak melakukan pelanggaran etika berupa plagiarisme yang tidak mencerminkan budaya akademik PT.

#### **4) Strategi 4: *Meningkatkan Efektifitas Strategi Pemerintah untuk Perguruan Tinggi.***

Strategi ini diambil dengan dasar pemikiran bahwa banyaknya permasalahan terkait PT seperti daya saing, budaya, kualitas dan lain lain tidak terlepas dari kebijakan dan strategi yang telah dibuat oleh pemerintah waktu lalu hingga saat ini. Bahwa perubahan lingkungan strategis, globalisasi, teknologi, perdagangan bebas dan lain-lain tentunya berdampak pada Indonesia, karena itu dibutuhkan suatu adaptasi dan penyesuaian atau paling minim evaluasi dari strategi yang telah diterapkan untuk PT di Indonesia. Saat ini memang telah terjadi perubahan positif dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia berupa peningkatan anggaran maupun pemberian beasiswa. Namun, terlihat bahwa upaya



ini masih mengarah pada peningkatan daya saing komparatif saja. Karena itu pemerintah perlu meningkatkan daya saing kompetitif di PT termasuk peserta didik dan tenaga pendidik. Diperkirakan efektifitas strategi yang diterapkan untuk PT saat ini sudah memerlukan suatu revitalisasi untuk menyelaraskan dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis. Strategi inilah yang dipilih untuk mewujudkan kebijakan diatas.

#### **b. Tujuan**

Kebijakan dan strategi yang ditetapkan memiliki tujuan agar tercapai Sumber Daya Manusia Indonesia (*Human Capital*) yang unggul namun tetap memiliki jati diri dan karakter orang Indonesia sesuai falsafah Pancasila sehingga dapat tumbuh kemampuan sosial (*Social Capital*) sebagai dasar untuk dapat membangun peradaban (*Civilization*) Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan yang berkualitas khususnya melalui PT. Untuk itu diperlukan PT yang berdaya saing tinggi yaitu PT yang memiliki kualitas yang setara dengan PT lain baik regional maupun global namun dengan tetap bersandar pada karakter dan budaya nasional. PT Indonesia yang berdaya saing dapat diwujudkan dengan melakukan modernisasi PT yang mampu memantapkan jati diri bangsa dalam rangka pembangunan nasional.

#### **c. Sasaran**

Untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan diatas perlu ditentukan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

##### **1) Jangka Pendek**

Dengan diterapkannya strategi diatas maka dalam jangka pendek diharapkan: terbentuk inisiatif yang kuat untuk meletakkan daya saing PT dan kualitas sumber daya manusia serta pembentukan karakter dan jati dirinya sebagai suatu tujuan yang harus diperjuangkan oleh PT, terbentuk

kesadaran di PT tentang pentingnya jati diri bagi pembangunan nasional, terbentuk upaya untuk melakukan evaluasi diri secara menyeluruh terhadap kinerja, menemukan akar masalah sebagai langkah awal dalam membuat sistem evaluasi kebijakan dan strategi pemerintah untuk PT sesuai perubahan lingkungan strategis.

## **2) Jangka Menengah**

Dengan diterapkannya strategi di atas maka dalam jangka menengah diharapkan dapat terwujud: syarat pendidikan bagi tenaga pendidik yaitu minimal harus berpendidikan S3, meningkatkan ranking PT Indonesia dalam ranking Internasional, tercapai sasaran akreditasi program studi di PT, meningkat kuantitas dan kualitas peserta didik, meningkat jumlah kerja sama internasional di PT, meningkat kuantitas dan kualitas serta relevansi penelitian di PT, tercapai penyebaran PT secara geografi dan demografi yang disesuaikan dengan keunggulan dan keunikan daerah.

## **3) Jangka Panjang**

Dalam jangka panjang, diharapkan dengan diterapkan strategi tersebut maka: akan tersedia sumber daya manusia yang dapat menggerakkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based economy*), tercapai pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, terbentuk masyarakat yang berbudaya dan memiliki jati diri sesuai falsafah Pancasila, terbentuk *knowledge based society*, meningkatnya HDI, meningkatnya daya inovasi, meningkatnya daya saing nasional (*national competitiveness*) baik komparatif maupun kompetitif, terbentuknya masyarakat yang taat hukum, dan yang terutama adalah tercapainya tujuan nasional yaitu kesejahteraan dan keamanan dalam masyarakat.

**d. Subyek**

## 1) Supra Struktur

Suprastruktur terdiri dari organ pemerintah yaitu pejabat eksekutif baik ditingkat pusat maupun daerah seperti lembaga eksekutif (pemerintahan), lembaga legislatif (parlemen), lembaga yudikatif (peradilan) yang memiliki kewenangan diantaranya merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan strategi yang dirumuskan dalam upaya modernisasi PT yang mampu memantapkan jati diri bangsa dalam rangka pembangunan nasional.

## 2) Infra Struktur

Organisasi atau lembaga sosial maupun organisasi atau lembaga politik dipusat maupun daerah seperti Partai Politik, kelompok kepentingan (*Interest group*), kelompok penekan (*Pressure group*), media komunikasi politik, kelompok jurnalis, kelompok pelajar/mahasiswa (*Student Group*), figur-figur politik (*Political figure*) yang ikut dalam upaya modernisasi PT yang mampu memantapkan jati diri bangsa dalam rangka pembangunan nasional.

## 3) Sub Struktur

Mayarakat maupun individu yang turut maupun terkena dampak dalam pelaksanaan upaya modernisasi PT yang mampu memantapkan jati diri bangsa dalam rangka pembangunan nasional.

**e. Obyek**

Dalam kaitannya dengan modernisasi PT yang dijabarkan dalam berbagai upaya sesuai strategi yang dipilih, maka obyek berkenaan dengan rencana strategi yang telah dibuat antara lain: PTN, Pemda, Kopertis, PTS, rektor, wakil rektor, dekan, dan kaprodi, serta seluruh sivitas akademika PT.

## **f. Metode**

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditentukan maka dipergunakan beberapa metode yang dipakai dalam upaya, yaitu:

### 1) Regulasi

Dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan tinjauan kebijakan/strategi/upaya yang telah ada sebelumnya sehingga dapat diketahui efektifitasnya. Hasil dari evaluasi regulasi tersebut memiliki tiga kemungkinan yaitu (a) masih relevan, (2) perlu penyempurnaan (revisi), dan (3) tidak lagi selaras dengan perubahan lingkungan strategis.

### 2) Edukasi

Metode ini dimaksudkan untuk membuat obyek dari upaya sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (*requirement*). Namun demikian perlu diperhatikan bahwa edukasi adalah upaya untuk membawa nilai-nilai yang baru atau menguatkan nilai-nilai yang telah ada sehingga edukasi harus tepat sasaran.

### 3) Sosialisasi

Metode ini dimaksudkan agar terjadi kesamaan pengertian terhadap suatu pokok permasalahan, meningkatkan kepedulian (*awareness*), dan pertukaran pengetahuan dan pemahaman (*exchange of knowledge*).

### 4) Standarisasi

Metode ini mengupayakan agar tercipta standar kualitas mata kuliah antar PT di Indonesia.

### 5) Revitalisasi

Metode ini dimaksudkan untuk memvitalkan kembali suatu keadaan organisasi atau lembaga sehingga dapat meningkatkan efektifitasnya.

6) Rekruturisasi

Upaya ini ditujukan untuk melakukan penataan ulang bagi organisasi agar mampu berjalan secara lebih efektif dan efisien terhadap perubahan lingkungan strategis. Rekruturisasi harus dimaknai sebagai upaya peningkatan kinerja PT.

7) Hibah

Hibah dalam konteks upaya dalam paper ini adalah suatu bentuk bantuan terbatas yang diberikan oleh pemerintah dengan suatu prasyarat dan kondisi seperti yang telah ditetapkan.

8) Subsidi

Adalah bentuk bantuan, umumnya dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan, dari pemerintah yang sifatnya terbatas untuk membantu dalam suatu batas dan syarat prakondisi tertentu.

9) Pengawasan

Suatu sistim kontrol yang dilakukan untuk memastikan berjalannya program sesuai rencana dan standar kualitas.

## 27. Upaya

Upaya yang dapat dilakukan berkaitan dengan strategi yang telah dijabarkan didepan meliputi:

a. **Strategi 1:** *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.*

**Upaya yang dilakukan meliputi antara lain:**

1) Pemerintah melalui dirjen dikti membuat program mobilitas akademisi (tenaga pendidik) melalui pembuatan Permen tentang mobilitas akademisi, memberikan stimulus berupa anggaran untuk lima tahun pertama. Program ini ditujukan agar terjadi pertukaran pengalaman dan

pengetahuan sehingga dapat berangsur-angsur tercapai kesamaan cara pandang dan kualitas. Program ini juga berimplikasi pada penguatan ketahanan nasional khususnya dalam kehidupan keberagaman. Dengan mobilitas akademisi ini akan terwujud saling menghargai, toleransi dan pengertian walaupun berbeda suku, ras, dan agama.

2) Pemerintah membuat skema beasiswa melalui hibah pendidikan bagi mahasiswa di daerah terdepan, hibah prestasi bagi semua mahasiswa yang memenuhi kriteria sesuai bidang prioritas sesuai Astagatra. Program ini memungkinkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah terdepan sehingga diharapkan mereka nanti dapat kembali dan melakukan praktek baik (*best practice*) dari pengalaman selama menjadi mahasiswa di daerah yang lebih maju.

3) Pemerintah melalui dirjen dikti mengusulkan kepada DPR untuk membuat UU atau PP tentang subsidi PT baik negeri maupun swasta berbasis kinerja penelitian, dan jumlah thesis yang dibuat atas dasar penelitian. Program ini ditujukan mengingat saat ini marak praktek komersialisasi di PT yang dipicu karena faktor finansial dimana PT hanya mengandalkan sumber dana operasional keuangannya dari peserta didik. Karena itu PT berupaya menarik dana dari peserta didik dengan beragam metode. Hal ini terjadi karena PT atau badan yang menaunginya tidak cukup memiliki kemampuan untuk menggali dana diluar cara-cara tradisional yang ada. Karena itu diperlukan upaya subsidi yang diberikan berdasarkan kinerja hasil dan kualitas penelitiannya.

4) Pemerintah melalui dirjen Dikti mendorong penelitian terapan (*action based research*) melalui hibah penelitian terapan yang didasarkan persoalan nyata bangsa. Upaya ini

dilakukan karena terlihat saat ini penelitian yang dilakukan PT masih berupa tulisan dalam jurnal dan belum menyentuh aplikasi nyata. Perguruan tinggi hanya seperti "macan kertas" saja, karena output penelitiannya hanya berupa paper laporan penelitian. Karena itu paradigma penelitian perlu diperbaharui yaitu melakukan penelitian yang berguna secara langsung.

5) Pemerintah melalui dirjen Dikti membuat persyaratan kualitas akademik yang tinggi bagi pimpinan universitas. Pimpinan universitas (mulai dari kaprodi hingga rektor) adalah orang yang dipercaya untuk mengarahkan strategi PT, disisi lain pimpinan universitas juga dituntut memiliki wawasan yang luas baik akademik maupun non-akademik.

6) Pemerintah melalui dirjen Dikti membuat peraturan tentang tata ujian program S2 yang mengharuskan adanya eksternal examiner tingkat nasional, dan untuk S3 melalui eksternal examiner dari PT LN dengan batas maksimum internal eksaminer dari PT asal hanya 2 orang.

7) Pemerintah melalui dirjen DIKTI membuat standarisasi mata kuliah bagi PT agar dapat berlaku sistim pengakuan kelulusan berdasarkan mata kuliah. Sehingga mata kuliah tidak harus diambil dari PT asal, namun dapat dilakukan diluar PT asal termasuk perguruan tinggi LN (idem Strategi 2.7).

8) Pemerintah melalui dirjen DIKTI mengizinkan PT untuk menerima peserta didik yang hanya ingin mengambil mata kuliah tertentu saja, namun tidak bergelar, tapi tetap diakui kreditnya dalam perhitungan perolehan gelar di PT asal.

9) Pemerintah melalui dirjen DIKTI merevisi aturan pemberian gelar, dimana gelar akademis diberikan jika peserta didik telah menyelesaikan sejumlah SKS tertentu.

Namun SKS dapat diambil diluar PT asal selama PT tempat mengambil mata kuliah diakui oleh DIKTI.

*b. Strategi 2: Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi.*

**Upaya yang dilakukan meliputi antara lain:**

1) Pemerintah lewat Dirjen dikti melakukan perumusan sistim *quality assurance* perguruan tinggi yang kompatibel dengan standar PT Internasional untuk tiap level sesuai tingkat kedewasaan PT. Sehingga akreditasi program studi di PT tidak dilakukan secara sama rata, tapi melihat tingkat kedewasaan program studinya. Sehingga tidak dapat disamakan bagi program studi baru dan program studi yang telah berpengalaman.

2) Pemerintah lewat dirjen Dikti dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) meningkatkan kuantitas dan kualitas akreditasi PT melalui regulasi yang mengharuskan PT meningkatkan akreditasi program studinya dengan cara pendampingan oleh BAN-PT. Namun bagi PT yang telah memperoleh akreditasi A dan dapat mempertahankan selama dua kali diharuskan melakukan peningkatan kualitas dengan mengikuti akreditasi program studi berstandar Internasional yang kredibilitasnya diakui dunia. Bagi PT yang mampu mensejajarkan kualitas program studinya akan mendapat hibah pertukaran dosen/mahasiswa selama satu tahun pada perguruan tinggi di LN yang atas evaluasi dikti tergolong PT ternama dan memiliki rangking.

3) Pemerintah melalui dirjen Dikti melakukan revitalisasi PT yang tidak mampu mengembangkan dirinya melalui pembuatan regulasi untuk dimungkinkannya penugasan tenaga pendidik dari PT besar untuk membantu revitalisasi PT



kecil selama maksimum dua tahun atas pembiayaan yang dibebankan bersama antara PT dan pemerintah.

4) Pemerintah melalui Dikti mewajibkan setiap PT untuk meningkatkan jenjang akademik dosen hingga S3 dengan memberikan beasiswa doctoral melalui seleksi bagi dosen muda yang berprestasi dan berumur dibawah 35 tahun. PT bersangkutan wajib memberikan beasiswa bagi dosen yang diproyeksikan akan menempati posisi kepemimpinan dan telah berumur diatas 35 tahun untuk menempuh pendidikan S3. Pemerintah menetapkan jumlah minimum dosen bergelar Doktor di setiap program studi sarjana, sedangkan untuk pasca sarjana seluruhnya harus bergelar Doktor.

5) Pemerintah melalui Dikti membuat upaya peningkatan kualitas manajemen program studi yang tidak dapat berkembang dengan melakukan edukasi bagi kaprodi tentang manajemen program studi dan memberikan pendampingan terhadap rencana aksi yang harus dilakukan.

6) Pemerintah melalui dirjen Dikti melakukan pemerataan peningkatan daya saing PT melalui edukasi dan training bagi jajaran pimpinan PT daerah pada PT yang telah mapan dan direkomendasikan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan kesempatan hibah mobilitas akademisi khususnya bagi dosen muda untuk dapat berkarir di PT di daerah dengan stimulus khusus yaitu mendapatkan prioritas beasiswa hingga jenjang S3 bagi mereka yang telah mengabdikan untuk waktu 5 tahun dan menunjukkan prestasi.

7) Pemerintah dalam hal ini dirjen Dikti melakukan standarisasi mata kuliah dan transfer mata kuliah antara program studi dengan akreditasi yang sederajat melalui

regulasi sistem transfer kredit mata kuliah antar PT. Sehingga peserta didik dapat mendaftar mengikuti kuliah di PT terdekat dengan tempat kerja/tinggal, selama akreditasi program studinya sederajat dengan program studi di PT asalnya. Sertifikat kelulusan mata kuliah dapat dipakai sebagai syarat transfer kredit sks ditempat PT asalnya.

8) Pemerintah dalam hal ini Mendikbud melakukan pengetatan syarat menjadi guru besar, yaitu didasarkan semata-mata pada kualitas akademis dan kemampuan mendatangkan penelitian dari berbagai pihak kedalam program studinya. Sertifikat guru besar mempunyai jangka waktu yang terbatas dan akan ditinjau kembali, manakala tidak memenuhi kriteria produktifitas dan kualitas akademik maka jabatan guru besar tidak dapat diperpanjang.

9) Pemerintah dalam hal ini dirjen Dikti menghimbau dan memberikan stimulus bagi PT untuk melakukan program "*sister university*" dengan PT lain yang memiliki kredibilitas di LN pada bidang yang menjadi unggulan PT setempat.

10) Pemerintah dalam hal ini dirjen Dikti melakukan pengawasan melekat program studi pasca sarjana yang berorientasi komersialisme melalui regulasi yang ketat terhadap syarat dan tata cara menjadi mahasiswa pasca sarjana sehingga tidak membuka peluang untuk terjadinya "*academic laundry*"

c. **Strategi 3: Meningkatkan Budaya di Perguruan Tinggi.**

**Upaya yang dilakukan meliputi antara lain:**

1) Pemerintah dalam hal ini dirjen Dikti mengembangkan sistem pendidikan karakter di PT melalui regulasi yang

mengatur konsep pendidikan karakter yang merupakan syarat kelulusan dan memiliki kredit.

2) Pemerintah dalam hal ini dirjen Dikti melakukan pengkajian kembali efektifitas mata kuliah wajib saat ini dan melakukan kajian melalui restrukturisasi konsep kurikulum PT untuk menguatkan falsafah Pancasila sebagai jati diri bangsa.

3) Pemerintah dalam hal ini dirjen Dikti memberikan stimulus dan hibah bagi PT yang melaksanakan upaya pendidikan karakter atas inisiatif internal dan memberikan pendampingan tenaga pendidik baik dari kalangan akademisi maupun non akademisi.

4) Pemerintah dalam hal ini Mendikbud memberikan penghargaan bagi program studi di PT yang mampu mengembangkan budaya dan kultur yang dapat menguatkan, meningkatkan, dan mentransformasikan jati diri bangsa Indonesia sesuai falsafah Pancasila kepada peserta didik.

5) Pemerintah dalam hal ini dirjen Dikti memberikan hibah bagi PT untuk dapat mengembangkan sarana untuk menumbuh kembangkan jati diri bangsa melalui pramuka PT, resimen mahasiswa, organisasi profesional program studi, dan koperasi mahasiswa.

6) Pemerintah memberikan bantuan hibah studi banding bagi Rektor PT terpilih untuk melakukan studi banding di PT terkemuka di nagara-negara maju.

7) Rektor PT melakukan pertukaran mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang terus menerus melakukan tindakan anarkis, untuk melanjutkan studi ke PT atau institusi akademik lain baik sipil maupun militer diluar daerahnya

selama minimal satu semester atas pendanaan yang disponsori oleh pemerintah.

8) Rektor PT bekerja sama dengan institusi pendidikan militer menggalang kembali unit aktifitas yang dapat mendorong peserta didik mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan kedisiplinan seperti program Resimen Mahasiswa.

d. **Strategi 4:** *Meningkatkan Efektifitas Strategi Pemerintah untuk Perguruan Tinggi.*

**Upaya yang dilakukan meliputi antara lain:**

1) Presiden melalui Mendikbud mengevaluasi secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu tentang kesesuaian dan efektifitas kebijakan terkait PT melalui studi kelayakan dan simulasi kebijakan. Diharapkan secara reguler diadakan evaluasi kebijakan dan strategi terhadap perubahan lingkungan strategis khususnya global dan regional.

2) Mendikbud melalui dirjen Dikti melakukan konsepsi strategi untuk PT dengan mempertimbangkan prediksi perubahan lingkungan strategis melalui studi tentang kebijakan PT untuk mendukung potensi Indonesia menuju *knowledge based economy*.

3) Mendikbud melalui *roadmap* yang diturunkan dari RPJPN 2005-2025 dan RPJMN melakukan analisa kesesuaian dan analisa gap (*gap analysis*) antara perencanaan RPJPN dan kenyataan yang terjadi melalui studi kasus di setiap daerah.

4) Pemerintah melalui Mendikbud melakukan studi strategis tentang pemerataan PT berbasis demografi (populasi) dan geografi serta *local wisdom*. Sehingga

pemerintah dapat melakukan investasi PT untuk dapat mempercepat pembangunan daerah di luar Jawa dan mempercepat tercapainya peningkatan kualitas SDM di seluruh wilayah Indonesia.

5) Mendikbud membuat *roadmap* pengembangan PT di Indonesia yang dapat membawa Indonesia menuju bangsa yang memiliki daya saing kompetitif, khususnya dalam mengembangkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based economy*)



TANHANA DHARMMA MANGRVA

## **BAB VII P E N U T U P**

Sebagai akhir dari penulisan taskap ini dapat diambil hal-hal penting sebagai kesimpulan dan saran yang dapat ditindak lanjuti agar upaya yang dilakukan dapat lebih optimal. Namun demikian, kesimpulan yang diambil hanya terbatas dalam pandangan dan pemikiran penulis yang dilakukan dari sudut pandang ketahanan nasional dengan tinjauan dilakukan dalam aspek Astagatra. Dengan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat disemua bidang Astagatra akibat dampak dari globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, liberalisasi perdagangan dan sebagainya membuat kesimpulan bersifat temporer dan jangka pendek. Oleh karena itu, perlu untuk mendapat perhatian bahwa kesimpulan yang diambil adalah bersifat statis dalam tinjauan yang terbatas. Keselarasan kesimpulan ini perlu ditinjau seiring dengan perubahan lingkungan strategis, yang mempengaruhi juga perubahan isu yang berkembang.

### **29. Kesimpulan**

Modernisasi perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mengurai simpul akar masalah yang multi dimensional dalam kaitannya dengan perjalanan pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan nasional. Modernisasi perguruan tinggi diharapkan dapat membuat perguruan tinggi, sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari aspek *hard knowledge* maupun *soft knowldege*, dan dapat meningkatkan (khususnya) daya saing kompetitifnya. Selama ini, terlihat dari indikasi perkembangan situasi dalam masyarakat, perguruan tinggi belum optimal sebagai agen perubahan (*agent of change*), bahkan perguruan tinggi seperti terseret menjadi bagian dari persoalan bangsa itu sendiri. Kenyataan dalam masyarakat inilah yang menjadi dasar pembahasan kertas karya perorangan ini, dan karena itu dapat diambil beberapa pokok penting terkait kesimpulan sebagai berikut.

a. Keadaan geografis Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus disyukuri. Geografis yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan terbesar bangsa yang harus dijaga dan dipertahankan. Kondisi geografis yang dimiliki Indonesia tampak seperti menjadi kendala bagi pengembangan kesejahteraan karena faktor jarak dan konektivitas. Namun sesungguhnya, hal ini harus dilihat sebagai sebuah tantangan yang harus diupayakan untuk membuat bangsa Indonesia menjadi dewasa. Karena faktor geografis, telah terjadi disparitas kualitas maupun kuantitas antara perguruan tinggi di Jawa dan di luar Jawa. Dampak dari disparitas ini adalah pada perbedaan kualitas SDM dan kesejahteraan perekonomian. Karena itu, untuk memperkecil disparitas ini diupayakan dengan melakukan modernisasi perguruan tinggi yang dilakukan tanpa meninggalkan (bahkan mengadopsi) akar budaya, jati diri, dan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat setempat.

b. Demografi Indonesia merupakan asset bangsa yang paling utama (*golden asset*) untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan keamanan. Nampak bahwa asset demografi ini belum diberdayakan dengan optimal yang terlihat dari indeks pengembangan manusia (IPM) yang masih rendah dan angka partisipasi kasar (APK) yang juga masih rendah. Karena itu diperlukan upaya pemberdayaan asset demografi khususnya mereka yang masuk dalam usia produktif melalui pendidikan yang berkualitas sehingga dapat merubah asset demografi ini menjadi asset bangsa. Utamanya untuk meningkatkan daya saing kompetitif bangsa yaitu manusianya. Disisi lain perbedaan dan pluralisme adalah juga merupakan asset bagi terwujudnya peradaban masa depan (*future civilization*) yang lebih mengedepankan kehidupan yang pluralis atas dasar toleransi. Karena itu Indonesia harus menjaga asset keberagaman ini sebagai modal menuju peradaban masa depan. Hal ini dapat terwujud dengan meningkatkan SDM melalui



pendidikan yang berkualitas yang dilakukan lewat modernisasi perguruan tinggi tanpa meninggalkan jati diri bangsa Indonesia.

c. Indonesia adalah negara yang telah diberikan karunia SKA tak terbarukan (*non renewable*) yang berlimpah. Namun, dalam perjalanan bangsa hingga saat ini, potensi SKA yang dimiliki sedikit demi sedikit tereksplorasi hingga dikuatirkan akan tercapai suatu titik dimana asset SKA yang dimiliki menjadi sumber yang langka (*scarce resources*). Bahwa eksploitasi dilakukan sebagai tulang punggung upaya mewujudkan kesejahteraan (ekonomi) dan keamanan dimasa lampau dapat dipahami, namun saat ini cara pandang (*mindset*) demikian haruslah dirubah. Indonesia harus mengupayakan daya saing dan sumber kesejahteraan (ekonomi) diluar SKA yaitu melalui keunggulan SDM. Karena itulah konsep dan mindset pembangunan harus berubah menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang mengedepankan pada perlindungan maksimal terhadap SKA dan lebih mengandalkan tulang punggung ekonomi (*backbone*) pada penggerak ekonomi (*economic driver*) dari asset SDM. Karena itu diperlukan suatu upaya keras untuk meningkatkan kualitas SDM melalui modernisasi PT yang memperkuat jati diri bangsa.

d. Pancasila telah menjadi falsafah dan pandangan hidup sejak Indonesia berdiri, namun Pancasila belum terimplementasikan secara utuh dalam budaya dan jati diri masyarakat. Persoalannya adalah bukan pada Pancasilaannya tetapi pada manusianya, dengan keadaan perekonomian, pendidikan, lapangan kerja, dan berbagai faktor penekan kehidupan membuat masyarakat bahkan tidak sempat melakukan refleksi tentang ideologi yang diyakininya. Bahkan secara ekstrim Pancasila seperti dilupakan, oleh karena itu dengan keadaan masyarakat yang demikian maka infiltrasi langsung maupun tidak langsung dari ideologi lain akan cepat

merasuk kepada masyarakat apalagi jika hal itu dapat memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dipergunakan untuk menangkal hal tersebut adalah dengan memberikan pendidikan yang berkualitas yang mampu membuka cakrawala manusia, suatu pendidikan yang memanusiakan manusia lewat konsep modernisasi perguruan tinggi yang mampu memantapkan jati diri bangsa.

e. Demokrasi sebagai suatu credo dalam peradaban modern telah mempengaruhi mayoritas negara di dunia. Demokrasi secara teori memiliki makna bahwa kekuasaan adalah ditangan rakyat. Namun dalam prakteknya, demokrasi tidak serta merta dapat mensejahterakan rakyat. Bahkan secara ekstrim dapat dilihat bahwa demokrasi justru memberikan tauladan sebagai tempat untuk mengkhianati amanat rakyat. Banyak negara di dunia mengalami kehancuran atau kemunduran peradabannya karena diterjang oleh arus demokrasi, seberapa kuatpun benteng hukum yang dimilikinya. Hanya sedikit negara didunia yang dapat menikmati buah demokrasi untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun demikian, akar permasalahan bukan pada demokrasi, namun pada persyaratan untuk dapat melaksanakan demokrasi yang belum sepenuhnya dipenuhi diantaranya kualitas pendidikan, perekonomian, dan budaya masyarakat. Sehingga menyebabkan banyak negara justru gagal karena demokrasi. Untuk itu perlu membuat demokrasi berjalan sesuai "teorinya" diperlukan upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui modernisasi perguruan tinggi yang mampu menguatkan jati diri bangsa.

f. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang menunjukkan pertumbuhan yang baik. Namun demikian Indonesia harus tetap waspada karena daya saing ekonomi Indonesia masih mengandalkan pada sumber ekonomi tradisional seperti SKA, dan

keunggulan komparatif berupa biaya tenaga kerja yang murah, dan transportasi yang murah. Selain itu pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersandar pada industrialisasi, walaupun ada maka industri yang beroperasi masih berupa industri *middle-end* atau bahkan *low-end*. Daya saing melalui keunggulan komparatif ini memberi nilai tambah (*added value*) yang rendah, oleh karena itu Indonesia perlu mempersiapkan sistem ekonomi yang bersandar pada daya saing kompetitif. Ekonomi yang mengandalkan pada daya saing kompetitif dimasa depan merupakan bentuk *Knowledge Based Economy* (K-Economy) dimana daya saing didasarkan pada kualitas sumber daya manusia dengan dukungan teknologi informasi, bahasa, sistem, dan pelayanan yang maksimal. Untuk itulah diperlukan SDM Indonesia yang kompetitif dan berdaya saing tinggi namun tetap berakar budaya Indonesia. SDM ini dapat diciptakan lewat pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan melakukan modernisasi perguruan tinggi yang mampu memantapkan jati diri bangsa.

g. Situasi budaya masyarakat saat ini yang cenderung suka menerabas, materialistis, transaksional, egois, dan bahkan liberal yang sangat bertolak belakang dengan kearifan falsafah Pancasila. Budaya masyarakat seperti inilah yang membuat tumbuh subur nya pelanggaran hukum, dan rusaknya demokratisasi. Karena itu perlu upaya penguatan budaya masyarakat salah satunya dengan melakukan pendidikan yang berkarakter di perguruan tinggi yang dilakukan melalui modernisasi perguruan tinggi yang mampu memantapkan jati diri bangsa.

h. Ancaman dan tindakan kejahatan saat ini telah mengalami evolusi. Bahwa ancaman negara lain terbukti sangat sedikit yang berakibat pada konfrontasi langsung. Justru saat ini muncul ancaman baru dengan aktor non-negara namun memiliki dampak

yang sangat merusak. Ancaman ini adalah bentuk ancaman asimetri yang dapat berupa kejahatan lintas negara (*transnational crime*) seperti obat terlarang (*illegal drugs*), *illegal fishing*, *cyber crime*, *illegal logging*, bahkan *human trafficking*, termasuk terorisme. Dalam hal pertahanan, maka perang modern akan berupa perang teknologi dalam waktu yang singkat dengan sumber daya seminimal mungkin dengan sistim *preemptive*. Kondisi pertahanan dan keamanan seperti ini dapat dicapai jika Indonesia memiliki SDM yang unggul yang dapat diupayakan melalui pendidikan yang baik. Karena itu sangat diperlukan modernisasi perguruan tinggi yang mampu memantapkan jati diri bangsa.

### **30. Saran**

Agar kebijakan, strategi, dan upaya yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien maka disarankan:

- a. Perlunya penyesuaian dengan program kerja yang telah direncanakan oleh pemerintah baik lewat RPJMN, RPJMD dan melakukan klarifikasi program dengan Bappenas.
- b. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan yang modern dan berkarakter lewat media cetak dan elektronik secara berkesinambungan.
- c. Perlunya komitmen dari pimpinan nasional, pimpinan daerah baik formal, nonformal, dan informal terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pentingnya mempertahankan dan menguatkan jati diri bangsa.
- d. Pemerintah perlu membuat task force peningkatan kualitas dan modernisasi perguruan tinggi yang memberikan pendampingan strategi bagi kemdiknas dan Dikti.



TANHANA DHARMMA MANGRVA

## DAFTAR PUSTAKA

- Bernadette N Setiadi. 2003. "Dua Tantangan Besar Perguruan Tinggi di Indonesia". Jakarta: *Suara Pembaruan*: 11
- Boelaars, Y. 1984. "Kepribadian Indonesia Modern, Suatu Penelitian Antropologi Budaya". Jakarta: *PT Gramedia*
- Budiman, A. (terj.) dan Frank, A. Gunder. 1984. "Sosiologi Pembangunan Dan Keterbelakangan Sosiologi". Jakarta: *Pustaka Pulsar*
- Bloom, B. S. 1956. "Taxonomy of Educational Objective". New York: *Handbook I: The Cognitive Domain*, David Mc Kay Co. Inc.
- Chairuddin, P. L. 2004. "Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Disiplin Nasional", Universitas Sumatra Utara.
- Chuanqi. 2004. "The Model and Principle of Modernization"
- Daniel V. Aksamit. 2005. "Precursors To Modernization Theory In United States Government Policy: A Study Of The Tennessee Valley Authority, Japanese Occupation, And Point Four Program", University of Nebraska.
- DIKTI. "Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010"
- DIKTI. 2008. "Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi"
- Dirlik A. "Reconfiguring Modernity: From Modernization to Globalization"
- Doll, W. E. 1993. "A post-modern perspective on curriculum". New York: *Teachers College Press*
- Frank, A.G. 1967. "Crisis in the Third World". New York: *Holmes and Meier*.
- Garna, Y. K. 1993. "Tradisi Transformasi Modernisasi dan Tantangan Masa Depan di Nusantara". Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

- IMF. 2011. "World Economic Outlook April 2011". Washington: *IMF Publication Services*
- INSEAD. 2010. "Global Innovation Index 2009-2010"
- Kaelan. 2010. "Pendidikan Pancasila". Yogyakarta: ed. Ke-9. *Penerbit Paradigma*
- Kenneth, B. dan Norman V. Peale. 1988. "The Power of Ethical Management". London: Heinemann Kingwod: 38
- Kemdiknas. "Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014"
- Koentjaraningrat. 1993." Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan". Jakarta: *Gramedia Pustaka Utama*
- Li Lanqing. 2005. "Education for 1.3 Billion". China: *Pearson Education and Foreign Language Teaching & Research Press* : 300-301
- Lickona, T. 1991. "Educating For Character: How Our School can Teach Respect and Responsibility ". New York: *Bantam Books*
- Myron Weiner.\_\_." Modernization: The dynamics of growth"
- Palmira J. et al. 2004, "Brain Drain In Country in-transition: Paradox of Higher Education". Kaunas University of Technology, *Socialiniai Mokslai* (2004) Nr. 2: 44
- Prayitno. 2009. Dasar Teori dan Praksis Pendidikan
- UNESCO. 1996. "Learning The Treasure Within: education for the 21st century".
- Samuel P. Huntington. 1971. "Modernization Development and Politics, in From Modernization to Globalization". London: eds. T. Roberts and A. Hite. *Blackwell Publishing, Ltd.*: 146-147.
- So, Alvin Y-Suwarsono. 1991. "Perubahan Sosial Dan Pembangunan Di Indonesia". Jakarta: Teori-Teori Modernisasi, Dependensi, Dan Sistem Dunia. *LP3ES*

The Dakar Framework for Action. 2000. "Education For All", *World Economic Forum*

UNDP. 2010. "Human Development Report 2010". New York: *Palgrave McMillan*

Syarif Moeis. 2008. "Masyarakat Indonesia Dalam Pendekatan Teori Modernisasi Dan Teori Dependensi". *Fkip Upi*

Unesco. 1996. "Learning the Treasure Within: Education for 21st Century"

Wallerstein, I. 1974. "The modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century". New York: *Academic Press*

Weiner Myron. Ed. 1994. "Modernisasi Dinamika Pertumbuhan (terj.)". Yogyakarta: *Gajah Mada University Press*

World Economic Forum. "The Global Competitiveness Report 2010-2011"

### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:**

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

PP Nomor 66 Tahun 2010, pengganti PP No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

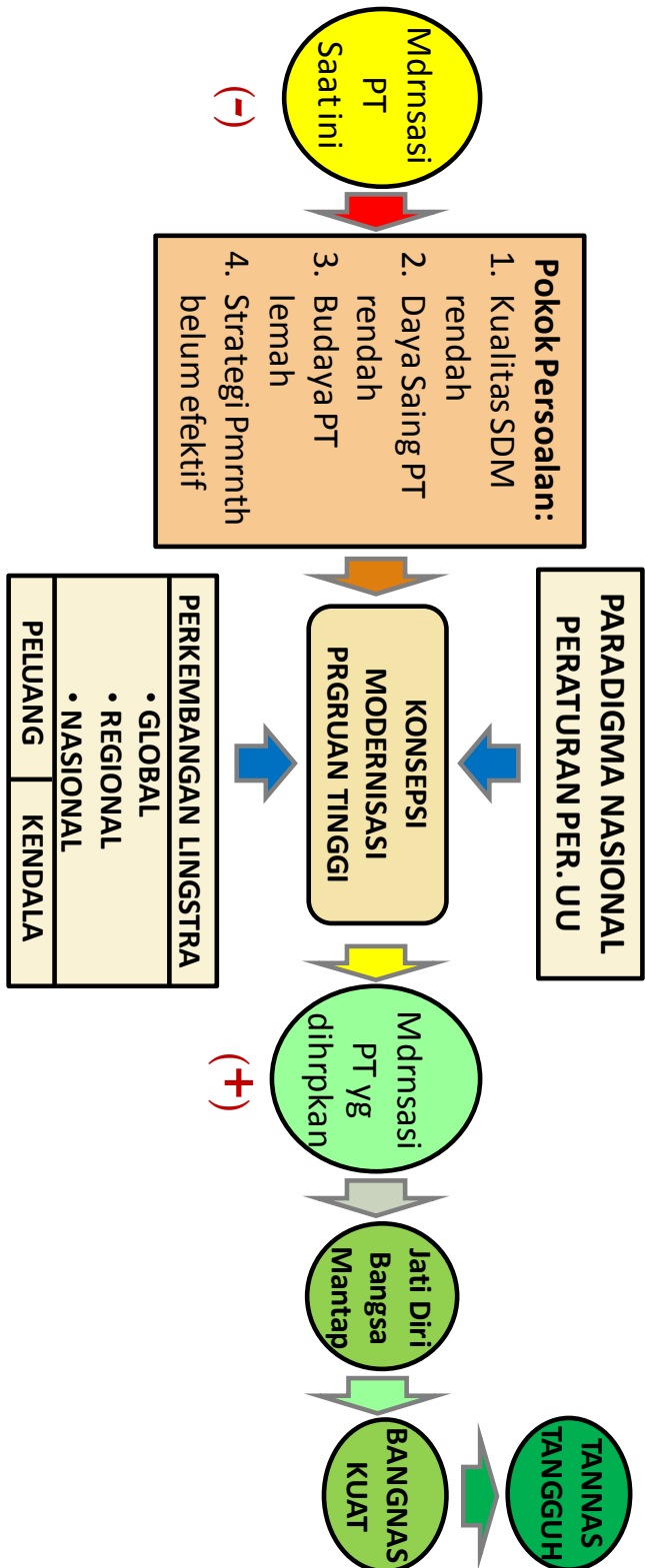


# LAMPIRAN



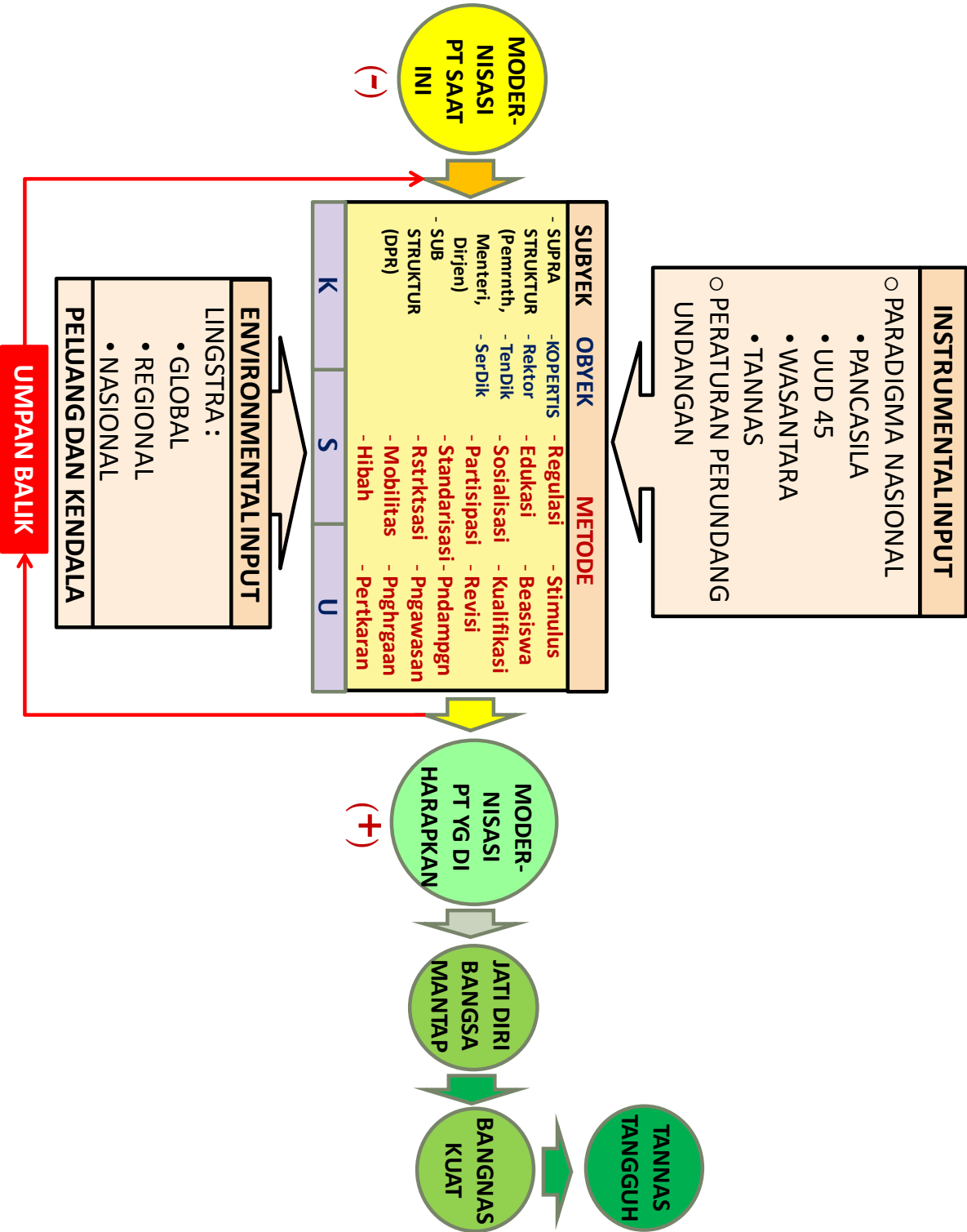
MODERNISASI PERGURUAN TINGGI GUNA  
 PEMANTAPAN JATI DIRI BANGSA DALAM RANGKA  
 PEMBANGUNAN NASIONAL

**Lampiran-1**  
**ALUR PIKIR**



# Lampiran-2 POLA PIKIR

MODERNISASI PERGURUAN TINGGI GUNA  
PEMANTAPAN JATI DIRI BANGSA DALAM RANGKA  
PEMBANGUNAN NASIONAL



LAMPIRAN-3  
RPJPN 2005-2025

**VISI:**  
**INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**

**MISI:**

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

**PENTAHAPAN PEMBANGUNAN  
RPJPN 2005-2025**



## LAMPIRAN-4

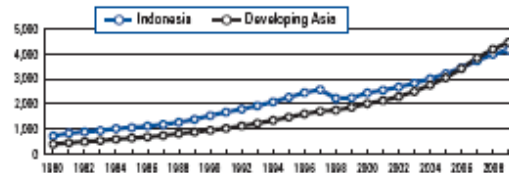
# INDIKATOR DAYA SAING INDONESIA

## Indonesia

### Key indicators, 2009

Population (millions)	230.0
GDP (US\$ billions)	539.4
GDP per capita (US\$)	2,329
GDP (PPP) as share (%) of world total	1.38

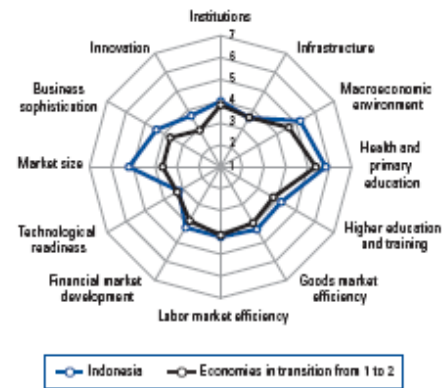
GDP (PPP) per capita (int'l \$), 1980–2009



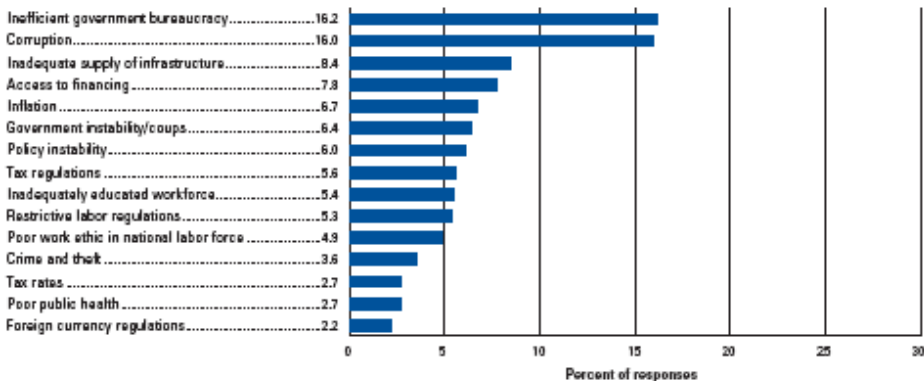
### Global Competitiveness Index

	Rank (out of 139)	Score (1–7)
GCI 2010–2011	44	4.4
GCI 2009–2010 (out of 133)	54	4.3
GCI 2008–2009 (out of 134)	55	4.3
<b>Basic requirements</b>	60	4.6
1st pillar: Institutions	61	4.0
2nd pillar: Infrastructure	82	3.6
3rd pillar: Macroeconomic environment	35	5.2
4th pillar: Health and primary education	62	5.8
<b>Efficiency enhancers</b>	51	4.2
5th pillar: Higher education and training	66	4.2
6th pillar: Goods market efficiency	49	4.3
7th pillar: Labor market efficiency	84	4.2
8th pillar: Financial market development	62	4.2
9th pillar: Technological readiness	91	3.2
10th pillar: Market size	15	5.2
<b>Innovation and sophistication factors</b>	37	4.1
11th pillar: Business sophistication	37	4.4
12th pillar: Innovation	36	3.7

### Stage of development



### The most problematic factors for doing business



Note: From a list of 15 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The bars in the figure show the responses weighted according to their rankings.

## LAMPIRAN-5

### INDONESIA DALAM POSISI GLOBAL

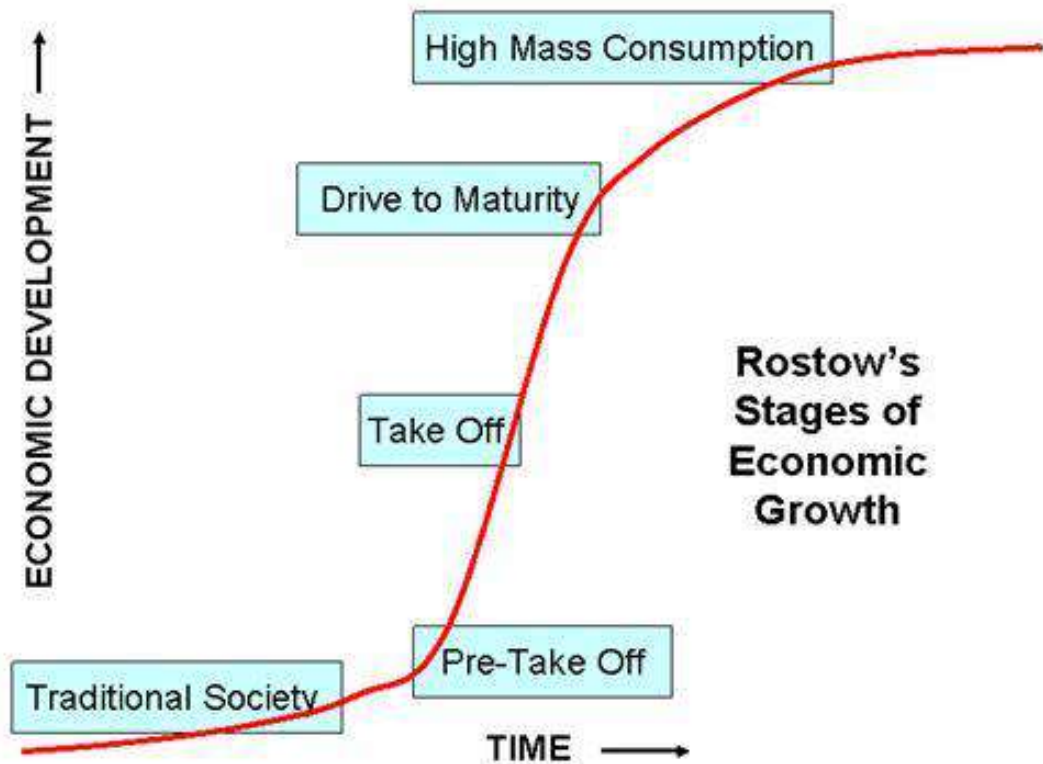
Sumber Kompas, Jumat 20 Mei 2011

Indikator	Peringkat Indonesia	Negara yang Disurvei
Indeks daya saing/GCI (2010-2011)	44	139
Infrastruktur (2010-2011)	82	139
Kesehatan dan pendidikan dasar (2010-211)	62	139
Angka Kematian bayi (2010-2011)	97	139
Angka harapan hidup (2010-2011)	91	139
Kualitas pendidikan dasar (2010-2011)	55	139
Indeks pembangunan manusia/HDI (2010)	108	169
Indeks persepsi korupsi/CPI (2010)	110	178
Risiko kegagalan negara (2010)	61	178
Indeks pembangunan pendidikan/EDI (2010)	65	128
Jumlah penduduk 237,6 juta oran (2010)	4	237
PDB 1,033 trilliun dollar AS (2010)	16	237
PDB per kapita 4.300 dollar AS (2010)	154	237
Penganggaran 7,1 persen (2010)	75	237

Sumber: Litbang Kompas, diolah dari World Economic Forum, CIA World Factbook, dan Transparency International

## LAMPIRAN-6

### TEORI ROSTOW



**Rostow's Theory of Industrial Development**

Characteristics	Stage One: The Traditional Society	Stage Two: Preconditions for Takeoff	Stage Three: Takeoff	Stage Four: Drive to Maturity	Stage Five: Age of Mass Consumption
<b>Economy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>largely agricultural (&gt;75%)</li> <li>limited production</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>surplus of agriculture &amp; capital</li> <li>expansion of trade &amp; manufacturing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rapid expansion of industry</li> <li>surge of technology</li> <li>commercial agriculture</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>technology extends to all sectors</li> <li>labor-saving devices are made</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>more use and production of durable goods</li> <li>service sector dominates (&gt;50%)</li> </ul>
<b>Society</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hierarchical social structure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>beginnings of a commercial class w/ some urbanization</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>increasingly dominant entrepreneurial class</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>urbanization</li> <li>increase in skilled and professional workers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>new middle class</li> <li>shift to the suburbs</li> <li>population growth stabilizes</li> </ul>
<b>Political Power</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>regionally-based in the hands of the landowners</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>centralized national government</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powerful factions encourage modernization</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>industrial leaders are highly influential</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>social welfare</li> <li>more resources for military &amp; security</li> </ul>
<b>Values</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>resist change, focus on old traditions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rising spirit of progress and openness</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>increased investment of capital for profit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>emphasis on technology</li> <li>expectation of progress</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>increased acquisition of consumer goods</li> </ul>

## LAMPIRAN-7

### RANGKING PERGURUAN TINGGI DI ASIA

No	Indikator	Negara	Score
1	The Hongkong University of Science and Technology	Hongkong	100
2	University of Hongkong	Hongkong	99.8
3	National University of Singapore	Singapore	99.3
4	The University of Tokyo	Japan	97.4
5	The Chinese University of Hongkong	Hongkong	97.2
6	Seoul National Univesity	Korea	96.9
7	Kyoto University	Japan	96.3
8	Osaka University	Japan	96.09
9	Tohoku University	Japan	94.3
9	Tokyo Institute of Technology	Japan	94.3
10	KAIST-Korea Advance Institute of Science and Technology	Korea	94.2
13	Peking University	China	93.3
31	National Tsing Hua University	Taiwan	77.8
34	Mahidol University	Thailand	77.09
36	Indian Institute of Technology-Kanpur	India	74.9
39	University of Malaya	Malaysia	73.7
47	Chulalongkorn Unviersity	Thailand	69.9
50	Universitas Indonesia	Indonesia	67.8
53	Universitas Kebangsaan Malaysia	Malaysia	64.09
62	University of the Philipines	Philipines	58.1
76	Universiti Teknologi Malaysia	Malaysia	55.1
80	Universita Gajah Mada	Indonesia	54.4



## LAMPIRAN-8

### TABEL INDIKATOR DAYA SAING INDONESIA

RANGKING pada tahun 2010 dari 139 negara (kecuali disebutkan lain)								
Negara	Populasi <sup>1</sup> (2009)	GDP <sup>2</sup> Per Kapita	GCI <sup>3</sup>		HDI <sup>4</sup> (169 Neg.)	GII <sup>5</sup> (2011) (125 Neg.)	EDI <sup>6</sup> (2008) (127 Neg.)	CPI <sup>7</sup> (178 Neg.)
			Total	Pilar HE*				
China	1	87	27	60	89	29	66	3.5
India	2	112	51	85	119	62	107	3.3
USA	3	9	4	9	4	7	33	7.1
<b>Indonesia</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	<b>66</b>	<b>108</b>	<b>99</b>	<b>69</b>	<b>2.8</b>
Brazil	5	57	58	58	73	47	88	3.7

Catatan:

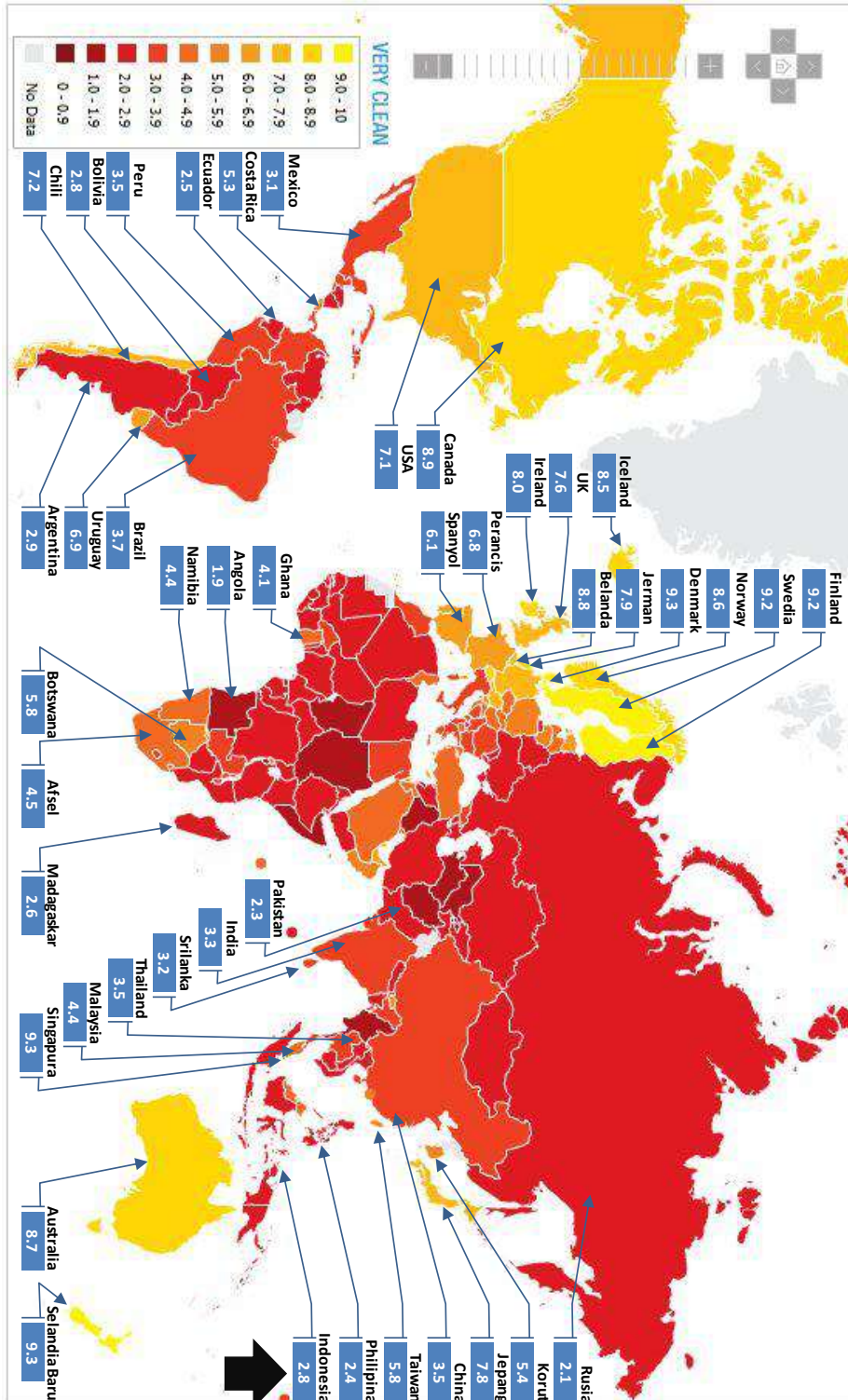
- 1: *Global Competitiveness Index (GCI); Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2010-2011,*
  - 2: *Ibid 1*
  - 3: *Ibid 1*
  - 4: *UNDP Releases 2010 Human Development Index (HDI)*
  - 5: *Global Innovation Index (GII), INSEAD*
  - 6: *Education For All Development Index (EDI), EFA Monitoring report 2011, UNESCO*
  - 7: *Corruption Perception Index (CPI), Transparency International*
- \* HE = *Higher Education*

Indikator	Peringkat Indonesia	Negara yang Disurvei
Indeks daya saing/GCI (2010-2011)	44	139
Kualitas pendidikan dasar (2010-2011)	55	139
Indeks pembangunan manusia/HDI (2010)	108	169
Indeks persepsi korupsi/CPI (2010)	110	178
Indeks pembangunan pendidikan/EDI (2010)	65	128

Sumber: World Economic Forum, dan Transparency International

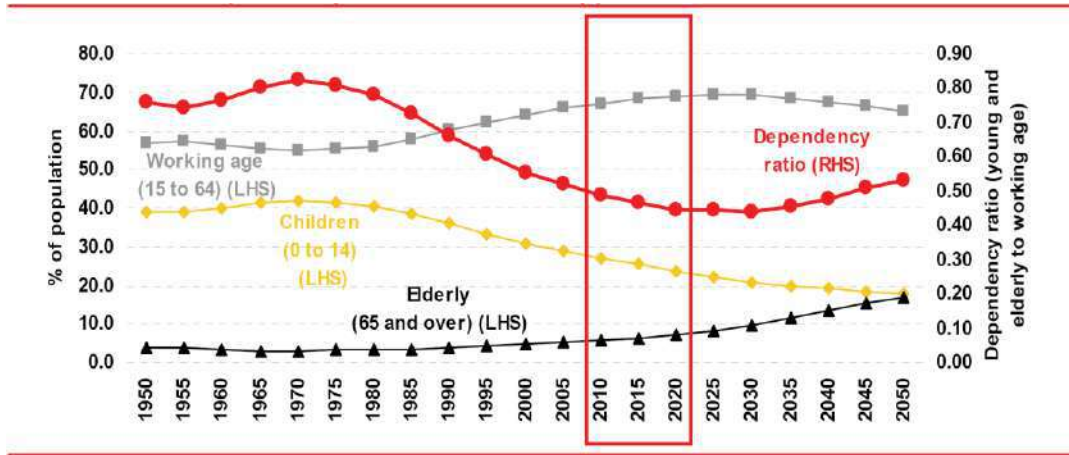
# LAMPIRAN-9

## PETA INDEKS PERSEPSI KORUPSI DUNIA

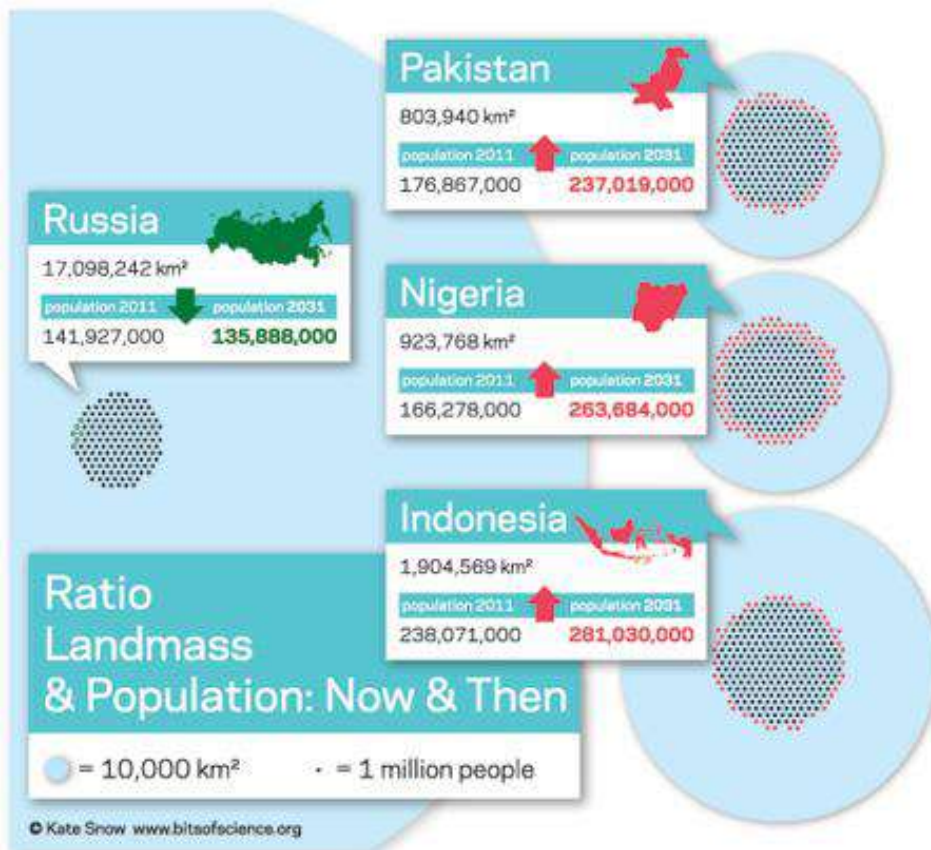


## LAMPIRAN-10

### DEMOGRAFI INDONESIA

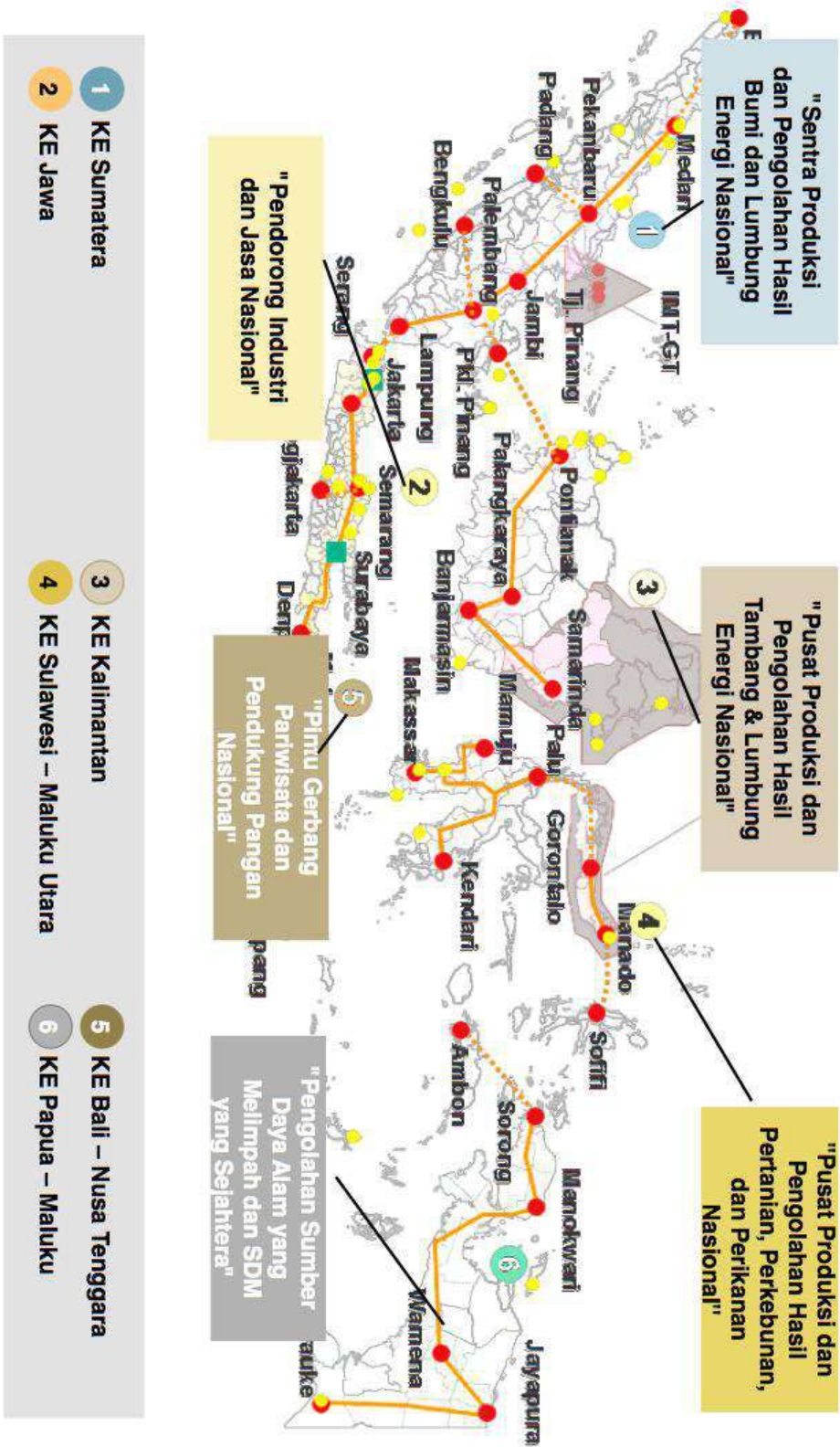


### Prediksi Populasi Indonesia Tahun 2031



# LAMPIRAN-11

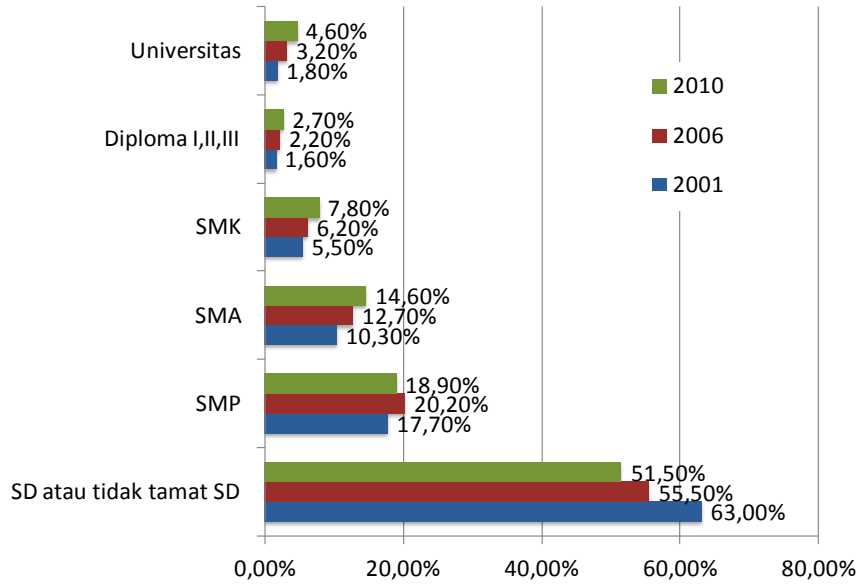
## 6 KORIDOR PENGEMBANGAN INDONESIA



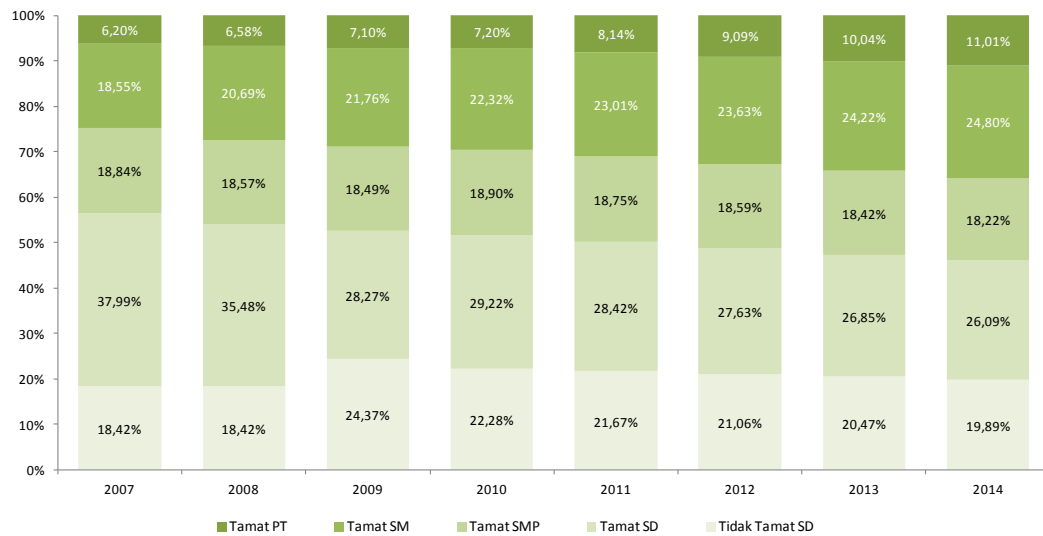
## LAMPIRAN-12

### SITUASI SDM INDONESIA

Sumber BPS



### Trend Persentase Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



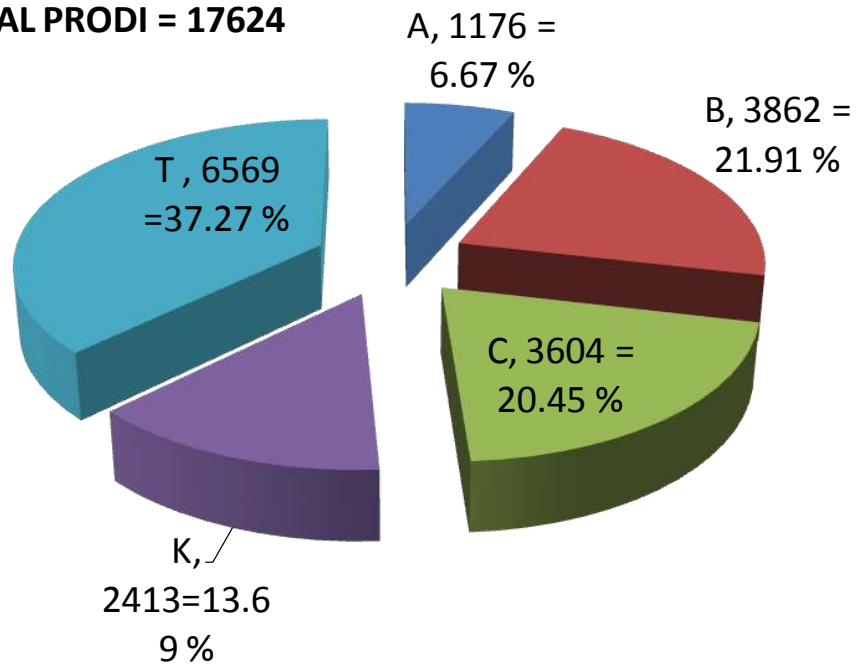
Catatan:

1. Data tahun 2007-2010 diolah berdasarkan buku "Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial- Ekonomi Indonesia 2009 dan 2010", BPS
2. Data tahun 2011-2014 diproyeksikan dengan asumsi sasaran APK tercapai

LAMPIRAN-13

**STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI  
DISELURUH INDONESIA**

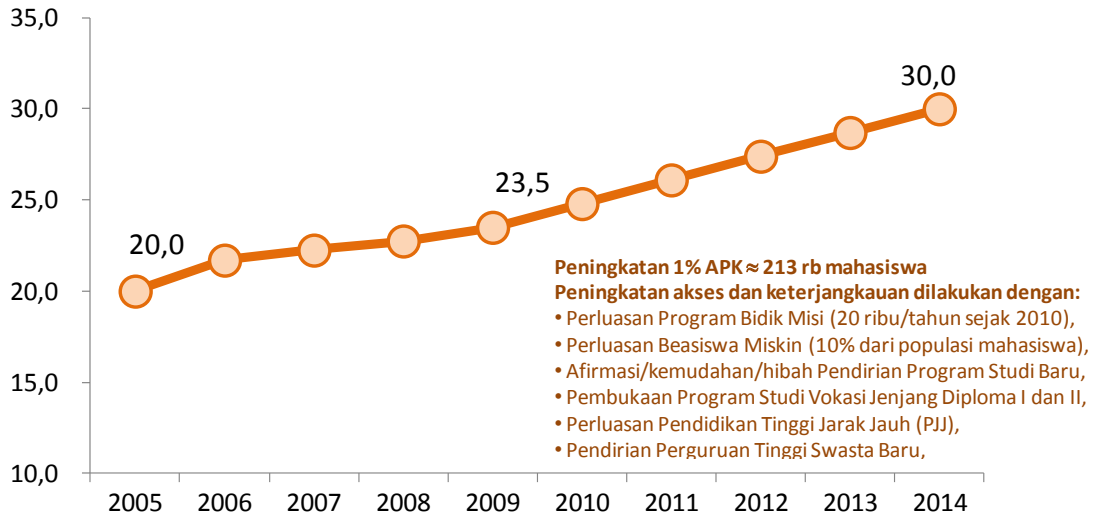
**TOTAL PRODI = 17624**



- \*A = Akreditasi A
- B = Akreditasi B
- C = Akreditasi C
- K = Kadaluarsa
- T = Belum Akreditasi

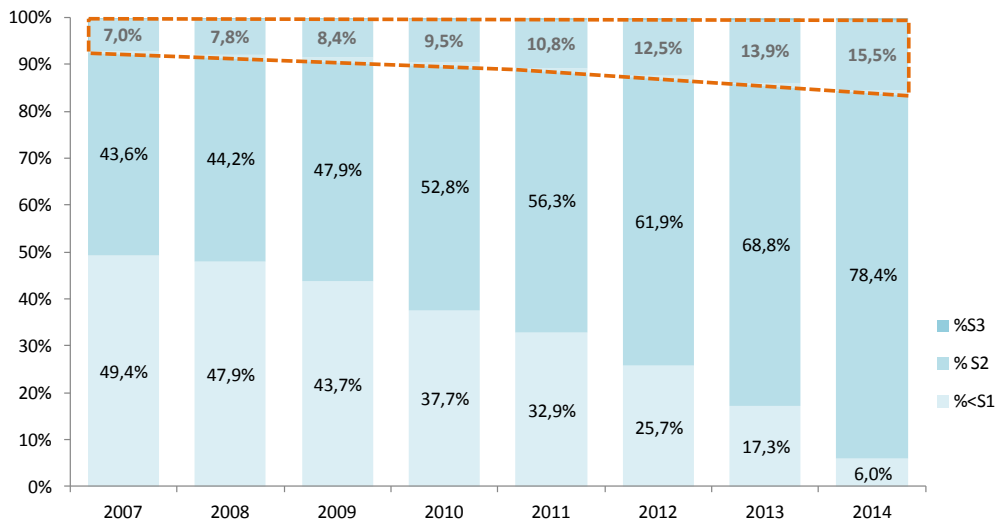
## LAMPIRAN-14

### APK PERGURUAN TINGGI



### PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA PENDIDIK (DOSEN)

Sejak tahun 2011, disediakan beasiswa S3 bagi 4.500 dosen dan beasiswa S2 bagi 3.600 dosen setiap tahun



## LAMPIRAN-15

### INDEKS PENGEMBANGAN MANUSIA SECARA GLOBAL

Rank	Country	Index
1	Norway	0.938
2	Australia	0.937
3	New Zealand	0.907
4	United States	0.902
5	Ireland	0.895
6	Liechtenstein	0.891
7	Netherland	0.890
8	Canada	0.888
9	Sweden	0.885
10	Germany	0.885
11	Japan	0.884
12	Korea	0.877
13	Switzerland	0.874
16	Finland	0.871
23	Italy	0.854
26	United Kingdom	0.849
27	Singapore	0.846
57	Malaysia	0.744
73	Brazil	0.699
83	Turkey	0.679
86	Fiji	0.669
89	China	0.663
91	Sri Lanka	0.658
92	Thailand	0.654
97	Philippines	0.638
108	Indonesia	0.600
113	Viet Nam	0.572
119	India	0.519
120	Timor-Leste	0.502
125	Pakistan	0.490
135	Madagascar	0.435
137	Papua New Guinea	0.431
169	Zimbabwe	0.140

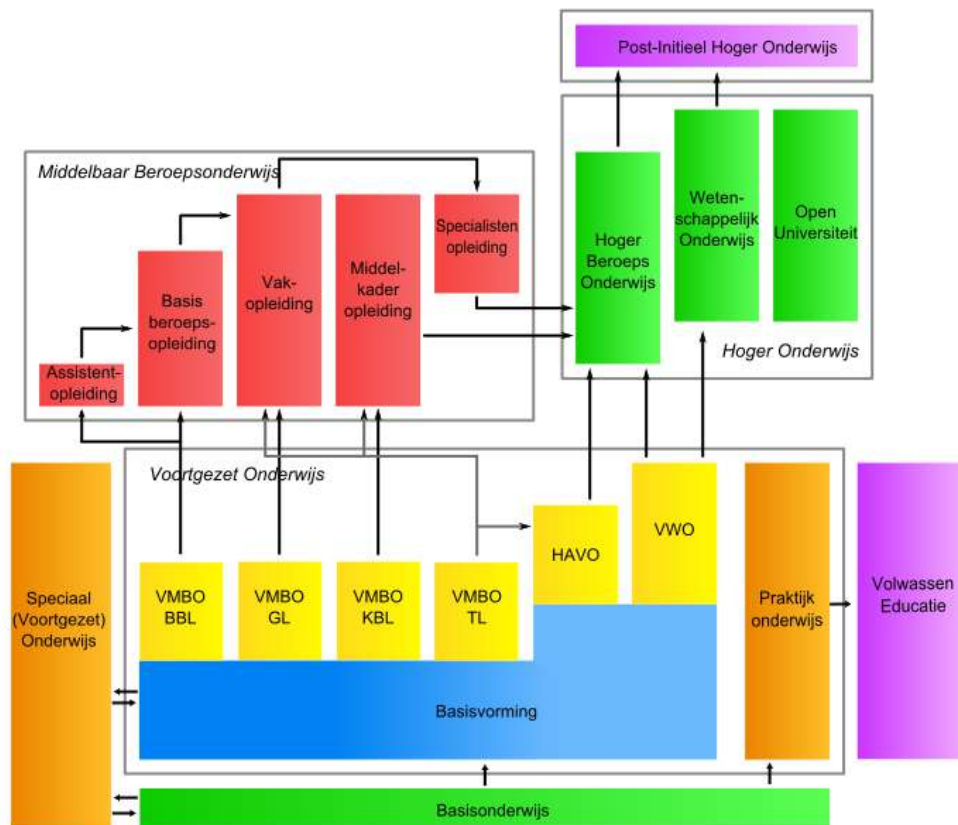


## LAMPIRAN-16

### SISTIM PENDIDIKAN TINGGI DI BELANDA<sup>1</sup>

#### 1. Sistem pendidikan Belanda

Salah satu perbedaan sistem pendidikan Belanda adalah penjurusan yang dimulai sejak pendidikan tingkat dasar dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan akademik siswa. Secara umum, sistem penjurusan tersebut terbagi menjadi: (1) pendidikan tingkat dasar dan lanjutan, (2) pendidikan tingkat menengah kejuruan, dan (3) Pendidikan tingkat tinggi.



Gambar 1. Sistem Pendidikan di Negara Belanda

#### 2. Pendidikan tingkat dasar dan lanjutan

Usia wajib belajar di Belanda dimulai sejak usia 5 tahun hingga 18 tahun. Untuk program wajib belajar ini, pemerintah menyediakan dana sehingga para siswa dibebaskan dari beban biaya sekolah. Sekolah dasar (basisschool) di Belanda berkisar selama 8 tahun. Lalu siswa bisa

<sup>1</sup> Yasmin S. 2009. Sistem Pendidikan Belanda dan Indonesia. Jong Indonesia: Edisi no.2: 5-6

melanjutkan ke pendidikan lanjutan sejak usia 12 hingga usia 18 tahun. Pendidikan lanjutan ini terbagi menjadi beberapa program:

a. **VMBO** (**V**oorbereidend **M**iddelbaar **B**eroepsonderwijs)

Program 4 tahun ini memberikan pendidikan yang merupakan gabungan dari pendidikan umum dan kejuruan. Lulusannya bisa melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah kejuruan (Middelbaar Beroepsonderwijs/MBO).

b. **HAVO** (**H**oger **A**lgemeen **V**oortgezet **O**nderwijs)

Program 5 tahun ini memberikan akses langsung ke pendidikan tingkat tinggi yaitu ke Hoger Beroepsonderwijs (HBO/university of professional education). Dua tahun terakhir dalam HAVO merupakan tahun penjurusan untuk memilih bidang pilihan mereka. Siswa lulusan HAVO dapat melanjutkan studinya ke VWO apabila mereka ingin melanjutkan ke universitas. Akan tetapi, mereka harus menambah tahun pelajaran sehingga jangka waktunya menjadi lebih lama dibandingkan dengan langsung ke program VWO.

c. **VWO** (**V**oorbereidend **W**etenschappelijk **O**nderwijs)

Program 6 tahun ini juga memberikan akses langsung ke pendidikan tingkat tinggi (universitas). Tiga tahun terakhir dalam VWO merupakan tahun penjurusan untuk memilih bidang pilihan mereka.

Penjurusan dalam HAVO dan VWO terbagi menjadi:

- 1) Ilmu teknologi dan fisika (techniek en natuur)
- 2) Ilmu kesehatan (natuur en gezondheid)
- 3) Ilmu sosial ekonomi (economie en maatschappij)
- 4) Ilmu sosial dan budaya (cultuur en maatschappij)

### **3. Pendidikan tingkat menengah kejuruan**

MBO diberikan dalam beberapa jurusan, antara lain ekonomi, teknik, kesehatan, perawatan, kesejahteraan, dan pertanian. Program MBO diberikan dalam 4 tingkatan (1-4 tahun) dan hanya lulusan dari tingkat 4 MBO saja yang dapat memiliki akses ke HBO.

### **4. Pendidikan tingkat tinggi**

Pendidikan tingkat tinggi di Belanda terdiri atas 2 bagian, yaitu HBO (sekolah tinggi/institut) dan WO (universitas). HBO memberikan pendidikan yang bersifat siap guna untuk siswa yang ingin langsung terjun ke dunia

professional dan praktis, sedangkan universitas memberikan pendidikan yang bersifat spesifik/penjurusan berdasarkan ilmu-ilmu murni. Pada setiap tahun pertama HBO/WO ada penyaringan yang disebut dengan masa propedeuse. Dalam proses ini, setiap siswa wajib menyelesaikan mata pelajaran tahun pertama mereka dan waktu dua tahun. Jika siswa tersebut gagal, maka dia akan dikeluarkan dari jurusan (Drop-out/DO). Sejak tahun 2002, pemerintah Belanda memberlakukan sistem pendidikan tingkat tinggi baru. Pada sistem baru ini, pendidikan tingkat tinggi dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu Bachelor dan Master (BAMA) serta tingkat doktoral (Ph.D.). Walaupun menurut peraturan tersebut lulusan dari HBO maupun WO mempunyai gelar yang setara, ada beberapa perbedaan yang mencolok antara kedua institusi tersebut dalam penerapan sistem BAMA dan Ph.D. (lihat Tabel 1). Sedangkan gelar Dr. hanya bisa diperoleh melalui program di WO. Lulusan program Bachelor dari HBO yang ingin memasuki program magister di WO wajib memasuki 1 tahun persiapan di WO (pre-master) sebelum memulai program dengan jurusan yang sudah dipilih, atau mengambil program pre-master WO dalam masa studi minor HBO di tahun ketiga/keempat. Hal tersebut juga berlaku bagi lulusan program magister dari HBO yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat doktoral di WO.

Tabel 1. HBO dan WO

	HBO	WO
Bachelor	<p>HBO WO Bachelor Degree diperoleh setelah menyelesaikan program di HBO dengan mengumpulkan kredit sebanyak 240 European Credit Transfer System (ECTS) selama 4 tahun. Lulusan program ini hanya berhak menggunakan titel Bachelor yang berkaitan dengan jurusannya.</p> <p>Contoh: Ingenieur, Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Nursing, dan lain-lain.</p>	<p>Bachelor Degree diperoleh setelah menyelesaikan program di universitas dengan mengumpulkan kredit sebanyak 180 ECTS selama 3 tahun.</p> <p>Lulusan program ini berhak menggunakan titel Bachelor of Science dan Bachelor of Arts (B.A. /B.Sc.) tergantung dari jurusan yang diambil</p>
Master	<p>Master Degree diperoleh setelah menyelesaikan program magister di HBO dengan mengumpulkan kredit sebanyak 60 atau 120 ECTS (1 atau 2 tahun). Lulusan program ini hanya berhak menggunakan title master yang berkaitan dengan jurusannya.</p> <p>Contoh: Master of Social Work, Master of Business, dan lain-lain.</p>	<p>Master Degree diperoleh setelah menyelesaikan program magister di Universitas dengan mengumpulkan kredit sebanyak 60, 90 atau 120 ECTS (1, atau 1,5 atau 2 ta-hun).Lulusan program ini berhak menggunakan titel Master of Science dan Master of Arts (M.A. /M.Sc.) tergantung dari jurusan yang diambil.</p>

